



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

●●● EDISI #61 NOVEMBER 2025



1 TAHUN PRABOWO UTAMAKAN EKONOMI RAKYAT



Rp75.000,-

**INVESTASI JADI
MOTOR UTAMA
TRANSFORMASI
EKONOMI DAERAH**

**KERJA BUAT
RAKYAT MASIH
DIGANGGU
ELITE**

**DIREKTORAT
JENDERAL
PESANTREN KADO
SPECIAL HARI
SANTRI 2025**

**B50 BIKIN
HARGA
CPO
MELONJAK**

**TARGET AMBISIUS
PRABOWO PUNYA
MOBIL NASIONAL
DALAM 3 TAHUN**



INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

www.infoindonesia.id



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id
 facebook @infoindonesia.id twitter : @_infoindonesia
 Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 **info indonesia** iNOVASI UNTUK NEGERI

Selamat Hari

PAHLAWAN

10 NOVEMBER 2025



EDISI
BULAN
NOVEMBER
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan sederet kebijakan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari ekonomi rakyat, reformasi birokrasi, hingga diplomasi global. Namun, di tengah rentetan program ambisius itu, muncul pula dinamika sosial dan politik yang menguji komitmen terhadap stabilitas, transparansi, dan arah pembangunan.



22

INFO PRIORITAS

Upaya Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi.



32

INFO DAERAH

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) secara resmi menetapkan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tujuh daerah untuk tahun 2025.



48

INFO EKONOMI

Indonesia akan memiliki mobil nasional buatan sendiri dalam waktu tiga tahun mendatang. Begitu kira-kira salah satu target ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam periode pertama pemerintahannya.



62

INFO ISTANA

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan ASEAN dalam menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian global. Fondasi ASEAN yang kuat akan membuat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan negara-negara anggotanya itu mampu memainkan peran signifikan di kancah dunia.



66

INFO NASIONAL

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan perbaikan tata kelola pondok pesantren di Hari Santri 2025 yang jatuh pada Rabu, 22 Oktober 2025. Langkah konkret ditunjukkan dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama.



87

INFO KHUSUS

Kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh menjadi proyek andalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dinarasikan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

42 WARNA WARNI

44 INFO WISATA

46 INFO KESEHATAN

84 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

50

INFO EKONOMI

Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025. Penurunan HET itu tanpa menambah alokasi dana subsidi pupuk, sehingga diklaim tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

MENGENDAP

Menjelang akhir tahun, lagu lama kembali diputar. Lirikny sama. Dana pemerintah daerah masih cukup banyak mengendap di bank.

Seperti tahun-tahun sebelumnya juga, isu tersebut diiringi saling berbalas pernyataan, keterangan, dan alasan. Namun, polemik itu tidak dapat menghapus kenyataan. Ada dana yang mengendap di bank umum dan bank pembangunan daerah dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan.

Padahal, dana tersebut bisa bermanfaat bagi daerah. Dana dapat digunakan, antara lain untuk belanja pemerintah yang mengungkit perekonomian masyarakat dan membiayai berbagai proyek untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan sejumlah catatan, anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengendap di bank semakin besar dari tahun ke tahun.

Pada akhir 2002, anggaran yang mengendap Rp22,18 triliun. Nilainya naik menjadi Rp59,81 triliun pada akhir 2009, Rp99,24 triliun pada akhir 2012, dan menjadi Rp109 triliun pada 31 Desember 2013.

Masalah kronis itu juga terjadi pada akhir November 2021. Anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mengendap Rp226 triliun. Adapun pada November 2022 tercatat Rp278 triliun.

Sementara pada 20 September 2025, dana serupa, menurut catatan Bank Indonesia Rp233,97 triliun. Sedangkan, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri Rp215 triliun.

Situasi ini mengundang berbagai pendapat dan dalih. Ada yang menyebut birokrasi daerah kurang siap mengelola anggaran sehingga tidak sigap menentukan kegiatan.

Ada pula dalih serapan anggaran lambat karena peralihan pemerintahan pas-capemilihan kepala daerah. Faktanya, anggaran pemda yang mengendap ini terjadi nyaris setiap tahun, ada atau tidak ada pilkada.

Selain itu, pemda punya waktu sepanjang tahun untuk tidak mengulang kesalahan yang sama pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, berbagai kegiatan, antara lain lelang proyek dan belanja, bisa dikerjakan sejak awal tahun, sehingga anggaran bisa diserap lebih cepat.

Dengan cara itu, upaya mengungkit perekonomian daerah bisa dilakukan lebih awal. Begitu juga penciptaan lapangan kerja bisa lebih cepat.

Dana yang disimpan di bank akan memberikan imbal hasil. Namun, apakah imbal hasilnya setara dengan perputaran roda ekonomi jika dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan dan proyek di daerah?

Apalagi, saat ini kondisi perekonomian sedang perlu dipacu agar tidak semakin banyak masyarakat yang menyentuh garis kemiskinan atau jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kondisi perekonomian juga perlu dipacu agar pemutusan hubungan kerja tidak kian marak.

Sebagai pemilik dana, pemerintah mesti membelanjakannya dengan cepat dan tepat agar bermanfaat dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan warga. ●

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR: Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781

● FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro



Setahun Prabowo-Gibran

KERJA BUAT RAKYAT MASIH DIGANGGU ELITE

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan sederet kebijakan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari ekonomi rakyat, reformasi birokrasi, hingga diplomasi global. Namun, di tengah rentetan program ambisius itu, muncul pula dinamika sosial dan politik yang menguji komitmen terhadap stabilitas, transparansi, dan arah pembangunan.



Partai-partai politik mendorong Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadikan masa setahun pemerintahannya sebagai momentum untuk mengevaluasi program dan kinerja para menteri. Evaluasi dinilai penting agar kinerja pemerintahan ke depan lebih baik lagi. Selain itu, pemerintah juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar meski sudah melaksanakan sejumlah kebijakan dan

"Sekalipun baru setahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, alhamdulillah, hasil survei ini merupakan potret kinerja yang harus kita apresiasi sebagai akumulasi capaian pemerintahan di bawah Presiden Prabowo," ujar Bahlil, sesuai berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengakui masih ada kelebihan dan kekurangan dalam pelak-

Prabowo-Gibran. Selain ekonomi tumbuh 5,12 persen, daya beli masyarakat diklaim juga tetap terjaga hingga kemandirian pangan tercapai.

"Akhirnya kita bisa mandiri lagi, terutama dalam aspek swasembada beras. Stok beras kita 4,2 juta ton, merupakan stok tertinggi yang dimiliki. Jadi, ini merupakan capaian juga," kata Eddy.

Eddy juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mencapai 36 juta penerima. Pencapaian



terobosan yang patut diapresiasi.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo sejauh ini masih terjaga. Ia mengutip hasil survei Index Politica, di mana mayoritas responden atau 83,5 persen menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo selama satu tahun memimpin.

Menurut Bahlil, tingkat kepuasan itu tidak lepas dari sejumlah program yang dinilai pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta berbagai kebijakan di bidang pangan dan energi.

sanaan sejumlah program. Hal itu tentu akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program pemerintah ke depan lebih baik.

"Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum bagus saya yakin atas arahan Bapak Presiden seluruh menteri akan memperbaikinya. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Semua akan kita arahkan pada sesuatu yang lebih baik demi kesejahteraan rakyat dan bangsa," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengapresiasi kinerja setahun pemerintahan

tersebut merupakan hal yang tidak mudah, tetapi akhirnya dengan kerja keras Prabowo, program ini bisa menjangkau sampai hampir seluruh wilayah Indonesia.

"Kami juga melihat beberapa pencapaian, terutama di aspek kebijakan luar negeri. Di mana kita sekarang sudah diakui dan menjadi salah satu negara yang memiliki pencapaian besar dalam penyelesaian permasalahan gencatan senjata di Gaza (Palestina)," paparnya.

Meski demikian, Eddy masih melihat sejumlah tantangan dalam setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Selain

lapangan pekerjaan yang masih dibutuhkan masyarakat, ada juga warga yang masih sulit menjangkau kebutuhan pokok.

"Tantangan tetap masih ada, tetapi hal itu cepat diantisipasi pemerintah. Lapangan pekerjaan diberikan dengan pemberian kesempatan magang, lalu ada juga BLT (bantuan langsung tunai) Rp30 triliun untuk 35 juta keluarga. Itu 140 juta jiwa. Ini juga bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat tetap memiliki daya beli," paparnya.

Eddy juga menekankan, keputusan Presiden Prabowo dalam perombakan kabinet dalam satu tahun ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dia berujar, Presiden yang lebih mengetahui komposisi pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkapkan, setahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya sudah cukup waktu sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi semua program yang belum berjalan. Bahkan, bukan tidak mungkin evaluasi juga dilakukan terhadap para menteri.

Ganjar berharap, di tahun selanjutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bekerja lebih baik lagi untuk menaikkan program-program dan janji-janji yang disampaikan semasa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Memantapkan program dan janji politik berjalan sesuai target," katanya.

Konsolidasi Elite

Konsolidasi politik dan kelembagaan masih terus berjalan sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah tidak hanya menghimpun dukungan dari partai politik, tetapi juga membongkar pasang struktur kementerian dan lembaga.

Kendati penting dalam mencapai target implementasi program prioritas, pembangunan kekuatan yang berfokus di lingkaran elite juga berpotensi membuat perumusan kebijakan lebih banyak memaknai perspektif yang kurang inklusif.

Sejak dilantik dan membentuk pemerintahan pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran didukung tujuh dari delapan partai politik di parlemen. Padahal, tidak semua parpol di parlemen itu mendukung Prabowo-Gibran saat Pilpres

2024.

Lobi politik pascapilpres berhasil menarik tiga parpol yang tak tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran saat pilpres menjadi bagian dari pemerintahan. Ketiga parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Pemerintahan Prabowo-Gibran kini didukung oleh pe-

Pada April 2025 atau setelah pemerintahan berjalan enam bulan, Prabowo mendatangi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya. Sejak saat itu, parpol pemenang Pemilu Legislatif 2024 itu berkomitmen untuk menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi, meski berada di luar pemerintahan.



milik 470 kursi atau 81 persen dari total 580 kursi di parlemen.

Meski sudah didukung oleh mayoritas parpol pemilik kursi di DPR, pendekatan terhadap PDIP, yang adalah satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan, tetap dilakukan sejumlah elite dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Hasilnya, proses politik untuk menunjang berbagai kebijakan pemerintah pun relatif cepat. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, misalnya, dibahas sekitar satu bulan pada Agustus-September 2025. Begitu juga revisi UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

• INFO UTAMA

menjadi dasar perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN, dibahas selama empat hari, akhir September lalu.

Sejak awal, Prabowo membentuk kabinet yang terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat menteri, terbesar sepanjang sejarah pasca-Reformasi 1998. Ada pula setidaknya lima badan dan posisi baru, misalnya, utusan khusus presiden. Dengan demikian, setidaknya ada 53 menteri/pejabat setingkat

kembali membentuk kementerian baru dan mengubah kementerian menjadi badan. Badan Penyelenggara Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada September lalu, serta Kementerian BUMN yang dijadikan Badan Pengatur BUMN awal Oktober lalu. Presiden juga telah empat kali merombak kabinetnya. Ini dilakukan tidak hanya untuk mengganti menteri, tetapi juga menambah tiga wakil menteri baru dan dua asisten khusus Presiden.



menteri, 55 wakil menteri, dan 5 kepala badan yang membantu kerja presiden. Posisi itu diisi beragam kalangan, tetapi mayoritas berasal dari parpol, sukarelawan, dan para tokoh yang terlibat dalam kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Setelah berjalan 11 bulan, Presiden

Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengungkapkan keinginannya menghimpun seluruh kekuatan dan elemen bangsa untuk menjalankan pemerintahan. Menurut dia, kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui persatuan. Berkaca dari sejarah bangsa-bangsa lain, kehancuran terjadi ketika elite tidak

bisa bersatu.

Langkah menghimpun para elite ke dalam satu barisan ternyata tidak menjamin stabilitas nasional. Gelombang demonstrasi masyarakat setidaknya dua kali terjadi. Pertama, muncul gerakan yang membawa narasi Indonesia Gelap pada Februari 2025. Gelombang berikutnya, demonstrasi untuk memprotes pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum yang terjadi pada akhir Agustus lalu hingga mengakibatkan korban tewas.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tidak memungkiri ihwal prinsip persatuan semua elemen bangsa yang dikedepankan Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Hal itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan sejumlah program prioritas pemerintah dalam waktu setahun. Contohnya, swasembada pangan pada akhir tahun, Makan Bergizi Gratis yang dirasakan 35 juta orang, serta pemangkasan regulasi untuk mempercepat proses birokrasi.

"Dalam satu tahun ini banyak program yang berhasil diraih karena kerja keras kita bersama-sama, kerja sama di antara kementerian-kementerian," ujarnya, Jumat, 17 Oktober 2025.

Terkait bongkar pasang kabinet, Prasetyo menilai hal itu bukan masalah karena struktur kelembagaan tidak selalu bisa sempurna meski sudah direncanakan dengan baik sejak awal. Apalagi, seiring berjalannya pemerintahan, kerap ditemukan berbagai masalah yang perlu direspons dengan perubahan kelembagaan ataupun posisi pembantu presiden.

Ibarat permainan sepak bola, kata Prasetyo, seluruh jajaran pemerintah sudah merasa bermain dengan baik dan berlatih secara rutin. Akan tetapi, ketika bertanding belum tentu bisa meraih kemenangan.

"Begitu main, ternyata kita harus lakukan perubahan, kita janji (akan terus memperbaiki kerja pemerintah)," ucapnya.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo terlihat masih berkonsolidasi secara politik dan kelembagaan. Sebab, meski saat berkampanye Prabowo-Gibran menjan-

jikan keberlanjutan dari pemerintahan periode sebelumnya, banyak agenda dan target pemerintahan yang berbeda.

Komposisi pengisi kabinet juga berbeda dari sebelumnya. Apalagi, Presiden ingin menghimpun sebanyak-banyaknya kekuatan sehingga harus membentuk struktur yang besar untuk menempatkan orang.

Menurut Firman, pengisian struktur pemerintahan yang besar itu juga lebih mempertimbangkan ihwal politis. Akibatnya, tokoh yang dipilih belum tentu profesional di bidangnya. Berkaca dari sejarah, tokoh-tokoh dengan latar belakang politik pun kerap kali lebih mengutamakan kepentingan mempertahankan kekuasaan ketimbang mewujudkan program prioritas.

"Jadi, saya kira wajar jika konsolidasi organisasi ini tidak kunjung selesai. Selain ini merupakan pilihan politik Pak Prabowo, (banyak pihak di pemerintah) juga orientasinya lebih pada kepentingan masing-masing," tutur Firman.

Pada saat yang sama, perumusan kebijakan juga lebih banyak menggunakan perspektif yang kurang inklusif. Publik tidak cukup memiliki ruang partisipasi dan tak bisa memahami dasar pengambilan atau prioritas kebijakan. Oleh karenanya, demonstrasi menjadi pilihan terakhir bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Firman, harus ada upaya untuk meretas konsolidasi yang berujung pada kristalisasi kekuasaan secara eksklusif itu dari berbagai jalur. Salah satunya menggencarkan penyaluran aspirasi oleh masyarakat sipil. Sebab, sulit bagi publik mengabdikan peran DPR dan partai politik, mengingat di pemerintahan ada kecenderungan mereka juga belum bisa berperan optimal.

Pembenaan Kabinet dan Birokrasi

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melakukan sejumlah pembenaan usai setahun menjabat. Beberapa saran antara lain pergantian personel pemerintahan hingga perombakan birokrasi.

Executive Director NEXT Indonesia

Center, Christiantoko, mengatakan, Prabowo tak bisa mengabaikan adanya suara di tengah masyarakat untuk mengganti pembantu Presiden.

Persoalan berikutnya adalah pembenaan birokrasi hingga peraturan karena pemerintah kerap mencari solusi dengan menerbitkan peraturan.

"Peraturannya banyak banget, karena setiap masalah di lapangan diselesaikan dengan membuat aturan yang baru," kata Christiantoko, Selasa, 21 Oktober 2025.

Christiantoko mengatakan, pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih menjadi masalah. Menurutnya, para ASN masih kerap tak menyadari permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

"Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sehingga birokasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya," kata dia.

Sejalan dengan hal itu, ia menggambar kondisi birokrasi yang terukur, kaya fungsi meskipun miskin struktur. Kondisi ini diperlukan untuk mengimbangi pergerakan Prabowo di tingkat internasional, yang dalam setahun kepemimpinannya melakukan banyak lawatan.

Dia mengatakan, saat ini, terjadi fenomena penarikan kewenangan daerah oleh pemerintah pusat. Namun demikian, proses ini sebenarnya sudah terjadi sebelum pemerintahan Prabowo.

Proses ini sudah berlangsung sejak terbitnya UU Minerba dan Undang-Un-



Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, meminta pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Sebab, birokrasi yang andal menjadi penopang negara yang maju.

Ia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang menurutnya tak mengenal politisasi birokrasi. Saat melakukan studi ke sana, ia mengatakan PNS Singapura kaget dengan perbedaan kondisi, karena di sana tidak ada birokrasi yang ditarik-tarik ke politik praktis.

dang Cipta Kerja yang dinilai menggerus prinsip desentralisasi.

"Tidak hanya ditarik ke provinsi, tapi ke pusat. Maka seolah ada justifikasi saat ini anggaran untuk daerah yang biasanya 35 persen dari APBN, berkurang saat ini. Maka yang terjadi kabinet membesar," kata Siti Zuhro.

Siti juga menyinggung pembengkakan birokrasi di tingkat pusat berkontribusi pada menurunnya alokasi anggaran bagi daerah. Dia menilai, konstitusi sebenarnya menjamin otonomi daerah secara seluas-luasnya.

Oleh karena itu, hal yang perlu dibenahi saat ini adalah kejelasan dan penegasan payung hukum terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. ●

KEPUASAN PUBLIK TERHADAP PRABOWO MASIH TINGGI

Setahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk menakar kinerja nasional. Sejumlah lembaga survei merilis hasil penilaian publik terhadap capaian pemerintahan di berbagai bidang strategis.

Beragam program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, hingga Sekolah Rakyat disebut memberi pengaruh nyata di masyarakat. Pemerintah juga dinilai konsisten mendorong pemertanaan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi sepanjang tahun pertama masa jabatan.

Secara umum, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran tergolong tinggi dan stabil. Hasilnya menandakan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah masih terjaga dengan baik.

Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan sebanyak 74,8 persen publik merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, hanya 22,8 persen yang merasa tidak puas.

kan tanda psikologis. Masa euforia telah bergeser menjadi masa evaluasi. Gaya tegas dan gestur heroik tak lagi cukup, yang dicari adalah kebijakan yang terasa di dapur dan di lapangan pekerjaan," kata Adjie, Kamis, 23 Oktober 2025.

Adjie mengatakan, dalam survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada 10-19 Oktober 2025, LSI Denny JA juga mengukur enam aspek kehidupan bernegara selama setahun terakhir. Hasilnya, lima aspek mendapat rapor biru dan satu aspek rapor merah.

"Skor ini dihitung dari persentase publik yang menilai baik/sangat baik dikurangi persentase publik yang menilai buruk/sangat buruk. Jika hasilnya positif, ia rapor biru. Jika hasilnya negatif, ia rapor merah," katanya.

Di antara enam bidang, hubungan internasional mencatat nilai tertinggi (63,5). Publik menyaksikan Prabowo tampil percaya diri di forum global. Prabowo menyuarakan kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina, membawa semangat Global South, dan memperluas jejaring diplomasi dengan tokoh dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Masuknya Indonesia ke dalam BRICS menjadi simbol bahwa negeri ini tak lagi sekadar penonton, melainkan pemain dalam peta kekuatan global.

"Dalam persepsi publik, Prabowo bukan hanya presiden nasional, tetapi figur global, seorang pemimpin yang membuat Indonesia kembali disegani. Kebanggaan ini nyata, emosional, dan sulit dipisahkan dari identitas kolektif bangsa yang lama merindukan pengakuan dunia," tutur Adjie.

Aspek lain yang mendapat rapor biru adalah sosial budaya (61); Keamanan Nasional (48,5); politik nasional (9,4), dan hukum nasional (8,3). Sementara aspek yang mendapat rapor merah adalah ekonomi (-13,8).

"Lebih banyak rakyat yang menilai



Direktur KCI-LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengatakan, temuan survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Prabowo mulai fluktuatif. Pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik mencapai 80 persen, lalu meningkat pada Juni 2025 sebesar 81,2 persen.

"Ini bukan gejala elektoral, melain-

hidup mereka 'buruk' daripada 'baik'. Lapangan kerja makin sulit (skor -46,9), daya beli menurun (skor -50)," paparnya.

Dalam survei, ditemukan program-program Prabowo-Gibran yang disukai dan tidak disukai publik. Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi yang paling disukai (79,8 persen) karena langsung dirasakan manfaatnya. Disusul Program Makan Bergizi Gratis (53,8 persen) meski paling banyak dikritik (38,2 persen).

Adapun Program 19 Juta Lapangan Kerja justru menelan skeptisisme (ketidakpuasan 71,6 persen), dan Koperasi Merah Putih masih jauh dari harapan rakyat (kepuasan hanya 23,1 persen).

"Data ini memberi pelajaran bahwa ide yang populer tidak selalu identik dengan implementasi yang kuat. Rakyat hanya ingin melihat hasil yang bisa disentuh," kata Adjie.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik. Survei Celios bahkan menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menjelaskan, penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.

"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujarnya.

Peneliti Hukum



CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan mayoritas publik juga merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.

Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.

Tak hanya itu, CELIOS menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.

Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti permasalahan dalam sistem peradilan hukum pidana selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Peneliti ICJR, Iftitah Sari, mengungkapkan berbagai macam masalah sektor penegakan hukum dimaksud sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

"Saya mengamini bahwa isu soal masalah yang terjadi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebetulnya kelanjutan dari presiden sebelumnya, yakni Presiden Jokowi, yang tidak diselesaikan, dan kita lihat malah semakin lebih buruk dampaknya di tahun terakhir



ini," ujar Tita, sapaannya.

Tita menerangkan, kebijakan yang sudah dilakukan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, misalnya terkait dengan kelebihan kapasitas atau overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Dia menambahkan penegak hukum di kasus tertentu sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.

Tita pun menyinggung banyak aktivis lingkungan dan juga aktivis demonstrasi pada Agustus lalu yang dilakukan penangkapan paksa dan penahanan.

Menurut Tita, perubahan ketentuan hukum acara pidana yang saat ini masih dilakukan pembahasan juga banyak menyisakan masalah. Ruang kriminalisasi dan potensi kekerasan masih mungkin terjadi.

Analisis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menyoroti masalah konsolidasi kekuasaan dan program populis dalam satu tahun pemerintahan Prabowo.

Arif menilai dalam satu tahun ini Prabowo terlihat ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi yang membantunya berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Apakah kemudian Prabowo berusaha untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi? Jawabannya iya, tetapi ini tidak lebih mudah dibandingkan yang dilakukan Jokowi terhadap Megawati, padahal kita tahu cengkeraman Megawati ke Jokowi tidak kalah kuat," kata Arif.

Arif beranggapan saat ini Prabowo sedang mengonsolidasikan kekuasaan untuk keluar dari bayang-bayang tersebut. Setidaknya itu dilihat dari tiga cara penting.

Cara pertama dengan mengocok ulang kabinet atau reshuffle kabinet. Dalam satu tahun ini, Prabowo memang sudah me-reshuffle kabinetnya, entah karena persoalan kinerja maupun dugaan terlibat tindak pidana korupsi. Menteri-menteri yang diduga terafiliasi dengan Jokowi diganti oleh Prabowo. ●

MENTERI TERBAIK KABINET MERAH PUTIH

Sejumlah lembaga survei merilis penilaian kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang jatuh pada 20 Oktober 2025 lalu. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kinerja para menteri di kabinet Prabowo di mata publik.

Hasil survei Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menempatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di peringkat pertama menteri dengan kinerja terbaik dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dari hasil survei pakar dan survei umum, AHY mendapatkan nilai paling tinggi. Putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mendapatkan nilai 50, disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar di posisi kedua dengan nilai 48, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu'ti di posisi ketiga dengan nilai 44.

Di Survei umum posisi tidak berubah. AHY menempati posisi teratas sebagai menteri terbaik dengan 1.042 poin, disusul Nasaruddin Umar dengan 470 poin, dan Abdul Mu'ti dengan 227 poin.

Hasil berbeda ditunjukkan lembaga riset IndoStrategi yang menempatkan Abdul Mu'ti mendapat skor tertinggi menteri berkinerja terbaik. Kementerian yang dipimpin Mu'ti mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 3,35 poin.

"Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman.

Ali menjelaskan, faktor positif yang berpengaruh terhadap penilaian Mendikdasmen, di antaranya karena sistem PPDB/SPMB baru dinilai lebih tertib dan minim gejolak dibanding

tahun-tahun sebelumnya, hingga kepemimpinan menteri dinilai teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, apresiasi paling tinggi tingkat kinerja menteri adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tingkat kepuasan kepada Nasaruddin Umar mencapai 65,7 persen.

Sorotan juga diberikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang meraih tingkat kepuasan nomor tiga, dengan persentase 61,2 persen. Padahal, Purbaya merupakan menteri yang baru dilantik Prabowo sebulan terakhir.

"Lalu Purbaya Yudhi Sadewa, ini menteri baru tapi sudah diapresiasi positif," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid.

Nama-nama lain yang juga mendapatkan kepuasan publik di atas 60 persen adalah AHY dengan 61,0 persen dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto (60,2 persen).

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, masuk dalam divisi I dalam tingkat kepuasan publik tertinggi atas kinerjanya selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam survei yang dilakukan Riset Lingkungan Strategis (RILIS).

Amran memiliki tingkat kepuasan mencapai 83,6 persen. Sedangkan, Menteri Purbaya mencapai 82,8 persen.

Direktur RILIS, Arman Salam, mengatakan, divisi I adalah menteri yang meraih angka kepuasan di atas 80 persen.

"Dari data di lembaga survei RILIS

yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I, yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya," kata Arman.

Mengenai penyebab Amran dan Purbaya memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, Arman menjelaskan, dari analisis kualitatif yang diperolehnya, salah satunya karena kedua menteri itu dipersepsi positif sebagai menteri yang tegas, berani, jujur, bersih dan anti korupsi.

Amran juga dipersepsi mayoritas publik sebagai menteri yang berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satunya dengan kebijakan tak lagi impor beras.

Begitu juga dengan Purbaya yang menurut Arman memiliki gebrakan fenomenal. Meskipun baru menjabat dan belum sampai satu tahun, Purbaya dianggap sudah mengundang perhatian sekaligus harapan publik.

Selain itu, Amran juga menempati peringkat kedua menteri berkinerja terbaik berdasarkan survei terbaru Strategic and Political Insight Network (SPIN) dengan tingkat apresiasi publik mencapai 67,3 persen.

Hasil survei menempatkan Amran di klaster menteri berkinerja terbaik, hanya terpaut tipis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'thi yang berada di posisi pertama dengan 67,5 persen.

Direktur Eksekutif SPIN, Mawardin Sidik, menjelaskan, klaster menteri berkinerja tinggi ini terdiri atas mereka yang berhasil menjalankan program prioritas secara nyata dan komunikatif, dengan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.

Posisi Amran di klaster tersebut menegaskan konsistensi kebijakan Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. ●



MENTERI TERBURUK KABINET MERAH PUTIH

Sejumlah nama menteri dan kepala badan mendapatkan penilaian kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Ada tiga nama yang menjadi sorotan karena kinerjanya dinilai buruk oleh publik.

Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan dua survei berbeda untuk menilai para menteri. Dalam survei pertama, Celios menggunakan pendekatan pakar atau expert judgement dan bertanya kepada 120 jurnalis dari 60 lembaga pers. Sementara survei kedua memiliki 1.338 responden masyarakat umum dari wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam kedua survei tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendapatkan nilai terburuk.

"Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu Bahlil," kata peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers daring pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Dalam survei, Celios meminta responden untuk memberi peringkat kepada tiga menteri terburuk dan tiga menteri terbaik di Kabinet Merah Putih. Hasilnya mereka totalkan sebagai poin minus untuk menteri yang masuk peringkat terburuk dan poin plus untuk menteri terbaik.

Responden umum memberikan nilai -1320 untuk Bahlil. Artinya, hampir seluruh dari 1.338 responden berpendapat Bahlil pantas menjadi menteri dengan nilai terburuk dalam satu tahun terakhir.

Sementara di kalangan jurnalis, Bahlil mendapat nilai -151 dari 120 responden. Artinya sebagian besar jurnalis yang disurvei menempatkan Bahlil dalam peringkat pertama di antara menteri-menteri terburuk.

Celios menyebut memang ada kemiripan antara hasil survei pakar dan survei masyarakat umum.

"Ingin kami sampaikan bahwa data yang muncul di dalam laporan ini bukanlah opini dari Celios, bukanlah opini dari penulis, namun agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian," ucap Media.

Dalam survei pakar, posisi terburuk Bahlil diikuti oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang mendapat skor -81 dari para jurnalis. Sementara di posisi ketiga ada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigi, dengan skor -79, diikuti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor -56, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan skor -36.

Sementara dalam survei umum, posisi terburuk Bahlil diikuti Natalius Pigi dengan skor -346 dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan poin -253.

Menanggapi berbagai survei, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan yang berhak menilai kinerjanya adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, yang berhak untuk menilai kinerja para menteri hanyalah Presiden," kata Bahlil.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan tanggapan atas hasil survei yang memuat penilaian terhadap kinerja lembaganya. Dadan hanya mengucapkan terima kasih atas penilaian yang diberikan kepadanya.

"Semoga bisa menjadi pemacu untuk berbuat lebih baik," ucap Dadan.

Dalam peringkat kinerja menteri di bidang ekonomi, Dadan mendapatkan skor -67. Faktor utama dari skor rendah ini adalah implementasi program makan bergizi gratis, mulai dari tata kelola, transparansi penunjang mitra, hingga rentetan kasus keracunan massal.

"Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi itu otomatis tidak bisa terlepas dari para kinerja menternya. Di sektor ekonomi ini, peringkat pertama itu diduduki oleh Dadan Hindayana," ucap peneliti Celios, Bakhrul Fikri.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigi, merespons hasil survei tersebut dengan merasa yakin dirinya masih mampu bekerja sebagai menteri hingga berakhirnya Kabinet Merah Putih.

"Emang mereka yang kerja? Pemerintahan lima tahun Natalius yang kerja. Kalau mau minta reshuffle yang lain aja lah," kata Pigi, Selasa, 21 Oktober 2025.

Dia mengklaim telah memiliki andil dalam kabinet ini.

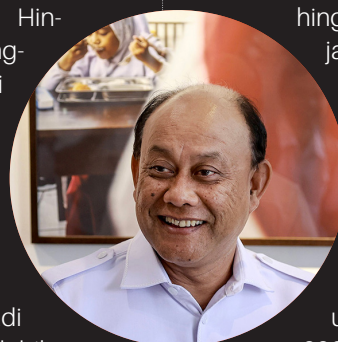
"Saya hasilkan pemerintahan lima tahun, baru kita bagi ke menteri-menteri lain. Jadi jangan suruh pemilik kebunnya untuk reshuffle," ujarnya.

Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok negarawan yang akan melihat sosok yang berkorban untuknya.

"Itu cara pandang negarawan. Presiden kalau negarawan, politisi, patriotik, lihat-lihat siapa yang berkorban bersama dia," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada para lembaga survei untuk tidak lagi menyampaikan kritik hingga dia menyelesaikan jabatannya dalam kabinet Prabowo-Gibran pada 2029.

"Jadi mulai sekarang enggak usah kritik-kritik lagi. Enggak usah kasih survei nilai paling rendah, enggak usah. Tunggu sampai 2029, baru kamu boleh kritik saya, begitu ya," pungkasnya. ●



KEPERCAYAAN MENINGKAT EKONOMI TUMBUH 8 PERSEN

Bayangkan sebuah negara yang selama bertahun-tahun dikenal berhati-hati dalam mengelola fiskalnya, lalu tiba-tiba menekan pedal gas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Inilah yang kini terjadi di Indonesia setelah Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025.

Langkah-langkah kebijakannya langsung mengguncang pasar. Dana Rp200 triliun digelontorkan dari cadangan anggaran ke bank-bank negara, suku bunga pinjaman ditekan, dan pesan politiknya jelas: ekonomi Indonesia harus tumbuh cepat, apapun risikonya.

Dalam dua bulan terakhir, arah kebijakan ekonomi nasional mulai menunjukkan hasil positif. Indikator kepercayaan publik dan daya beli masyarakat terus menguat, menjadi sinyal bahwa optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian pulih.

“Dua bulan terakhir ini, sentimen masyarakat terhadap pemerintah dan perekonomian nasional membaik cukup signifikan,” kata Purbaya yang menilai bahwa pemulihan sentimen publik mer-

upakan salah satu capaian penting di awal masa pemerintahan baru, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurutnya, pemulihan ini tidak hanya tercermin pada persepsi publik, tetapi juga pada data ekonomi riil yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) meningkat dari 117,3 pada September menjadi 130,6 pada Oktober 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi dan stabilitas nasional.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami kenaikan dari 90 menjadi 96, mendekati ambang normal di angka 100. Purbaya menilai hal ini sebagai bukti bahwa daya beli masyarakat mulai pulih setelah sempat



melemah di pertengahan tahun.

"Tren ini menunjukkan masyarakat mulai kembali percaya terhadap stabilitas ekonomi dan prospek pertumbuhan ke depan," kata Purbaya.

Pemerintah kini berfokus menjaga momentum positif ini dengan memperkuat program-program ekonomi strategis. Menurut Purbaya, langkah utama yang ditempuh meliputi pengendalian inflasi, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan dukungan bagi sektor riil serta UMKM agar perputaran ekonomi masyarakat tetap terjaga.

"Momentum ini tidak boleh hilang. Ke depan, fokus pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi yang produktif dan inklusif," ujarnya.

Ia menegaskan, optimisme publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Jika kepercayaan masyarakat terjaga, maka konsumsi dan investasi akan ikut meningkat, memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak global.

Kembalinya sentimen positif publik dinilai sebagai sinyal baik bagi dunia usaha dan investor. Dengan mening-

katnya kepercayaan masyarakat, roda ekonomi dapat berputar lebih cepat dan stabilitas fiskal dapat lebih mudah dijaga.

"Pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal tetap berpihak pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Purbaya.

Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal dan moneter yang selaras juga menjadi faktor penting untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah tantangan global, seperti ketidakpastian harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia.

Pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan ekonomi menjadi titik balik penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam situasi global yang tidak menentu, keberhasilan menjaga optimisme publik menjadi fondasi strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Purbaya menyebut, kinerja positif dua bulan terakhir menunjukkan bahwa masyarakat mulai kembali percaya pada kemampuan pemerintah mengelola ekonomi nasional.

"Presiden menekankan, tugas kita sekarang adalah memastikan kebijakan

ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujar Purbaya.

Ekonomi Cerah

Purbaya meyakini Indonesia akan cerah pada 2026 mendatang. Bahkan, ia yakin ekonomi Indonesia bisa melesat ke level 6 persen.

Gelontoran dana Rp200 triliun kepada lima bank BUMN diklaim menambah base money alias uang beredar di masyarakat, yang akhirnya menggerakkan perekonomian.

Purbaya juga masih punya satu mesin lain, yakni penyerapan anggaran yang lebih cepat. Kombinasi tersebut diklaim bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 persen secara year on year (yoy) di 2025, kemudian lebih tinggi lagi pada tahun berikutnya.

"Ke depan, saya rasa akan lebih cepat lagi karena saya akan monitor terus uang di sistem seperti apa, belanja di sistem seperti apa, dan kita juga akan debottlenecking seluruh hambatan-hambatan yang ada di perekonomian. (Tahun) 2026 pasti akan lebih cerah dibandingkan dengan 2025," kata Purbaya.



• INFO UTAMA

Bendahara Negara itu menuturkan sebenarnya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun yang dilakukannya bukan hal spesial. Langkah tersebut merupakan cash management. Itu ditempuh dengan memindahkan saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI).

Namun, ia menekankan cash management harus dilakukan tanpa mengganggu sistem finansial di Indonesia. Dia menjamin bakal melakukannya secara hati-hati agar perekonomian tidak terhenti lagi, seperti sebelum-sebelumnya.



Purbaya juga berjanji bakal disiplin menjalankan kebijakan fiskal yang telah dibuat. Lalu, dibarengi dengan mempercepat penyerapan anggaran dan waspada kebocoran di sejumlah titik.

"Tetap saya monitor, nanti pertengahan tahun (2026) sudah kelihatan tuh mana (program) yang bisa jalan, mana yang enggak. Saya akan ambil (anggaran program) yang enggak bisa jalan, saya akan distribusikan ke program-program yang lebih siap. Jadi, sama approach-nya, efisiensi anggaran. Bukan dengan motong, tapi dengan belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan gak ada kebocoran," jelasnya.

"Harapan saya dengan seperti itu, sektor pemerintah bisa dorong ekonomi dan swasta juga bisa dorong ekonomi pada saat yang bersamaan karena uang di sistem perekonomian cukup. Kalau itu sih seharusnya untuk 6 persen enggak terlalu sulit, untuk pertumbuhan ekonomi 6 persen (di 2026)," ucap Purbaya optimistis.

Berdasarkan proyeksi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, pertumbuhan Indonesia akan tembus 5,2 persen year on year (yoy) di 2025. Sedangkan UU APBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 5,4 persen secara tahunan.

Optimistis

Chief Economist Citibank Indonesia, Helmi Arman, memandang kebijakan agresif Purbaya dalam mengelola fiskal bakal mendongkrak optimisme ekono-



mi Indonesia pada 2026.

Ia menilai tekanan jangka pendek ekonomi Indonesia di tahun depan akan mereda. Kondisi itu didukung oleh program-program bantuan sosial hingga makan bergizi gratis yang akan mulai berdampak di tahun depan.

"Kami melihat Menteri Keuangan yang baru memiliki kecenderungan untuk lebih agresif dalam menggunakan dana yang belum terserap di berbagai kementerian dan lembaga untuk kegiatan stimulus spending. Bentuknya bisa berupa bantuan tunai hingga insentif pajak. Jadi, kami memperkirakan dorongan fiskal akan lebih kuat tahun depan," kata Helmi.

Selain itu, pihaknya juga memperkirakan Bank Indonesia (BI) masih akan menurunkan suku bunga acuan-nya sebanyak dua kali pada akhir 2025.

Dengan demikian, suku bunga acuan BI diprediksi akan berada pada level 4,25 persen di akhir tahun 2025. Pada Oktober 2025, bunga acuan BI tercatat pada level 4,75 persen.

"Selain itu, ada peningkatan likuiditas perbankan akibat pergerakan dana pemerintah dari rekening di BI ke sistem perbankan. Ini menciptakan suntikan likuiditas yang besar dan mendorong penurunan suku bunga deposito maupun kredit," kata Helmi.

Faktor pendukung stabilitas ekonomi RI lainnya juga muncul dari global, yang

mana bank sentral Amerika Serikat atau The Fed diprediksi tidak akan menaikkan suku bunga di 2026 dan dalam tren menurun.

Seperti diketahui, saat ini level suku bunga The Fed berada di kisaran 4,00 persen hingga 4,25 persen. Dengan kondisi tersebut, lanjut Helmi, ekonomi Indonesia diyakini masih akan tumbuh di level 5 persen pada akhir 2025.

Turunkan Pajak

Pakar ekonomi, Ferry Latuhihi, menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih jauh dari harapan jika pemerintah masih mengandalkan belanja pemerintah alih-alih mendorong konsumsi masyarakat. Dia menilai pungutan pajak saat ini masih cukup tinggi.

Ferry juga menilai kondisi ini menjadi hambatan untuk masyarakat maupun

korporasi melakukan konsumsi. Dia pun meminta Menkeu Purbaya berani menurunkan PPN menjadi 5 persen hingga menurunkan pajak korporasi.

"Saya katakan negara ini terlalu dominan menyeter ekonomi. Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi, karena swasta yang lebih tahu," ujar Ferry, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya dipungut dari pajak. Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat untuk mendorong aktivitas konsumsi, baik lewat bansos, bantuan tunai, hingga belanja infrastruktur besar-besaran.

Menurutnya, hal tersebut bukan cara organik untuk membawa Indonesia keluar dari zona middle income trap. Sebab, konsumsi masyarakat hanya bergantung suntikan dana dari pemerintah.

Sementara itu, aktivitas ekonomi di sektor swasta tidak mengalami pertumbuhan. Dampaknya, serapan tenaga kerja minim dan masyarakat susah punya pendapatan.

"Harusnya ekonomi kita digerakkan oleh swasta, bukan government yang gagal menjadi agen perubahan. Jadi poin saya, Anda (pemerintah) salah kalau bilang pro-rakyat, karena yang menciptakan lapangan pekerjaan adalah bisnis," tutur dia.

Ferry mengakui ketika pemerintah menurunkan persentase pungutan pajak, maka penerimaan negara akan berkurang. Namun, hal itu diperlukan ketika belanja pemerintah selama ini dianggap kurang tepat sasaran dan memboroskan.

"Semakin besar negara mendapatkan uang, semakin tinggi moral hazard-nya, termasuk korupsi. Kita bisa lihat, pembangunan IKN, proyek infrastruktur gila-gilaan yang kemarin. Terjadi miss allocated, di sini yang saya bilang government tidak bisa menjadi agent of development," kata Ferry.

"GDP itu adalah konsumsi, ditambah pemerintah, ditambah investasi, ditambah ekspor, dikurangi impor. Kalau dari government turun, ini bisa dikompensasi dengan konsumsi karena harga barang murah. Kalau corporate tax turun, pe-

rusahaan bisa pertahankan karyawan dan dia punya uang untuk ekspansi," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurrahman, juga berpendapat tarif PPN Indonesia yang saat ini 11 persen tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN yang berada di kisaran 8-10 persen. Ia mencontohkan negara seperti Thailand dan Vietnam yang bahkan menurunkan tarifnya ke 7-8 persen untuk mendorong konsumsi pasca pandemi.



Rizal menilai, tarif PPN yang ideal dan kompetitif secara regional bagi Indonesia berada pada kisaran 9-10 persen. Penurunan PPN terbatas ke level ini diperkirakan berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2-0,3 poin, dengan syarat pemerintah tetap menjaga disiplin anggaran dan memperluas basis pajak digital serta sektor informal.

Merespons hal itu, Purbaya mengakui usulan penurunan PPN menjadi 8 persen terdengar menarik ketika ia masih berada di luar pemerintahan. Namun, posisinya saat ini menuntut kehati-hatian karena implikasi fiskal yang besar.

"Kan kemarin diusulkan (PPN) naik jadi 12 persen, akhirnya cuma naiknya ke 11 persen. Orang usulin lagi, jangan ke 11 persen lah coba turunkin ke 9 persen atau 8 persen. Waktu di luar (pemer-

intah) juga saya (dengan) enaknya ngomong turunkin aja ke 8 persen, tapi begitu jadi menteri keuangan setiap 1 persen turun, saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Purbaya menyatakan, saat ini, fokus utama pemerintah adalah menghitung kemampuan riil penerimaan negara. Langkah yang akan diambil adalah perbaikan sistem pengumpulan pajak dan cukai.

"Saya akan perbaiki sekarang sampe dua triwulan ke depan. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkin berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," tutur dia.

Dia menekankan, keputusan untuk menurunkan PPN tidak bisa dilakukan secara serampangan. Perhitungan yang matang diperlukan untuk mengetahui kemampuan tax collection yang sesungguhnya setelah sistem diperbaiki.

"Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya. Jadi walaupun saya sembarangan kayak kobo, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti defisit saya di atas 3 persen," ujar Purbaya. ●

TITIK KRUSIAL 1 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan adanya kecenderungan policy trade-off yang tidak mudah dilakukan. Hal itu terlihat dari desain koalisi yang gemuk, perubahan struktur dan alokasi APBN, serta membesarnya peran pemerintah pusat.

Hal lain yang juga kentara adalah adanya perubahan kebijakan secara fundamental (policy switching) dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur menjadi kebijakan redistribusi sosial serta modernisasi alutsista dan organisasi TNI.

Capaian penting yang perlu dicatat dalam satu tahun ini adalah adanya konsolidasi permodalan melalui pembentukan Danantara yang diharapkan dapat mendukung program prioritas Astacita dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pengaruh dan keterlibatan Indonesia di tingkat global.

Policy trade-off salah satunya dipengaruhi karena adanya warisan masalah struktural

dan kelembagaan (path dependence) yang tinggi, baik dalam desain koalisi presidensial di masa lalu atau desain kebijakan ekonomi.

Untuk mendapatkan stabilitas politik, setiap presiden terpilih sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu terdorong untuk membangun koalisi besar di parlemen. Padahal, sejak Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR, pasal-pasal terkait pemakzulan presiden di UUD NRI 1945 menjadi lebih sulit dilakukan. Bahkan, hampir mustahil presiden dapat dimakzulkan secara politik.

Walaupun demikian, sejak SBY hingga Prabowo, struktur koalisi politik menjadi sangat gemuk. Pada masa pemerintahan SBY periode pertama, kabinet diisi oleh 73,27 persen dukungan partai di DPR dan meningkat menjadi 75,54 persen pada periode kedua.

Di masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, sebesar 68,93 persen kekuatan partai di DPR mendukung pemerintahan dan meningkat menjadi 91,30 persen pada akhir periode kedua.

Pemerintahan Prabowo Subianto mendapatkan 69,14 persen dukungan dari parlemen yang menyisakan PDI Perjuangan dan Nasdem di luar pemerintahan. Meskipun begitu, kedua partai tersebut sudah menegaskan dukungan politik pada Prabowo, walau tidak menjadi bagian dari anggota kabinet.

Setidaknya, ada tiga titik krusial yang menjadi catatan satu tahun pemerintahan: kabinet yang gemuk, perubahan fundamental kebijakan, dan re-sentralisasi.

Hyper-presidentialism

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo ini kita melihat terjadinya perubahan struktur kementerian/lembaga secara besar-besaran. Presiden menambah jumlah kementerian dari yang sebelumnya 34 kementerian/lembaga sejak 20 tahun terakhir (2004-2024) menjadi 49 kementerian.

Saat ini, Kabinet Merah Putih terdiri dari 49 menteri, 59 wakil menteri, dan 10 pejabat setingkat menteri, dengan total mencapai 118 orang.

Satu tahun ini menunjukkan betapa stabilitas koalisi presidensial bertumpu pada negosiasi dan distribusi jabatan, bukan kesamaan platform dan kebijakan. Dalam jangka menengah, situasi ini bisa membuat terjadinya electoral cartel (Katz & Mair, 1995), ketika partai-partai berebut sumber daya negara, bukan berkompetisi dalam kebijakan dan gagasan.

Akhirnya, meskipun pemilu tetap dilakukan secara reguler setiap lima tahun, tidak ada kompetisi kebijakan dalam arti yang sesungguhnya, sehingga DPR bisa terjebak sebagai

tukang stempel kebijakan pemerintah.

Situasi satu tahun pemerintahan Prabowo juga menunjukkan gejala hyper-presidentialism coalition, yakni koalisi dibangun bukan berdasarkan kesamaan platform dan kebijakan, melainkan untuk memastikan dukungan politik.

Dalam jangka pendek, hyper-coalition memang membuat situasi pemerintahan akan stabil, seperti tingginya dukungan politik parlemen terhadap agenda-agenda pemerintah.

Namun, dalam jangka menengah memengaruhi menurunnya akuntabilitas kebijakan, sehingga membuat masyarakat kehilangan saluran formal ke DPR untuk menyampaikan aspirasi. Kondisi tersebut salah satunya mendorong terjadinya demonstrasi besar ke DPR pada akhir Agustus 2025.

Koalisi yang gemuk bisa juga dipengaruhi oleh perolehan kursi Gerindra di DPR. Dalam Pemilu 2024, Gerindra hanya mendapatkan 86 dari 580 kursi di DPR. Sehingga, untuk mengamankan kebijakannya, presiden harus melakukan akomodasi politik yang besar.

Dampaknya adalah terjadinya pembesaran jumlah kementerian, birokrasi yang gemuk (karena adanya posisi wakil menteri pada semua kementerian), dan pembagian jabatan komisaris bagi tim sukses. Dengan demikian, walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melarang rangkap jabatan antara wakil menteri dan komisaris, hingga kini pemerintah belum melaksanakan putusan MK tersebut.



**OLEH: ARYA FERNANDES
KETUA DEPARTEMEN POLITIK DAN
PERUBAHAN SOSIAL CSIS**

Dalam satu tahun terakhir, kita juga melihat tidak adanya peran signifikan koalisi di pemerintahan. Semua kebijakan dirumuskan dalam kelompok kecil di lingkaran presiden. Hal tersebut dapat dimaklumi karena hubungan antarpolisi dipengaruhi oleh distribusi posisi dan sumber daya, bukan orientasi dan kebijakan yang sama.

Menjelang pemilu, kondisi tersebut akan berisiko karena partai koalisi bisa saja menarik diri atau berbeda pandangan dengan presiden. Apalagi dengan putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu.

Efisiensi

Idealnya, struktur kabinet harus mendukung gagasan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, seperti tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yang diukur dalam 5 sasaran, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan dan ketimpangan menurun, pengaruh internasional, daya saing meningkat, dan emisi nol bersih.

Pertanyaannya, apakah jumlah kementerian dan badan yang banyak tersebut telah membuat kebijakan menjadi lebih efisien dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif untuk mendukung Indonesia Emas 2045?

Jumlah kementerian yang besar saat ini sepertinya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Kabinet yang gemuk justru akan berisiko pada panjangnya rantai koordinasi, sehingga membuat koordinasi kebijakan menjadi lebih rumit. Begitu juga kendala dalam hal komunikasi lintas K/L.

Risiko lainnya adalah pengaruh banyaknya kementerian terhadap potensi terjadinya defisit anggaran. Studi Wehner (2010) pada 58 negara dari 1975-1998 menemukan adanya hubungan yang kuat jumlah kementerian yang membelanjakan anggaran negara (*spending ministers*) dengan defisit anggaran. Setiap penambahan jumlah kementerian akan membuat terjadinya defisit anggaran pemerintahan pusat sebesar 0,116 persen dan 0,074 persen produk domestik bruto (PDB).

Potensi tumpang tindih kewenangan juga berisiko terjadi pada program-program strategis pemerintahan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan yang melibatkan banyak K/L.

Dengan kultur ego sektoral yang masih tinggi, jumlah kementerian yang banyak akan membuat komunikasi dan koordinasi menjadi kurang efektif. Untuk itu, sebaiknya pemerintah memikirkan kembali struktur dan jumlah anggota kabinet agar dapat lebih efektif dan efisien untuk mendukung program-program strategis nasional dan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Perubahan kebijakan

Titik krusial kedua adalah adanya perubahan kebijakan secara mendasar (*policy switching*) dari pemerintahan Jokowi. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya keinginan Presiden Prabowo untuk membuat kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Yang paling mencolok adalah perbedaan tajam paradigma pembangunan negara dari konsep pembangunan berbasis infrastruktur dan industrialisasi di masa pemerintahan Jokowi, menjadi paradigma redistribusi sosial dan populis melalui

program-program, seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, biaya koalisi yang tinggi membuat presiden melakukan dua hal sekaligus, yaitu memperbesar kementerian untuk partai politik dan mempertahankan legitimasi politik di masyarakat. Untuk mempertahankan legitimasi publik, pemerintah merancang program *quick win* yang dilakukan secara serentak dan dalam jumlah yang besar.

Titik krusial ketiga adalah perubahan alokasi APBN, di antaranya meningkatnya belanja pertahanan, keamanan, dan ketertiban yang mencapai Rp594 triliun dari yang sebelumnya Rp376,4 triliun, serta alokasi MBG yang mencapai Rp335 triliun. Pemerintahan juga memangkas sekitar 24 persen dana transfer ke daerah.

Dengan tingginya ketergantungan daerah ke pusat membuat pemerintahan daerah tidak dapat berbuat apa-apa ketika pemerintahan pusat mengurangi alokasi anggaran. Satu tahun ini juga menunjukkan tingginya kontrol pemerintahan pusat terhadap program-program utama.

Sebagai contoh, terbatasnya kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Padahal, di masa pemerintahan SBY, program pemer-



intahan pusat, seperti PNPM Mandiri, ikut dikelola oleh pemda.

Satu tahun pemerintahan ini akan menentukan arah dan karakter pemerintahan ke depan. Pemerintah mungkin perlu memikirkan ulang strategi agar koalisi yang gemuk tidak menjadi beban fiskal dan memperlambat eksekusi program-program strategis.

Selain itu, perlu adanya *threshold* terkait alokasi transfer anggaran ke daerah, sehingga lebih memberikan kepastian bagi kepala daerah untuk merancang program. Selain itu, dapat juga mengadopsi transfer dana ke daerah yang berbasis kinerja, sehingga daerah-daerah terdorong melakukan inovasi. •



FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN JALAN

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Di antaranya pembangunan duplikat Jembatan Tanah Kering dan peningkatan Jalan Poros Pulau Rimau–Selat Penuguan di Kabupaten Banyuasin.

Jembatan baru ini dibangun di Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, dan menjadi penghubung strategis tiga kecamatan dengan 29 desa. Infrastruktur ini disebut-sebut sebagai “urat nadi ekonomi” karena menopang pergerakan hasil pertanian dan logistik warga.

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, konektivitas yang baik akan menurunkan biaya logistik, membuka akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak mungkin ekonomi tumbuh jika infrastruktur rusak. Ketika jalan dan jembatan tidak layak, biaya produksi meningkat dan memicu inflasi. Karena

itu, pembangunan ini harus kita laksanakan,” tegasnya.

Proyek pembangunan duplikat jembatan tersebut dibiayai oleh Bangsubs Provinsi Sumsel dengan total anggaran mencapai Rp84 miliar lebih, sementara tahap pertama senilai Rp 25 miliar difokuskan untuk konstruksi utama jembatan.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Gubernur juga menyinggung pentingnya pembenahan saluran irigasi dan fasilitas transmigrasi lama yang sudah ada sejak tahun 1982. Menurutnya, revitalisasi sektor tersebut akan memperkuat basis pertanian Sumsel.

Herman Deru menambahkan, meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran, sektor pembangunan tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan

bahwa program infrastruktur tidak boleh dikurangi karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

“Sumsel memiliki lebih dari 4.000 km jalan eks transmigrasi yang membutuhkan perhatian. Sebagian besar ada di Banyuasin, dan ini menjadi fokus kami,” katanya.

Bupati Banyuasin H. Askolani menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai dukungan Pemprov Sumsel terhadap proyek strategis di Banyuasin sangat besar dan konsisten setiap tahun.

“Dengan adanya jembatan baru ini, mobilitas barang dan orang akan meningkat pesat. Ini berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” ujarnya.

Dongkrak Pertanian Melalui PLTS Irigasi

Gubernur Herman Deru juga



terus berupaya mendorong kemajuan sektor pertanian di daerahnya dengan meresmikan dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Irigasi di Kabupaten Muara Enim, masing-masing berlokasi di Desa Matas dan Desa Karang, Kecamatan Tanjung Agung.

“Pertanian Sumsel kini menjadi salah satu yang paling produktif di Indonesia. Kita tidak hanya mengandalkan lahan yang luas, tapi juga inovasi, kolaborasi, dan teknologi yang tepat guna,” ujar Herman Deru.

la menambahkan, Sumsel kini telah menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan posisi sebagai penghasil beras nomor lima terbesar di Indonesia, naik dari posisi kedelapan sebelumnya. Capaian ini menjadi bukti nyata peningkatan produktivitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dengan bantuan irigasi seperti PLTS ini, indeks pertanaman bisa meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. Artinya, produksi beras Sumsel juga akan melonjak pesat,” jelasnya optimistis.

Herman Deru juga mengungkapkan bahwa program listrik masuk sawah merupakan salah satu terobosan khas Sumsel. Selain di Muara Enim, inovasi serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten OKU Timur.

“Dulu sistemnya masih menggunakan kabel dan terbukti mampu menekan biaya operasional petani. Sekarang, dengan metode PLTS yang lebih efisien, air bisa langsung dipompa lebih cepat. Harapan kita, setiap unit PLTS tidak hanya mengairi 20 hektar, tapi bisa menjangkau hingga 60 hektare sawah,” paparnya.

Dorong Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji

Demi mendorong peningkatan produksi pertanian di Sumsel, HD terus memperjuangkan penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

HD secara langsung meminta kepada Presiden Prabowo membantu mempercepat pembangunan Bendungan Tiga



PEMBANGUNAN BENDUNGAN DAN IRIGASI



OPLAH & TAHAP I (Inpres 02 Th 2025)	TAHAP II (Inpres 02 Th 2025)	LAYOUT LOKASI PEKERJAAN
<p>Kegiatan PIPA:</p> <p>OPLAH</p> <ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Bangunan Dan Pintu Air D.I.R. Sugihan Kanan (224 Unit; 5.632 Ha) - Rp.8.182.300.000,- Rehabilitasi Bangunan Dan Pintu Air D.I.R. Telang I (204 Unit; 1.536 Ha) - Rp. 3.156.000.000,- Rehabilitasi Bangunan Dan Pintu Air DIR. Ogan Kramasan dan DIR. Lebak Tanjung Seteko (12 Unit; 100 Ha) - Rp.1.231.340.000,- Rehabilitasi Bangunan Dan Pintu Air D.I.R. Sugihan Kiri (25 Unit; 512 Ha) - Rp. 760.200.000,- <p>INPRES 02</p> <ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I./DIR. Kewenangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (94,26 Km; 22.504 Ha) - Rp. 77.308.700.000,- Pembangunan JIAT tahap I (10 km, 50 Ha); Rp. 15.000.000,- <p>Kegiatan OP:</p> <p>OPLAH</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Berkala D.I.R. Pendukung OPLAH (D.I.R. Sugihan Kanan; 107,8 Km; 4.352 Ha) - Rp. 10.001.633.000,- Pemeliharaan Berkala D.I.R. Pendukung OPLAH (D.I.R. Sugihan Kanan; 77,145 Km; 2.688 Ha) - Rp. 7.718.367.000,- 	<p>Kegiatan PIPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Sumatera VIII Paket I (100,26 km; 3.186 Ha) - Rp. Rp. 31.849.682.000 Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Paket II) (49,40 km; 508 Ha) Rp.29.195.833.000 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Tersebar Paket I (35 Km; 350 Ha) Rp. 61.500.000.000 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Tersebar Paket II (25 Km, 250 Ha) Rp. 43.500.000.000 <p>Kegiatan OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier di Kabupaten Musi - Rawas, Kabupaten Lubuk Linggau di Provinsi Sumatera Selatan (D.I. Kelinci Tugumulyo dengan Pagu) - Rp. 1.467.750.000,- Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier di Kabupaten Banyuwasin, Kabupaten Banyuwasin (D.I.R. Sugihan Kiri) dengan Pagu Rp. 1.467.750.000,- 	<p>• Lokasi Terletak di 4 Kabupaten</p> <p>• Pekerjaan Tersebar di 30 D.I./D.I.R</p> <p>• Total Luas OPLAH 22.405 Ha, Dengan Panjang 26,5 Km</p>
		TAHAP III (Inpres 02 Th 2025)
		<p>Kegiatan PIPA:</p> <p>Usulan Kegiatan melalui aplikasi SIPURI di 1 (satu Kabupaten):</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Lahat Rehabilitasi D.I. Batu Surau dengan nilai usulan Rp. 7.587.246.000,- Rehabilitasi jaringan irigasi Utama D.I Air Resam Rp.4.907.229.000,- <p>Kegiatan OP:</p> <p>Usulan Kegiatan melalui aplikasi SIPURI di 1 (satu Kabupaten):</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Empat Lawang: Peningkatan jaringan irigasi tersier D.I Air Betung Besar dengan nilai Pagu Rp. 3.145.000.000,- Peningkatan jaringan irigasi tersier D.I Air Kembahang Rp.1.771.200.000,- Peningkatan jaringan irigasi tersier D.I Ranah Ubar Rp.6.260.400.000,-

Dihaji yang saat ini terkendala penjadwalan ulang. HD berkesempatan menyampaikan hal tersebut saat diskusi langsung dengan Presiden Prabowo pada acara Panen Serentak di 14 Provinsi secara Virtual dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

HD menjadi Gubernur pertama yang mengajukan usulan kepada Presiden demi percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji.

Menurut HD, keberadaan Bendungan Tiga Dihaji yang telah dibangun sejak akhir tahun 2018 tersebut sangat dibutuhkan bagi peningkatan produksi pertanian di Sumsel. Pembangunan ini sedianya akan selesai pada tahun 2023.

“Bendungan ini sangat kami butuhkan karena dengan adanya bendungan ini debit air akan ikut meningkat. Untuk itu kami mohon dengan sangat agar Pak Presiden untuk membantu menyelesaikan

kan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji ini,” tegas Herman Deru.

Lebih jauh, HD mengatakan Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan hadiah bagi Sumsel. Pasalnya saat itu Sumsel menjadi Provinsi ke-5 tertinggi produksi beras nasional dari sebelumnya di peringkat ke-8.

Sementara itu secara umum Presiden Prabowo menanggapi beberapa usulan para Gubernur dan juga petani terkait alat pertanian dan juga irigasi, agar Kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti semua kebutuhan yang dibutuhkan di daerah.

Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaannya kepada para petani. Menurutnya petani merupakan tulang punggung bagi bangsa dan negara. Tanpa petani tidak ada urusan pangan. ●

2 KEMENTERIAN SETUJUI PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG CARAT

Mimpi besar masyarakat Sumatera Selatan memiliki pelabuhan samudera kini selangkah lebih dekat. Dua kementerian setuju pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Sebagai bentuk realisasi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menandatangani Nota Kesepahaman dan Serah Terima Lahan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Banyuasin dengan disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu.

Herman Deru menyebutkan, pelabuhan samudera di Tanjung Carat adalah wujud nyata dari kerja keras dan tekad kolektif pemerintah dan masyarakat.

"Hari ini bukan sekadar seremonial. Ini awal dari perubahan besar bagi ekonomi Sumsel," ujarnya.

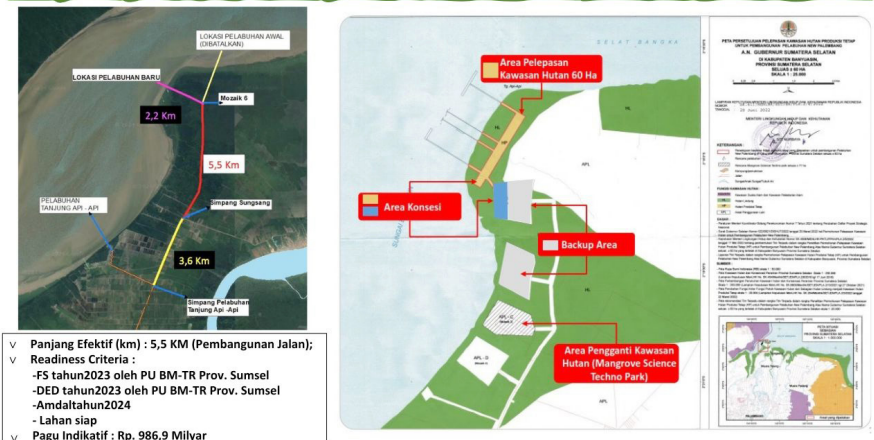
Herman Deru menegaskan, pembangunan pelabuhan tersebut akan memutuskan ketergantungan logistik Sumsel terhadap provinsi lain. Pelabuhan Boom Baru yang selama ini menjadi tumpuan telah lama tidak memadai akibat sedimentasi parah.

"Dulu, provinsi lain seperti Jambi, Lampung, dan Babel sudah punya pelabuhan sendiri. Kini giliran kita membangun kebanggaan baru. Pelabuhan ini bukan hanya infrastruktur, tapi simbol kemajuan Sumatera Selatan," tegas Herman Deru.

Menurutnya, pelabuhan Tanjung Carat akan membawa efek domino besar bagi perekonomian daerah. Selain menurunkan biaya logistik, pelabuhan ini akan membuka peluang ekspor baru, meningkatkan hilirisasi industri, serta menarik investasi strategis.



Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang



"Sumsel punya potensi luar biasa. Dengan pelabuhan ini, hasil perkebunan dan industri kita akan lebih kompetitif. Pertumbuhan ekonomi bisa melekat lebih tinggi," tambahnya.

Herman Deru juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh setiap tahapan pembangunan, baik dalam penyediaan lahan maupun koordinasi lintas sektor agar proyek ini berjalan tepat waktu.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi mengatakan, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan

memperkuat daya saing logistik Indonesia.

"Dengan luas 59,5 hektare, pelabuhan ini akan menjadi simpul utama transportasi laut di kawasan Sumatera bagian selatan," kata Menhub.

Ia berharap, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, daerah, dan investor dapat berjalan solid sehingga pelabuhan bisa beroperasi penuh dalam waktu 3-4 tahun mendatang.

Menhub juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan ekonomi Sumsel. "Kami ingin Sumsel menjadi role model konektivitas logistik di Sumatera. Dengan pelabuhan ini,

target pertumbuhan 8 persen bukan hal mustahil," pungkasnya.

Melalui Perjuangan Panjang

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tantangan ke depan yakni bagaimana menyeimbangkan arus ekonomi yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa agar mengalir juga ke luar pulau, terutama Sumatera khususnya Sumatera Selatan. Untuk itu butuh dukungan dunia usaha terhadap infrastruktur strategis, salah satunya Pelabuhan Tanjung Carat yang menjadi proyek prioritas nasional.

Guna merealisasikan hal itu, Wakil Gubernur HCik Ujang bahkan menemui langsung Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) Todotua Pasaribu.

Todotua Pasaribu menyatakan komitmen pihaknya untuk berperan aktif dalam mendukung koordinasi lintas kementerian guna memastikan pembangunan pelabuhan strategis yang dapat mendukung upaya hilirisasi di Provinsi Sumsel

"Kementerian investasi dan hilirisasi mendukung penuh dan memastikan koordinasi lintas kementerian, untuk suksesnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat," katanya.

Wamen berharap pelabuhan dan kawasan Tanjung Carat kedepannya jadi pusat distribusi logistik dan infrastruktur konektivitas yang berperan penting dalam memperkuat integrasi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Pelabuhan ini nantinya direncanakan sebagai motor penggerak ekspor sumber daya alam dari Sumatera Selatan, sekaligus berfungsi sebagai katalis bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)," tambahnya.

Tinggal Menunggu Eksekusi Pelaksanaan

Upaya Pemprov Sumsel mempercepat terwujudnya pembangunan pelabuhan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin sebetulnya hanya tinggal eksekusi saja setelah ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan Tanjung Carat untuk Pelabuhan New Port Tanjung Carat oleh Menteri Kehutanan dan Ling-



MASUK DOA KHUSUS TOKOH LINTAS AGAMA

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi salah satu infrastruktur yang paling ditunggu masyarakat Sumatera Selatan karena diyakini mampu meningkatkan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan.

Pentingnya pelabuhan ini, membuat Gubernur Herman Deru meminta tokoh lintas agama untuk memanjatkan doa khusus agar berbagai Proyek Strategis Nasional di Sumsel, salah satunya Pelabuhan Tanjung Carat dapat segera terwujud.

Pelabuhan ini diyakini akan menjadi pintu ekspor baru dan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga Sumsel tetap damai, rukun, dan kondusif," ujar Herman Deru saat acara doa bersama bagi keselamatan bangsa dari seluruh tokoh lintas Agama yang digelar Kementerian Agama Sumsel yang dihadiri Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.

Gubernur Herman Deru menekankan doa bersama ini bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan wujud komitmen untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Menurutnya, Sumsel yang telah mendapatkan predikat Zero Konflik merupakan bukti nyata keharmonisan masyarakat yang selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.

"Semoga doa malam ini menjadi kekuatan agar semua rencana besar itu dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Sementara Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Sumsel di tingkat pusat, termasuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

"Apa yang disampaikan Gubernur sudah saya catat. InsyaAllah akan kita kawal dan perjuangkan," tegasnya. ●

kungan Hidup (KLH) Republik Indonesia (RI) Siti Nurbaya tahun 2024 lalu

Dimana Menteri LHK sudah menyetujui dan mengeluarkan SK untuk Pelepasan Kawasan Hutan di Tanjung Carat seluas 59, 95 hektar yang ditujukan untuk pembangunan pelabuhan new port Tanjung Carat di Palembang.

Dengan ditandatanganinya SK pelepasan kawasan hutan seluas 59, 95 hektar tersebut akan menjadi modal bagi pemerintah Sumsel untuk melanjutkan rencana percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat setelah sekian lama terhambat karena kendala status lahan. ●ADV



DORONG PRODUK LOKAL TEMBUS PASAR GLOBAL

Semangat pelestarian dan inovasi produk lokal kembali digaungkan melalui Festival Rempah Sumsel 2025 di halaman PTC Mall Palembang. Acara ini menjadi ajang tahunan yang dipelopori TP PKK Sumsel dengan dukungan penuh pemerintah provinsi.

Ketua TP PKK Sumsel, Feby Deru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa festival ini merupakan bentuk nyata sinergi antara PKK, pemerintah, dan masyarakat dalam mengangkat potensi rempah daerah. Ia menyebut, kegiatan ini telah menjadi agenda tetap sejak beberapa tahun terakhir dan selalu menampilkan inovasi baru.

"Festival ini melibatkan seluruh TP PKK kabupaten/kota, organisasi wanita, OPD, ICSB, serta UMKM dari seluruh Sumsel. Kami ingin membuktikan bahwa produk rempah dan turunannya mampu bersaing di pasar global," ungkap Feby.

Selama tiga hari penyelenggaraan, festival ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pameran rempah, bazar produk lokal, lomba memasak, hingga fashion show ber-

tema Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Kegiatan tersebut menjadi ajang promosi sekaligus edukasi bagi masyarakat.

Gubernur Herman Deru dalam kesempatan itu mengapresiasi peran aktif TP PKK Sumsel yang konsisten dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Menurutnya, rempah bukan hanya warisan budaya, melainkan juga potensi ekonomi yang harus diolah secara modern dan berkelanjutan.

"Leluhur kita sudah mengajarkan cara mengolah rempah menjadi jamu atau bumbu khas. Sekarang, tugas kita melakukan riset agar muncul varian baru yang bisa masuk ke industri besar," ujar Deru.

Ia juga menyinggung pentingnya pengolahan produk secara hilir agar bernilai tambah. "Kita jangan berhenti di bahan mentah. Rempah harus diolah

agar punya nilai ekonomi lebih tinggi dan membuka lapangan kerja baru," imbuhnya.

Dalam festival kali ini, panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba di berbagai kategori, mulai dari 10 program pokok PKK hingga inovasi Galeri Pelangi. Desa-desa dan kecamatan terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sumsel mendapatkan apresiasi atas kreativitas dan kontribusinya.

Feby Deru berharap dukungan pemerintah kabupaten/kota terus mengalir untuk membantu PKK dalam pemasaran hasil rempah. "Kalau kita sinergi, produk lokal Sumsel bukan hanya dikenal di nasional, tapi juga bisa menembus pasar ekspor," katanya optimistis.

Festival Rempah Sumsel 2025 juga menjadi ajang silaturahmi antar organisasi wanita dan pelaku UMKM. Kegiatan ini memperlihatkan kekua-

tan kolaborasi dalam memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi keluarga di seluruh Sumsel.

Dengan antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta dan masyarakat, Feby Deru berharap kegiatan ini menjadi inspirasi untuk terus mencintai, melestarikan, dan memanfaatkan kekayaan alam Sumatera Selatan secara berkelanjutan.

Majukan UMKM Perempuan Lewat Wastra Daerah

Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan kembali ditegaskan oleh Ketua BKOW Sumatera Selatan, Lidyawati Cik Ujang, dalam peringatan HUT ke-4 Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PP UMI).

Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah dalam membangkitkan sektor ekonomi berbasis lokal.

Dalam sambutannya, Lidyawati mengapresiasi kiprah PP UMI yang dinilai konsisten dalam mendorong lahirnya perempuan-perempuan tangguh di bidang usaha dan pelestarian wastra Sumsel.

"Tema 'Cinta Wastra Cinta Sumatera Selatan' menjadi pengingat bahwa cinta terhadap budaya daerah juga bisa menjadi kekuatan ekonomi," ungkapnya.

Ia menambahkan, BKOW Sumsel siap mendukung gerakan kolaboratif dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk UMKM.

"Perempuan bukan sekadar pelaku usaha, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengangkat citra daerah melalui produk lokal," ujar Lidyawati.

Di sisi lain, Ketua DPW PP UMI Sumsel Rety Septika menjelaskan, sejak berdiri pada 2021, PP UMI berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro agar naik kelas dan siap bersaing di pasar digital.

Menurut Rety, mayoritas UMKM dikelola oleh perempuan, namun banyak di antara mereka belum memiliki akses informasi dan jejaring usaha yang memadai. PP UMI hadir

untuk menjembatani kebutuhan itu.

"Organisasi kami berperan sebagai wadah yang menumbuhkan semangat kolaborasi dan solidaritas di antara pengusaha perempuan," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengembangan UMKM. "Kita dorong pelaku UMKM agar terbiasa bertransaksi secara dig-

ital dan memanfaatkan platform daring," imbuhnya.

Acara HUT ke-4 PP UMI juga menampilkan fashion show wastra Sumsel, memperlihatkan keindahan kain tradisional karya desainer dan perajin lokal. Gelaran ini menjadi simbol sinergi antara pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi perempuan. •ADV



Gubernur Herman Deru Buka Retret Laskar Pandu Satria Jilid II 2025 TEKANKAN PEMBENTUKAN KARAKTER DAN KESIAPAN PEMUDA SAMBUT BONUS DEMOGRAFI

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru membuka secara resmi Retret Laskar Pandu Satria (LPS) Jilid II Tahun 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang, Kamis (6/11/2025). Pada kesempatan tersebut, Gubernur bertindak sebagai Inspektur Upacara Pembukaan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumsel ini diikuti oleh 100 peserta dari SMA dan SMK perwakilan 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Para peserta merupakan

siswa yang terdaftar dalam program bimbingan konseling di sekolah masing-masing dan telah melalui proses seleksi.

Pembukaan berlangsung khidmat dengan suasana upacara yang tertib dan penuh semangat. Dalam

amanatnya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian penting dari pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda Sumsel.

"Alhamdulillah, kita dapat kembali melaksanakan kegiatan ini. Artinya, pelaksanaan pada jilid pertama memberi manfaat dan dampak positif bagi peserta sebelumnya," ujar Herman Deru.

Menurut Gubernur, pelatihan dan pembinaan melalui Retret LPS menjadi jawaban atas kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah dinamika perkembangan zaman. Kegiatan ini juga menggandeng unsur TNI dan Polri untuk memberikan pembinaan fisik dan kedisiplinan secara langsung.

"Retret ini kita laksanakan karena kebutuhan. Di sini peserta mendapat pembinaan karakter, disiplin, dan semangat kepemimpinan. Mereka adalah pemuda-pemudi terpilih yang akan menjadi generasi penerus Sumsel," jelasnya.

Lebih jauh, Gubernur menekankan pentingnya mempersiapkan pemuda menghadapi bonus demografi 2045, ketika Indonesia diproyeksikan memiliki sekitar 67 persen penduduk usia produktif.

"Pada 2045 nanti, kalianlah yang menerima estafet kepemimpinan bangsa. Bukan hanya dari segi jumlah, tapi kualitas. Pemuda Sumsel harus siap bersaing," kata Herman Deru.



la menyebutkan bahwa keunggulan SDM akan menjadi kunci kemajuan suatu daerah. Karena itu, penanaman karakter, wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi harus digalakkan sejak dini.

"Saya optimis, pemuda Sumsel

tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelopor kemajuan," ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi peserta Retret LPS Jilid I yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif di sekolah dan lingkungannya. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata efektivitas program.

"Senior kalian berhasil menjadi contoh di lingkungannya. Ini bukti bahwa pembinaan yang benar akan menghasilkan karakter yang kuat," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga berpesan agar para instruktur dan pembimbing menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan kesabaran.

"Saya berharap nilai keikhlasan, disiplin, dan pantang menyerah benar-benar ditanamkan kepada para peserta. Mereka harus siap menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks," pesannya.

Retret Laskar Pandu Satria Jilid II digelar selama 10 hari, mulai 5 hingga 14 November 2025. Kegiatan meliputi pembinaan fisik, mental, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga pembekalan spiritual.

Sementara itu, Ketua Satgas Retret LPS sekaligus Kepala Dispora Sumsel dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini bertujuan menumbuhkan pribadi pemuda yang berkarakter kuat, berjiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan.

Turut hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr. Haryo Sughiartono, Ketua Kwarda Pramuka Sumsel H. Riza Fahlevi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. •ADV



HARUS INOVATIF DAN MELEK DIGITAL

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bertransformasi menjadi inovatif, melek digital, dan adaptif terhadap dinamika zaman agar pelayanan pemerintah mengalami peningkatan.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang mengatakan ASN merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kemampuan adaptif dan digitalisasi menjadi ke-

tegas Wagub saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 di BPSDMD Sumsel.

Ia menilai pelatihan kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan ASN berkompentensi tinggi dan siap menghadapi tantangan global. Pemerintah daerah, lan-

garaan pelatihan, serta BPSDMD Sumsel yang konsisten melahirkan pemimpin berkualitas. Ia berharap para alumni dapat menjadi motor perubahan di lingkup kerja masing-masing.

"Teruslah belajar dan beradaptasi. Dunia berubah cepat, dan ASN harus siap menjadi agen perubahan yang berorientasi hasil," ujarnya.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI, Dr. Tr. Erna Irawati, menyampaikan bahwa peserta telah dibekali empat kompetensi utama, termasuk kemampuan mengelola perubahan. Menurutnya, kompetensi ini menjadi bekal penting menghadapi era digitalisasi birokrasi.



"Pemimpin harus mampu mengelola tim dan teknologi sekaligus. Adaptasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban," tegas Erna.

Selain itu, ia menekankan pentingnya personal branding dan komunikasi publik. ASN, khususnya pejabat struktural, harus mampu membangun citra positif dan kredibel di media sosial maupun lingkungan kerja.

"Bangun kepercayaan publik dengan komunikasi yang terbuka, profesional, dan transparan," tambahnya.

Kepala BPSDMD Sumsel, Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung sejak 7 Juli hingga 28 Oktober 2025 dan diikuti 28 peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel serta satu peserta dari Provinsi Jambi. ●

harusan.

"ASN harus mampu membaca perubahan, berinovasi dalam pelayanan serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja,"

jutnya, memerlukan pemimpin muda yang tangguh, kreatif, dan mampu berpikir strategis.

Cik Ujang juga mengapresiasi LAN RI atas sinergi dalam penyeleng-

DORONG UMKM JADI PENGGERAK EKONOMI DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan strategis. Dukungan itu mencakup kemudahan perizinan dan legalitas usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lembaga keuangan daerah.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga terus mendorong transformasi digital dan ekspor produk unggulan daerah, agar UMKM lokal dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Wagub Cik Ujang menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

“Di Sumatera Selatan, sektor UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, tetapi juga ruang tumbuh bagi kreativitas dan inovasi anak bangsa,” ujarnya saat membuka kegiatan Small Medium Enterprises Exhibition (SMEXPO) 2025 yang digelar oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

Dikatakan Cik Ujang, keberhasilan membangun sektor UMKM tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, BUMN, dan masyarakat.

“Karena itu, kami sangat mengapresiasi langkah Pertamina yang konsisten mendukung pengembangan UMKM melalui kegiatan seperti SMEXPO ini,” tambahnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Dwi, menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu dari delapan regional bisnis hilir Pertamina yang tak hanya fokus pada energi, tetapi juga berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

“Tahun 2025 ini, kami memiliki sekitar 7.000 mitra binaan UMKM di wilayah Sumbagsel. Pertamina tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mem-

fasilitasi mereka untuk berpartisipasi dalam pameran tingkat nasional dan internasional,” jelasnya.

Ajak BUMN Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Wagub Cik Ujang menegaskan

dan apresiasinya terhadap kehadiran BUMN yang selama ini berkontribusi besar bagi Sumsel. Menurutnya, keberadaan BUMN menjadi motor penggerak pembangunan daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi ekonomi lokal.



pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Wagub menyampaikan rasa bangga

“Saya sangat bangga dengan BUMN yang beroperasi di Sumsel, seperti PT Bukit Asam, Pusri, Pertamina, dan Semen Baturaja. Mereka bukan hanya berbisnis, tetapi juga membantu daerah berkembang,” kata Cik Ujang. ●



7 KABUPATEN/KOTA DI JATIM NAIKKAN UMK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tujuh daerah mulai 2025.

Kenaikan ini akan mulai berlaku efektif pada November hingga Desember 2025, sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang memerintahkan Pemprov Jatim melakukan penetapan ulang upah minimum di beberapa wilayah.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.

Penetapan baru ini menandai langkah tegas Pemprov Jatim dalam memastikan perlindungan upah bagi pekerja, sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi nasional.

Tujuh Daerah Alami Kenaikan UMK

Dalam keterangan resminya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyam-

paikan bahwa keputusan kenaikan UMK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator utama, seperti kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, serta masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi.

"Penyesuaian ini kami tetapkan secara hati-hati agar mampu melindungi pekerja tanpa mengganggu keberlanjutan usaha," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Kota Surabaya kembali menempati posisi tertinggi dengan UMK Rp 5.032.635, mencerminkan peran strategis kota ini sebagai pusat perekonomian, perdagangan, dan industri di Jawa Timur.

Sementara itu, Kabupaten Situbondo tercatat memiliki UMK terendah, yaitu Rp 2.335.209, yang mencerminkan karakteristik ekonomi daerah berbasis agraris dan biaya hidup yang relatif rendah.

Daftar Lengkap UMK Jawa Timur Tahun 2025

Berdasarkan pengumuman resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (@naker_jatim), berikut daftar lengkap UMK di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2025:

- Kota Surabaya 5.032.635
- Kabupaten Gresik 4.943.763
- Kabupaten Sidoarjo 4.940.090
- Kabupaten Pasuruan 4.936.417
- Kabupaten Mojokerto 4.925.398
- Kabupaten Malang 3.587.213
- Kota Malang 3.524.238
- Kota Batu 3.360.466
- Kota Pasuruan 3.368.557
- Kabupaten Jombang 3.137.004
- Kabupaten Tuban 3.050.400
- Kota Mojokerto 3.081.000
- Kabupaten Lamongan 3.012.164
- Kabupaten Probolinggo 2.888.407



- Kota Probolinggo 2.876.657
- Kabupaten Jember 2.838.642
- Kabupaten Banyuwangi 2.810.139
- Kota Kediri 2.572.361
- Kabupaten Bojonegoro 2.525.132
- Kabupaten Kediri 2.492.811
- Kota Blitar 2.481.450
- Kabupaten Tulungagung 2.470.800
- Kabupaten Lumajang 2.429.764
- Kota Madiun 2.422.105
- Kabupaten Blitar 2.413.974
- Kabupaten Magetan 2.406.719
- Kabupaten Sumenep 2.406.551
- Kabupaten Nganjuk 2.405.255
- Kabupaten Ponorogo 2.402.959
- Kabupaten Madiun 2.400.321
- Kabupaten Ngawi 2.397.928
- Kabupaten Bangkalan 2.397.550
- Kabupaten Trenggalek 2.378.784
- Kabupaten Pamekasan 2.376.634
- Kabupaten Pacitan 2.364.287
- Kabupaten Bondowoso 2.347.359
- Kabupaten Sampang 2.335.661
- Kabupaten Situbondo 2.335.209

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo menegaskan bahwa seluruh pengusaha di wilayah Jawa Timur wajib menaati penetapan UMK terbaru ini.

“Tidak ada alasan untuk menunda atau menolak pelaksanaan UMK. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat, dan pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Himawan.

la menambahkan, Pemprov juga membuka kanal aduan bagi pekerja yang mengalami pelanggaran upah, baik melalui dinas tenaga kerja kabupaten/kota maupun secara daring melalui sistem disnakerjatim.go.id.

Kenaikan UMK ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat pekerja sekaligus menjaga daya saing industri di Jawa Timur. Pemerintah menegaskan bahwa upah layak merupakan bagian dari strategi pembangunan berkeadilan sosial.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merevisi besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di tujuh daerah.

Wakil Sekretaris FSPMI Jawa Timur, Nurudin Hidayat mengatakan bahwa

pihaknya bersyukur atas perubahan keputusan tersebut karena menjadi langkah awal untuk penetapan upah yang lebih adil di tahun berikutnya.

“Kami menyambut baik revisi keputusan Gubernur Jatim. Walau hanya berlaku mulai November hingga Desember 2025, namun penting karena nilai UMK yang baru akan menjadi dasar

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan UMK seharusnya sebesar 6,5 persen, namun pada praktiknya, tujuh daerah di Jawa Timur hanya mengalami kenaikan seki-



penghitungan UMK 2026. Dengan begitu, basis pengalinya sudah lebih besar dari keputusan sebelumnya,” ujar Nurudin.

Menurut Nurudin, revisi itu dilakukan karena sebelumnya terdapat ketidaksesuaian antara penetapan UMK 2025

tar 5 persen.

“Beberapa daerah seperti Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto hanya mendapat kenaikan 5 persen. Padahal jika mengacu pada Permenaker, seharusnya bisa lebih tinggi,” jelasnya. ●

Berikut rincian kenaikan UMK di tujuh daerah tersebut:

Daerah	UMK 2024 (Rp)	UMK 2025 (Rp)	Kenaikan (%)
Kota Surabaya	4.961.753	5.032.635	+1,43%
Kabupaten Sidoarjo	4.870.511	4.940.090	+1,43%
Kabupaten Gresik	4.874.133	4.943.763	+1,43%
Kabupaten Pasuruan	4.866.890	4.936.417	+1,43%
Kabupaten Mojokerto	4.856.026	4.925.398	+1,43%
Kabupaten Malang	3.553.530	3.587.213	+0,95%
Kota Malang	3.507.693	3.524.238	+0,47%

AQUA AIR PEGUNUNGAN KDM KLAIM AIR SUMUR BOR

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dibuat terkejut saat mengetahui sumber air mineral bermerek Aqua ternyata berasal dari sumur dalam hasil pengeboran, bukan mata air pegunungan seperti yang selama ini diyakini publik.

Temuan itu diungkap Dedi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat, Kamis 23 Oktober 2025. Sidak tersebut awalnya dilakukan untuk meninjau aktivitas kendaraan besar milik perusahaan yang dinilai mempercepat kerusakan jalan akibat kelebihan kapasitas muatan.

Namun, di luar dugaan, Dedi justru mendapati fakta mengejutkan tentang sumber air yang digunakan perusahaan tersebut.

"Ini ngambil airnya dibor? Nggak akan ngefek sama pergeseran tanah?" tanya Dedi dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya.

Menurut pengakuannya, ia semula mengira air Aqua berasal dari mata air alami di permukaan pegunungan, bukan dari air tanah hasil pengeboran.

"Saya pikir airnya air permukaan, seperti air sungai atau mata air. Tapi ternyata

ini air dari sumur pompa dalam," ujarnya.

Pihak Aqua yang mendampingi kunjungan Dedi menjelaskan bahwa setiap titik sumber memiliki kedalaman berbeda. Di lokasi yang dikunjungi, sumur berada di kedalaman 132 meter dan 102 meter, sementara titik sumber lain berkisar 60 meter.

"Saya baru tahu, ternyata airnya dari sumur dalam. Padahal selama ini masyarakat mengenal Aqua sebagai air pegunungan," tambah Dedi.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi pergeseran tanah akibat pengeboran, pihak Aqua menyebut bahwa hingga kini belum pernah menerima keluhan dari warga sekitar. Mereka juga menegaskan bahwa operasi perusahaan dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami bekerja sama dengan UGM untuk studi hidrogeologi. Posisi air kami berada di bawah lapisan sumber

PDAM Subang, sehingga tidak memengaruhi air permukaan," jelas perwakilan Aqua.

Meski demikian, Dedi tetap menyoroti aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk risiko longsor di kawasan pegunungan akibat pembukaan lahan dan eksploitasi sumber air.

"Saya tidak menuduh, tapi ini perlu dipikirkan dan diteliti lebih dalam. Jangan sampai eksploitasi air tanah berdampak ke alam," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar perusahaan pengelola air tidak bermain-main dengan perizinan.

"Sekarang saya pastikan cuma dua titik sumber resmi. Jangan sampai ada perusahaan yang ngaku satu titik, padahal pasangannya lima," ucapnya.

Dalam pernyataan resminya, Aqua menjelaskan bahwa sumber air mereka berasal dari akuifer dalam di pegunungan vulkanik, dengan kedalaman antara 60 hingga 140 meter. Air terse-



but, kata Aqua, terlindung dari aktivitas manusia karena memiliki lapisan batuan alami sebagai pelindung.

"Lapisan akuifer berfungsi menyaring air secara alami. Air dari kedalaman ini juga terhindar dari limbah manusia, sehingga tetap murni dan aman untuk dikonsumsi," jelas keterangan resmi Aqua.

Sebelum digunakan, setiap sumber air dikaji minimal selama satu tahun dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk geologi dan kimia lingkungan.

Pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Lambok M. Hutasoit, menanggapi perdebatan soal istilah "air pegunungan" yang mencuat di publik.

Menurutnya, istilah tersebut tidak selalu berarti air yang diambil langsung dari mata air di permukaan tanah.

"Air pegunungan berasal dari sistem akuifer di kawasan gunung. Air hujan meresap ke tanah, tersimpan di lapisan batuan, lalu mengalir secara alami. Inilah yang disebut air pegunungan," jelasnya (24/10/2025).

Ia menambahkan, alasan industri air minum dalam kemasan (AMDK) memilih sumber di daerah pegunungan adalah karena kualitas airnya lebih stabil dan terjamin.

"Tidak semua air tanah layak minum.

Ada yang mengandung mineral berbahaya seperti Kromium VI yang toksik, sehingga setiap sumber harus diuji secara kimiawi," tegas Lambok.

Sementara, Guru Besar Teknologi Geologi UGM Prof. Dr. Ir. Heru Hendrayana, menjelaskan bahwa air tanah dalam tersimpan di lapisan batuan berpori (akuifer) dengan kedalaman hing-

hanya 60–100 hari, jadi air tersebut umumnya steril secara biologis," imbuh Heru.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya pengujian kandungan kimia dan proses sterilisasi tambahan menggunakan teknologi ultraviolet sebelum air dipasarkan.

Peneliti Pusat Riset Limnologi dan



ga lebih dari 200 meter.

"Air dari akuifer dalam ini terlindungi dari aktivitas manusia di permukaan, sehingga kualitasnya lebih baik dan stabil," ujarnya.

Menurutnya, mikroorganisme seperti bakteri dan virus tidak mampu bertahan di lingkungan sedalam itu.

"Umur hidupnya di dalam batuan

Sumber Daya Air BRIN Rachmat Fajar Lubis, juga menilai air dari sumur dalam sebagai sumber paling murni karena berada di lapisan yang tidak tersentuh aktivitas manusia maupun hewan.

"Pada kedalaman tersebut tidak ada mikroorganisme hidup. Airnya murni dan hanya mengandung mineral alami dari batuan," jelas Rachmat. •



602 RIBU WARGA TERLIBAT JUDI ONLINE, PEMPROV DKI JAKARTA PERKUAT SINERGI DENGAN KEJAGUNG

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menindaklanjuti temuan mengejutkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait maraknya praktik judi online di Ibu Kota.

Berdasarkan hasil analisis, tercatat 602.419 warga Jakarta terlibat dalam aktivitas perjudian daring sepanjang tahun 2024, dengan total transaksi fantastis mencapai Rp 3,12 triliun.

"PPATK menemukan 602.419 warga DKI Jakarta yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten administratif terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024. Jumlah transaksi deposit yang tercatat mencapai Rp 3,12 triliun, dengan lebih dari 17,5 juta kali transaksi," ujar Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, Sabtu 25 Oktober 2025.

Ivan menambahkan, dari total terse-

aktivitas ilegal.

"Dari kelompok penerima bansos itu, nilai transaksi judi online mencapai Rp 67 miliar dengan total 397 ribu kali transaksi selama 2024," jelas Ivan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi fenomena ini. Penertiban akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga keuangan, hingga kementerian terkait.

"Kami sudah menerima data lengkap dari PPATK terkait aktivitas judi online di Jakarta. Pemerintah daerah akan



but, sekitar 15.033 orang ternyata merupakan penerima bantuan sosial (bansos). Fakta ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar, justru disalahgunakan untuk

segera melakukan langkah penertiban dan pencegahan agar praktik ini tidak semakin meluas," ujar Pramono di sela kunjungannya ke Grogol, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

Upaya pemberantasan judi online

ini juga diperkuat melalui kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Kolaborasi tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni penegakan hukum terhadap pelaku dan peningkatan edukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam aktivitas perjudian digital.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, fenomena judi online

sosial.

"Kita sedang menghadapi shock culture besar-besaran akibat derasnya arus digitalisasi. Judi online bukan sekadar persoalan moral, tetapi persoalan akses dan pengawasan. Jalur untuk bermain terlalu banyak, sehingga kita harus bergerak bersama untuk menutup celah itu," tegas Rano.

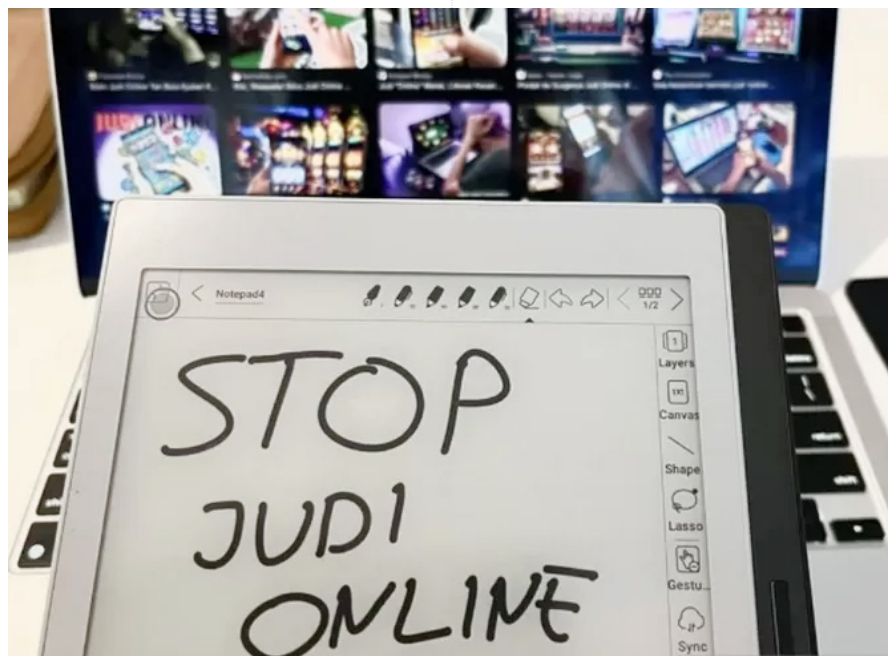
Rano menambahkan, Pemprov DKI akan memperkuat sinergi dengan

Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan BPJS Kesehatan, agar manfaatnya tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah dari bansos benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada yang diselewengkan untuk judi online," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menegaskan bahwa judi online tidak bisa dipandang sebagai sekadar permainan hiburan, melainkan jebakan digital yang menjerumuskan banyak orang dan merusak struktur sosial-ekonomi masyarakat.

"Data kami menunjukkan hampir 98 persen pelaku judi online adalah laki-laki berusia antara 28 hingga 50 tahun. Mereka bukan hanya kehilangan uang,



menjadi tantangan besar di era digital yang tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Ia menilai, kemudahan akses teknologi telah membuat masyarakat mudah terpapar, terutama kelompok usia produktif dan penerima bantuan

aparat penegak hukum, perbankan, dan lembaga sosial guna memastikan masyarakat tidak menyalahgunakan bantuan sosial untuk berjudi.

Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program seperti Kartu

Langkah Konkret Pemprov DKI

Selain koordinasi lintas lembaga, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain:

- ▶ Membentuk satuan tugas (satgas) khusus pengawasan dan pelaporan aktivitas judi online di wilayah Jakarta.
- ▶ Menggelar kampanye edukasi digital di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi DKI.
- ▶ Memperkuat literasi finansial bagi penerima bansos agar mereka lebih bijak mengelola bantuan yang diterima.
- ▶ Mendorong penutupan akses situs dan aplikasi ilegal melalui kerja sama dengan Kementerian Kominfo.

tapi juga pekerjaan, kepercayaan keluarga, bahkan masa depan," tegas Asep.

Menurutnya, Kejaksaan Agung kini mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus judi online, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kami tidak hanya fokus menindak, tetapi juga melakukan pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif menjadi kunci agar para pelaku tidak kembali terjerat di kemudian hari," jelasnya. ●

FLY OVER SITINJAU LAUIK TERUS DIKEBUT PEMBEBASAN LAHAN SEGERA RAMPUNG

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik yang menjadi jalur utama penghubung Padang–Solok terus berjalan sesuai rencana, meskipun proses pembebasan lahan masih berlangsung.

Proyek strategis nasional dengan nilai investasi Rp2,8 triliun ini ditargetkan tetap sesuai jadwal dan tidak mengalami penundaan berarti.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat meninjau langsung lokasi pembangunan bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruk-

“Untuk pembebasan lahan, Alhamdulillah, semua pihak sangat mendukung. Masyarakat, camat, lurah, hingga walinagari berkolaborasi aktif agar proyek ini berjalan lancar,” ujarnya.

Pemerintah daerah saat ini, lanjut Mahyeldi, tengah menyinkronkan seluruh data dan dokumen perizinan lahan sesuai dengan ketentuan dari Kement-

berita bahwa pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN untuk mempercepat proses administrasi lahan yang sempat mengalami keterlambatan.

“Idealnya, perizinan sudah rampung pada awal Oktober, tapi ada sedikit penyesuaian di lapangan. Semoga koordinasi ini mempercepat proses dan pembangunan fisik bisa segera dimu-



tur dan Wilayah (Infraswil), Muhammad Rachmat Kaimuddin, pada Senin 27 Oktober 2025.

Mahyeldi menyampaikan, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperlancar tahapan proyek yang sudah lama dinantikan warga Sumbar itu.

terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sekarang data-data perizinan lahan sedang kami sesuaikan dengan persyaratan dari ATR/BPN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua bisa selesai,” tambahnya.

Mahyeldi juga mengungkapkan

lai,” kata Gubernur.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau dan mengawal proyek tersebut agar tidak terhambat oleh persoalan teknis.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak BPN, tokoh adat, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah. Saat ini fokus utama adalah percepatan perizinan lahan agar tidak menunda pelaksanaan konstruksi," jelasnya.

Begitu seluruh izin rampung, kata Rachmat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mengerahkan tim untuk memulai pembangunan fisik di lapangan.

"Harapan kami, begitu izin selesai, rekan-rekan dari PU bisa langsung bekerja di lapangan tanpa hambatan," ujarnya.

Fly Over Sitinjau Lauik Panorama ini dirancang membentang sepanjang 2,8 kilometer, terdiri dari tiga jembatan utama. Jembatan 1 sepanjang 152 meter, Jembatan 2 sepanjang 120 meter, dan Jembatan 3 sepanjang 100 meter.

Selain anggaran utama Rp2,8 triliun, pemerintah juga menyiapkan Rp562 miliar untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Proyek ini memerlukan total lahan seluas 18,7 hektare dengan 8,6 hektare di antaranya berstatus hutan lindung, sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi dan penanganan khusus terkait izin lingkungan.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Mahyeldi optimistis proyek ini akan menjadi tonggak baru infrastruktur di Sumatera Barat.

"Kita ingin Sitinjau Lauik tidak lagi dikenal sebagai jalur rawan dan menakutkan, melainkan menjadi jalur modern, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan," tegasnya.

Peninjauan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Balai BPJN Sumbar Elsa Putra Friandy, Plt. Kadis BMKTCT Dedi Rinaldi, Kadis Perkimtan Ahdiarsyah, serta Kabiro ADPEM Setda Provinsi Sumbar Ria Wijayanti.

Pemerintah daerah berharap pembangunan fly over ini tidak hanya memperlancar mobilitas antarwilayah, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan Sumatera Barat bagian tengah.

PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) yang dibentuk oleh Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menyebut, konstruksi jembatan layang

atau Flyover Sitinjau Lauik di Lubuk Paraku, Kota Padang, Sumatera Barat, akan segera dimulai.

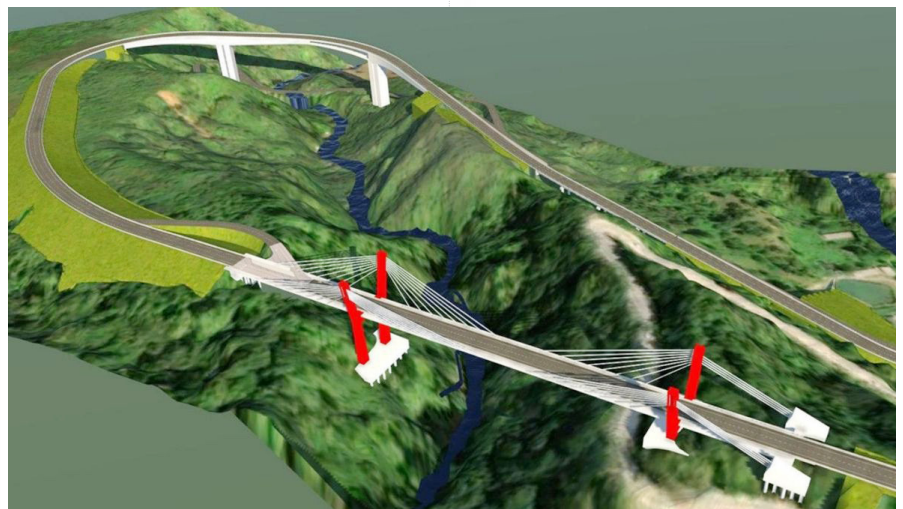
Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik Michael A.P. Rumenser mengatakan, saat ini rencana konstruksi flyover itu masih dalam tahap persiapan.

Beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan, antara lain perbaikan jalan sudah ada, pembebasan tanah untuk proyek, penyelesaian gambar desain dan pembangunan kantor sementara

juga akan diatur secara optimal agar tidak menimbulkan kepadatan di jalur eksisting selama masa konstruksi.

"Sebelum dimulai pekerjaan, sosialisasi melalui beberapa media akan kami gencarkan, sehingga kami mengimbau agar pengguna jalan dapat berhati-hati saat melalui Sitinjau Lauik selama masa pekerjaan," tuturnya.

Menurut Michael, alasan dibangunnya Flyover Sitinjau Lauik dikarenakan sering terjadi kecelakaan di kawasan



di lokasi proyek.

"Kami juga sudah mulai melakukan uji coba pembuatan fondasi untuk jembatan 3 dan 4. Ini adalah langkah penting di awal proyek untuk memastikan bangunan flyover nantinya kuat dan pembangunan berjalan lancar," ucap Michael.

Dia menambahkan, lantaran sebagian pekerjaan konstruksi dilakukan pada wilayah umum, maka selama masa konstruksi, rekayasa lalu lintas

tersebut.

Karena itu, dia berharap, adanya pembangunan flyover itu bisa mengurangi atau menghilangkan potensi kecelakaan sekaligus memperlancar arus lalu lintas.

"Flyover Sitinjau Lauik I dibangun untuk mengatasi kecelakaan yang sering terjadi di jalan ini. Diharapkan, proyek ini dapat membuat perjalanan lebih aman dan lancar serta membantu perekonomian daerah," pungkasnya. ●

6 PROGRAM BESAR UNTUK KALTIM EMAS

Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Timur pada 20 Februari 2025, Rudy Mas'ud langsung menunjukkan kiprahnya sebagai pemimpin dengan visi kuat dan langkah cepat.

Dalam waktu singkat, ia berhasil merealisasikan berbagai program unggulan yang dulu dijanjikannya saat kampanye, menandai babak baru pembangunan Kaltim menuju masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera.

Mengusung semangat "Membangun Generasi Emas", Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur Seno Aji meluncurkan enam program besar yang disebut "Gratis Pol" sebuah paket kebijakan pro-rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, dari pendidikan hingga spiritualitas.

Gubernur Harum menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar janji politik, melainkan implementasi nyata dari komitmen kampanye Rudy-Seno yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

gram Gratis Pol bukan hanya deretan kebijakan populis, melainkan simbol kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya bahwa pemerintah bisa hadir, berpihak, dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan visi yang terarah dan realisasi yang cepat, Kalimantan Timur kini menatap masa depan dengan optimisme baru menuju Kaltim Emas yang bebas kebodohan, bebas kemiskinan, dan penuh harapan.

Keenam program tersebut yakni :

1. Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Pemprov Kaltim memastikan tidak ada lagi anak daerah yang gagal melanjutkan pendidikan karena kendala biaya. Melalui kerja sama dengan 53 perguruan tinggi, program ini men-

secara penuh mulai tahun anggaran 2026. Program unggulan Pemprov Kaltim ini memastikan seluruh mahasiswa di universitas negeri maupun swasta di wilayah Kaltim tidak lagi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), mulai dari semester pertama hingga semester delapan.

Menurutnya, Gratis Pol telah resmi dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu program prioritas dalam visi-misi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang unggul dan berdaya saing.

"Program Gratispol sudah kami tetapkan di RPJMD. Tahun 2025 ini kita mulai dengan membantu mahasiswa semester 1 di 52 perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun mulai 2026, seluruh mahasiswa dari semester 1 hingga 8 akan dibebaskan dari pembayaran UKT," jelas Seno Aji.

Seno menambahkan, bantuan pendidikan tahun ini memang baru menjangkau mahasiswa semester awal. Namun, mulai tahun depan cakupannya akan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh mahasiswa asal Kaltim.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan lebih selektif memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berkuliah di luar provinsi. Hanya dua bidang profesi yang akan dibiayai penuh, yakni guru dan dokter, dengan sistem ikatan dinas agar mereka wajib kembali mengabdikan diri di Kaltim setelah lulus.

"Kita ingin tenaga-tenaga profesional seperti guru dan dokter tetap kembali ke daerah. Kaltim masih sangat membutuhkan mereka, terutama untuk wilayah-wilayah yang kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan," tegasnya.

Seno menjelaskan bahwa arah kebijakan pendidikan ini juga me-



"Kaltim Emas harus bebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Kita akan memutus rantai kebodohan dengan ilmu, dan rantai kemiskinan dengan kesempatan," ujar Harum.

Gebrakan Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam waktu singkat membuktikan bahwa perubahan nyata bukan hal mustahil. Pro-

cakup pembiayaan penuh dari jenjang SMA/SMK hingga kuliah D3, S1, S2, bahkan S3. Dengan begitu, putra-putri Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu dan meningkatkan daya saing daerah.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa program kuliah gratis Gratis Pol akan diimplementasikan

nyesuaikan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis daerah, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan teknologi hasil pangan.

“Kami ingin anak-anak Kaltim memilih jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Misalnya jurusan pertanian dan teknologi hasil pangan di Unmul, itu sangat penting untuk mendukung hilirisasi industri di Kaltim. Lulusan lokal juga punya peluang lebih besar untuk terserap di sini,” tuturnya.

2. Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas

Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pemerintah provinsi menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Setiap masyarakat, baik di perkotaan maupun pelosok desa, mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak dan setara.

3. Pembebasan Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah

Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov Kaltim menanggung seluruh biaya administrasi kepemilikan rumah, sehingga rakyat dapat memiliki hunian layak tanpa terbebani biaya tambahan.

4. Seragam Sekolah Gratis untuk Siswa Kurang Mampu

Sebagai wujud perhatian terhadap pendidikan dasar, pemerintah menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga pra sejahtera. Dalam acara peluncuran Gratis Pol, Gubernur Harum bahkan menyerahkan bantuan

desa pertama telah resmi menikmati akses internet gratis, yang akan terus diperluas ke seluruh wilayah Kaltim. Program ini menjadi langkah konkret menuju transformasi digital desa.

6. Umrah Gratis untuk Marbot dan Penjaga Rumah Ibadah

Sentuhan spiritual juga menjadi ba-



ini secara simbolis sebagai tanda kasih untuk generasi penerus Kaltim.

5. Internet Gratis untuk Desa

Pemprov Kaltim menggandeng Diskominfo Kaltim untuk memperluas akses digital ke pelosok daerah. Lima

gian penting dalam visi Gubernur Harum. Pemerintah provinsi menyediakan program umrah gratis bagi para marbot masjid dan penjaga rumah ibadah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga tempat suci dan memakmurkan umat. ●



KUNJUNGAN WISMAN MELONJAK 12,32 PERSEN

Sektor pariwisata Indonesia mencatat kinerja yang sangat positif pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Sektor ini semakin kokoh sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025 mengungkapkan tren positif sepanjang 12 bulan terakhir (September 2024-Agustus 2025).

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tumbuh sebesar 12,32 persen, mencapai total 14,85 juta kunjungan.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) melonjak 21,69 persen, menjadi sebesar 1,15 miliar perjalanan.

Menteri Widiyanti menegaskan bahwa capaian ini tidak hanya berfokus pada angka kunjungan, tetapi juga pada nilai tambah dan kualitas yang semakin meningkat.

Widiyanti menegaskan bahwa ca-

paian ini tidak hanya berfokus pada angka kunjungan, tetapi juga pada nilai tambah dan kualitas yang semakin meningkat.

“Capaian ini menunjukkan pariwisata Indonesia telah kembali menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan kualitas yang semakin meningkat. Lebih dari itu, kita tidak hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga nilai tambah dari setiap perjalanan,” ujarnya.

Pariwisata memegang peran strategis dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Data sementara BPS untuk Kuartal I 2025 menunjukkan sektor ini menyumbang 3,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, berdasarkan data SAK-



ERNAS BPS Februari 2025, pariwisata menyerap lebih dari 25,88 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

Kementerian Pariwisata terus memperkuat lima program unggulan, yaitu Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, Event by Indonesia, dan Desa Wisata.

Secara spesifik, program Karisma Event Nusantara dan Event by Indonesia lainnya berhasil mendorong perputaran ekonomi langsung hingga lebih dari Rp11 triliun.

Selain itu, pengembangan 6.153 Desa Wisata turut memperkuat pemerataan ekonomi berbasis komunitas. Di tingkat global, Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 143 penghargaan bergengsi dalam kurun satu tahun terakhir.

Penghargaan tersebut meliputi Best Tourism Village dari UN Tourism, 15 ASEAN Tourism Awards untuk desa wisata, 33 hotel yang meraih MICHELIN Keys, serta penobatan Bali sebagai Pulau Terbaik di Asia 2025 oleh Condé Nast Traveller.

Dalam satu tahun, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan tujuh produk hukum strategis, termasuk Perubahan Ketiga Undang-Undang Kepariwisata dan Peraturan Menteri tentang Satu Data Pariwisata.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga juga diperkuat melalui 14 kolaborasi formal, serta kerja sama internasional strategis dengan negara seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan Prancis.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru dan memperluas pasar pariwisata global.

Menteri Widiyanti menyimpulkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya terwujud melalui kerja sama solid, membuktikan bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci dalam pembangunan pariwisata berkualitas.

Sementara, pelaku usaha wisata mengungkapkan bahwa kebijakan pembebasan visa atau visa waiver bagi wisatawan mancanegara lebih efektif untuk meningkatkan kedatangan turis asing, ketimbang kemudahan dari aplikasi All Indonesia yang baru saja meluncur.

Ketua Umum Asosiasi Travel Agent

Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menuturkan aplikasi baru All Indonesia memang sangat memudahkan pengisian deklarasi dan membuat arus penumpang lebih lancar, tetapi dinilai tak mampu meningkatkan minat wisatawan.

Di mana keberadaan visa waiver

dinilai lebih menarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.

"Kalau untuk meningkatkan wisatawan, visa free dan waiver, business visa untuk yang akan menghadiri pameran dan acara di Indonesia. Ini akan lebih menggiatkan industri pariwisata dan MICE di Indonesia," ujarnya. ●





HANTAP CIHERANG NIAGARA MINI DI SELATAN BANDUNG

Di antara hamparan sawah dan pepohonan rindang di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, tersembunyi sebuah tempat yang perlahan mencuri perhatian para pencinta wisata alam.

Namanya Irigasi Hantap Ciherang, atau lebih akrab disebut Bendungan Hantap oleh warga sekitar.

Lokasinya berada di Kampung Gumuruh, Desa Jatisari, sekitar 20 menit dari pusat Banjaran.

Dari kejauhan, suara deras air sudah terdengar ritmis, menenangkan, sekaligus menggoda rasa ingin tahu siapa pun yang melintas.

Begitu tiba di pintu masuk, pengunjung disambut oleh pemandangan air yang jatuh bertingkat dari dinding batu selebar belasan meter.

Dari sudut tertentu, tampilannya menyerupai air terjun kecil yang menawan. Tak heran jika sebagian orang menjulukinya "Niagara Mini Kabupaten Bandung."

Meski bukan tempat wisata resmi, Hantap Ciherang memiliki daya tarik alami yang sulit diabaikan. Aliran air jernih, udara sejuk, dan suasana pedesaan yang tenang menjadi kombinasi sempurna bagi mereka yang ingin sejenak melarikan diri dari hiruk-pikuk kota.

Anak-anak sering terlihat bermain air di tepian bendungan, sementara keluarga menikmati waktu santai di bawah rindangnya pohon.

Beberapa remaja membawa kamera untuk berburu foto dengan latar tirai air yang memesona.

Namun, di balik keindahannya, Hantap Ciherang bukan dibangun untuk menjadi tempat wisata.

Bendungan ini sejatinya memiliki fungsi vital sebagai irigasi pertanian bagi



masyarakat di sekitar Banjaran, Canguang, dan Soreang.

Air yang mengalir dari Sungai Cisangkuy yang bersumber dari Pangalengan menjadi urat nadi bagi lahan pertanian di wilayah selatan Bandung.

Di sinilah keunikan Hantap, tempat ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menghidupi ribuan petani.

Menariknya, bendungan ini ternyata warisan kolonial Belanda.

Dibangun sekitar tahun 1903, Hantap Ciherang masih berfungsi hingga kini sebuah bukti ketangguhan konstruksi dan pentingnya sistem irigasi bagi tatanan hidup masyarakat.

Di musim tanam, air dari Hantap menjadi sumber harapan. Sawah menghijau, kebun subur, dan aktivitas pertanian menggeliat.

Namun di akhir pekan, aliran yang sama menjelma menjadi magnet wisata yang alami. Warga sekitar tidak menyangka banyak orang datang ke Bendungan ini untuk foto atau sekadar main air.

Dalam beberapa tahun terakhir, Han-

tap Ciherang mulai muncul di berbagai platform digital.

Banyak yang menyebutnya “wisata murah meriah” karena pengunjung bisa masuk secara gratis atau hanya memberikan uang seikhlasnya.

Beberapa pedagang lokal kini berjualan di sekitar bendungan.

Ada yang menawarkan minuman kelapa muda, ada juga yang menjajakan gorengan hangat. Aktivitas ekonomi kecil itu menambah kehidupan di sekitar kawasan. Meski begitu, infrastruktur menuju lokasi masih sederhana.

Jalan menuju Hantap sebagian belum diaspal sepenuhnya, dan fasilitas umum seperti toilet maupun area parkir masih terbatas.

Namun justru kesederhanaan itulah yang menambah daya tariknya alami, apa adanya, dan tidak dibuat-buat. Daya tarik visual Hantap Ciherang juga semakin dikenal karena sering muncul di unggahan wisatawan di media sosial.

Banyak yang terkejut ketika mengetahui bahwa “air terjun” yang mereka kunjungi sebenarnya adalah pintu air irigasi

pertanian.

Keindahan Hantap Ciherang seolah menegaskan bahwa wisata tak selalu harus glamor. Alam yang sederhana, berpadu dengan sejarah dan fungsi sosial, justru menghadirkan nilai yang lebih mendalam.

Kini, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara potensi wisata dan fungsi irigasi.

Pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan bisa mengelola Hantap secara berkelanjutan, agar keindahannya tidak mengganggu keberlanjutan pertanian.

Jika dikelola dengan baik, Hantap Ciherang bisa menjadi ikon wisata edukatif, tempat di mana pengunjung bukan hanya menikmati pemandangan, tapi juga memahami bagaimana air menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang.

Karena sejatinya, Hantap bukan sekadar bendungan. Ia adalah simbol keseimbangan antara fungsi, alam, dan manusia di mana keindahan dan kehidupan mengalir dalam satu aliran yang sama. ●



Minum Kopi di Waktu yang Tepat

RAHASIA UMUR PANJANG BAGI WANITA

Kopi tidak hanya sekadar teman pagi untuk mengusir kantuk. Lebih dari itu, jika diminum dengan cara dan waktu yang tepat, secangkir kopi bisa menjadi kunci umur panjang, terutama bagi wanita.

Minum Kopi di Waktu yang Tepat, Rahasia Umur Panjang bagi Wanita
Kopi tidak hanya sekadar teman pagi untuk mengusir kantuk. Lebih dari itu, jika diminum dengan cara dan waktu yang tepat, secangkir kopi bisa menjadi kunci umur panjang, terutama bagi wanita.

Selama ini kopi dikenal karena kandungan kafeinnya yang mampu menambah energi dan fokus.

Namun, minuman ini juga menyimpan beragam zat gizi penting seperti antioksidan, magnesium, serta senyawa bioaktif yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan.

Berbagai studi bahkan mengaitkan kebiasaan minum kopi dengan penurunan risiko penyakit serius seperti Parkinson, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung.

Meski begitu, manfaat kopi tidak akan maksimal bila dikonsumsi berlebihan atau pada waktu yang kurang tepat. Kopi terbaik untuk kesehatan

adalah kopi hitam tanpa tambahan gula, krim, atau sirup dan dikonsumsi dalam jumlah

moderat, yakni sekitar dua hingga tiga cangkir per hari.

Sebuah studi terbaru dari Harvard yang dipresentasikan dalam konferensi NUTRITION 2025 milik American Society for Nutrition mengungkap temuan menarik: waktu minum kopi ternyata berperan penting dalam menjaga kebugaran dan memperpanjang usia wanita.

Penelitian yang dipimpin oleh Dr. Sara Mahdavi ini merupakan bagian dari Nurses' Health Study riset jangka panjang yang melibatkan hampir 50.000 wanita selama lebih dari tiga dekade.

Para peneliti menganalisis asupan kafein dari berbagai sumber, seperti kopi, teh, minuman bersoda, hingga kopi tanpa kafein (decaf).

Hasilnya mengejutkan, hanya kafein dari kopi asli yang menunjukkan efek positif terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh wanita. Wanita yang rutin menikmati kopi dalam jumlah wajar cenderung memiliki tubuh yang lebih bugar, pikiran yang tajam, serta penurunan risiko kematian akibat penyakit kronis.

Peneliti menemukan manfaat paling besar ketika kopi dikonsumsi pada pagi hari sekitar 30–60 menit setelah bangun tidur. Pada waktu tersebut, tubuh secara alami sedang meningkatkan produksi hormon kortisol yang membantu seseorang merasa lebih segar dan waspada.

Ketika kafein masuk ke tubuh di waktu ini, efeknya menjadi lebih seimbang meningkatkan fokus, memperbaiki suasana hati, dan mempercepat reaksi



tanpa mengganggu pola tidur malam hari.

Sebaliknya, minum kopi di sore atau malam hari justru bisa mengacaukan ritme sirkadian dan membuat sulit tidur.

Secangkir kopi pagi juga memberi dorongan bagi otak untuk bekerja lebih optimal. Kafein terbukti dapat memperkuat daya ingat jangka pendek, mempercepat waktu reaksi, serta membantu seseorang berpikir lebih jernih dalam menghadapi aktivitas harian.

Mungkin juga, rasa kopi favoritmu terasa berbeda padahal biji, alat, dan takaran yang digunakan sama.

Ternyata, bukan kopi yang berubah, melainkan tubuh kita. Waktu dalam sehari memengaruhi cara lidah dan otak menafsirkan rasa kopi.

Perubahan hormon, tingkat energi, serta kondisi tubuh berperan besar terhadap persepsi rasa. Ritme alami tubuh dikenal sebagai circadian rhythm membuat kita lebih peka terhadap rasa tertentu pada waktu tertentu.

Memahami kapan waktu terbaik untuk menikmati kopi bisa membuat pengalaman ngopi lebih nikmat dan sesuai selera. Berikut penjelasannya:

1. Pagi Hari: Saatnya Menyambut Hari dengan Rasa Hangat dan Penuh

Begitu bangun tidur, tubuh menghasilkan hormon kortisol dalam jumlah tinggi untuk memicu kewaspadaan. Namun, kondisi ini juga membuat indra perasa kurang peka terhadap kompleksitas rasa kopi.

Karena itu, di pagi hari sebaiknya pilih kopi medium hingga dark roast dengan cita rasa manis alami seperti cokelat, kacang, atau karamel. Metode seduh French press atau drip coffee

cocok untuk menghasilkan rasa yang kuat, hangat, dan nyaman di perut.

2. Akhir Pagi hingga Awal Siang: Waktu Ideal Menjelajah Rasa

Antara pukul 10.00 hingga 14.00, kadar kortisol mulai menurun dan tubuh berada dalam kondisi paling seim-

buat perut tidak nyaman.

Untuk waktu ini, pilih kopi dengan kadar kafein rendah atau campuran decaf. Metode seduh AeroPress atau Syphon bisa memberikan hasil yang halus, lembut, dan menenangkan tanpa kehilangan aroma khususnya.



Manfaat kopi tidak akan terasa jika dikonsumsi secara berlebihan atau dengan tambahan tinggi kalori. Karena itu, penting untuk:

1. Pilih kopi hitam murni, hindari gula, krim, atau pemanis buatan.
2. Batasi konsumsi hingga 3 cangkir per hari, atau setara 300-400 mg kafein.
3. Minum di pagi hari agar tidak mengganggu kualitas tidur.
4. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, seperti tidur cukup, olahraga teratur, dan pola makan seimbang.

bang. Hidrasi membaik, indera pengecap pun lebih peka terhadap aroma dan rasa halus.

Inilah saat terbaik untuk mencoba single origin light roast kopi dengan profil rasa fruity, floral, atau citrus. Metode pour-over seperti V60 atau Kalita Wave bisa menonjolkan karakter alami biji kopi tanpa rasa pahit berlebih.

3. Siang hingga Sore: Pilih yang Lembut dan Tidak Terlalu Asam

Menjelang sore, tubuh mulai melambat. Rasa kopi yang terlalu asam atau tajam bisa terasa menusuk dan mem-

4. Malam Hari: Nikmati Versi Tenang Tanpa Ganggu Tidur

Mendekati waktu istirahat, tubuh memproduksi melatonin untuk membantu tidur. Kafein bisa menghambat proses ini, jadi sebaiknya hindari kopi biasa di malam hari.

Sebagai gantinya, pilih kopi decaf. Varian decaf sugarcane process direkomendasikan karena tetap mempertahankan cita rasa asli biji kopi tanpa efek stimulan berlebih. Kamu tetap bisa menikmati ritual ngopi tanpa khawatir begadang. ●



TARGET AMBISIUS PRABOWO PUNYA MOBIL NASIONAL DALAM 3 TAHUN

Indonesia akan memiliki mobil nasional buatan sendiri dalam waktu tiga tahun mendatang. Begitu kira-kira salah satu target ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam periode pertama pemerintahannya.

Rencana ini berawal dari keberhasilan PT Pindad dalam memproduksi kendaraan taktis Maung yang kini digunakan oleh TNI dan Polri. Bahkan, kendaraan dinas kepresidenan saat ini juga menggunakan versi khusus bernama Maung Garuda. Hasil rancangan dalam negeri yang dibuat sesuai standar keamanan kepala negara.

"Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang," tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 Oktober 2025.

Prabowo menyatakan kehadiran

Maung menjadi bukti kemampuan bangsa dalam menciptakan mobil jip secara mandiri. Hal ini merupakan simbol kebanggaan nasional karena para pejabat dan perwira kini dapat menggunakan kendaraan buatan Indonesia sendiri.

"Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia," beber Prabowo.

Sebelumnya, mobil dinas kepresidenan Indonesia dikenal menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard, kendaraan berlapis baja asal Jerman. Namun, Prabowo memilih meninggalkan mobil tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap produk karya anak bangsa.

"Kemarin saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai (Maung), jadi saya pakai mobil biasa. Tapi saya pakai Alphard, udah lama saya nggak menikmati Alphard, enak juga ini ya. Tapi, 'Eits Prabowo, ingat kamu Presiden Republik Indonesia, harus beri contoh.' Ya sudah pakai Maung terus," ujar Prabowo.

Langkah ini mempertegas arah ke-

bijakan pemerintahan Prabowo dalam mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Dengan dukungan dana dan infrastruktur pabrik yang sedang disiapkan, pemerintah optimistis dalam tiga tahun ke depan Indonesia benar-benar memiliki mobil nasional hasil karya anak bangsa.

Prabowo juga menyampaikan agar penggunaan kendaraan tersebut diterapkan secara luas di lingkungan pemerintahan dan militer.

"Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu, yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu," ujar Prabowo.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasmita, mengungkapkan, pemerintah telah mengusulkan program mobil nasional untuk ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Langkah ini sejalan dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Indonesia mampu memproduksi mobil buatan sendiri dalam tiga tahun ke depan.

"Kami tentu mendukung dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional jadi PSN, proyek strategis nasional. Sudah kami tanda tangan pengusulannya. Kalau sudah dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat," kata Agus.

Dengan dijadikannya proyek mobil sebagai PSN, Agus meyakini pelaksanaannya akan jauh lebih mudah terealisasi karena mendapat dukungan lintas kementerian. Meski begitu, Agus belum berbicara lebih rinci perihal persiapan dari pelaksanaan PSN ini.

"Pokoknya kalau sudah PSN semua disiapkan, sudah siap. Jadi status PSN dulu yang diperjuangkan, Kamis sudah usulkan," katanya.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, para menteri dan anggota kabinet lainnya setuju dengan keinginan Prabowo tersebut karena dinilai sebagai kebanggaan terhadap produk dalam negeri.



“Kita setuju karena ini merupakan kebanggaan nasional bahwa Indonesia memiliki industri otomotif yang mandiri, dan dari sisi teknologinya juga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ini menunjukkan rasa kebanggaan, nasionalisme, industri otomotif Indonesia yang sejak beberapa puluh tahun lalu selalu ingin dibangun tetapi belum juga selesai,” ujarnya.

Momentum Strategis

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai langkah Presiden Prabowo untuk membangun pabrik mobil nasional jadi momentum yang paling serius dalam membangkitkan industri otomotif nasional.

“Ini tentunya merupakan momentum strategis bagi kebangkitan industri otomotif nasional jika dijalankan secara serius oleh semua pembantu Presiden,” kata Yannes dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

Cita-cita ini juga merupakan momen paling serius yang diniatkan pimpinan negara Indonesia saat ini. Pembangunan pusat produksi kendaraan di Indonesia ini, tidak sekadar mendirikan fasilitas produksi, melainkan untuk menegaskan arah baru Indonesia menuju kemandirian teknologi, manufaktur, dan rantai pasok industri kendaraan.

Tentu saja, cita-cita yang positif ini harus diimbangi dengan hadirnya kolaborasi antara kementerian terkait dan mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang industri tersebut.

“Jika dijalankan dengan konsisten dan diisi oleh orang-orang yang commit dan kompeten, swasta yang nasionalis, dan perguruan tinggi teknologi terunggul di Indonesia, maka Indonesia dalam waktu singkat tidak lagi sekadar menjadi nett market, tetapi bisa eksis menjadi pemain aktif dalam rantai nilai global,” jelasnya.

Menurut Yannes, jika cita-cita ini benar terwujud, banyak hal positif yang didapatkan oleh pemain lokal, mulai dari Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) yang bakal diisi oleh perusahaan parts lokal.

Tak hanya itu, dengan hadirnya mobil buatan dalam negeri, nantinya bakal mengundang investor baru yang menaruh kepercayaan untuk berinvestasi besar dalam membangun pabrik mulai dari pusat R&D hingga produksinya di Tanah Air.

“Ini akan menjadi peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja berkeahlian tinggi yang pengembangan sumber daya manusianya didukung oleh pendidikan tinggi terbaik teknologi yang ada di Indonesia, tumbuhnya ekosistem pemasok lokal yang terlepas dari kungkungan aturan prinsipal luar negeri, dan terjadinya transfer teknologi,” ujarnya.

“Lebih dari sekadar istilah mobil na-

“Kalau menurut saya, wajar saja Presiden kemudian mempromosikan mobil yang hasil karya anak Indonesia,” ucapnnya, Selasa, 21 Oktober 2025.

la menilai pernyataan Prabowo mengandung dua pesan, yakni mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pesan agar anggota kabinet tidak bermewah-mewah. Menurutnya, pesan tersebut merupakan sesuatu yang harus didorong, termasuk penggunaan mobil karya Indonesia.

“Lalu, bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Itu sesuatu yang memang harus didorong dan dicontohkan melalui teladan dari elite-elite politik, termasuk dari presiden dan menteri-menteri,” kata dia.

Kunto menilai pesan Prabowo agar



sional, inisiatif ini dapat menjadi tonggak reindustrialisasi nasional yang memperkuat kedaulatan ekonomi dan daya saing kita di kancah regional dan global tentunya,” imbuhnya.

Analisis Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, berpendapat, ada dua pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang meminta para menteri menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

Kunto menilai sangat wajar jika presiden mempromosikan mobil hasil karya anak bangsa untuk digunakan oleh para menteri.

para menteri menggunakan mobil Maung adalah wujud nasihat agar berempati pada masyarakat.

“Bahwa ini menggunakan Maung seakan-akan harus kita berempati dengan warga, jangan menggunakan mobil yang sangat mewah untuk dinas sehari-hari, gunakan Maung produk dalam negeri. Jadi paling tidak dua pesan itu,” ucapnya.

Terkait pernyataan Viva Yoga Mauladi yang menilai perintah penggunaan mobil Maung merupakan dorongan awal industri mobil dalam negeri, Kunto menyebut hal itu harus disusul dengan penyusunan peta jalan. Sehingga, publik bisa tahu dalam berapa tahun kemudian Indonesia bisa punya produk mobil dalam negeri yang bisa dibanggakan. ●



HARGA PUPUK SUBSIDI TURUN NASIB PETANI BELUM AMAN

Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025. Penurunan HET itu tanpa menambah alokasi dana subsidi pupuk, sehingga diklaim tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penurunan HET itu mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yakni urea, NPK, ZA, dan pupuk organik. HET pupuk urea turun dari Rp2.250 per kilogram (kg) menjadi Rp1.800 per kg. HET pupuk NPK turun dari Rp2.300 per kg menjadi Rp1.840 per kg.

HET pupuk NPK khusus untuk tanaman kakao turun dari Rp3.300 per kg menjadi Rp2.640 per kg. HET pupuk ZA khusus untuk tanaman tebu turun dari Rp1.700 per kg menjadi Rp1.360 per kg. Adapun HET pupuk organik turun dari Rp800 per kg menjadi Rp640 per kg.

Kebijakan itu diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Kepmentan Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, HET,

dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

"Penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen itu atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Melalui kebijakan itu, biaya produksi pertanian bisa turun, sehingga petani lebih terpacu untuk meningkatkan produksi pangan," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Amran, penurunan HET pupuk bersubsidi itu tidak menambah alokasi dana subsidi pupuk, sehingga tidak membebani APBN. Kebijakan itu diambil lantaran pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil merevitalisasi tata kelola dan mengoptimalkan biaya produksi pupuk bersubsidi.

Melalui pembenahan sistem kelola



pupuk bersubsidi, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun dan menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Selain itu, laba Pupuk Indonesia pada 2026 juga diperkirakan bakal meningkat Rp2,5 triliun menjadi Rp7,5 triliun.

“Revitalisasi tersebut juga berpotensi menambah volume produksi pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton secara bertahap hingga 2029,” katanya.

Kementan mencatat, pada 2025, alokasi APBN untuk subsidi 9,55 juta ton pupuk adalah Rp44,2 triliun. Pada 2026, alokasi APBN untuk subsidi 9,62 juta ton pupuk mencapai Rp46,9 triliun.

Amran juga mengungkapkan, pemerintah tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional. Lima di antaranya ditargetkan selesai paling lambat pada 2029.

“Dengan beroperasinya pabrik baru tersebut, biaya produksi dapat ditekan lebih dari seperempat dan ketergantungan pada bahan baku impor dapat dikurangi secara signifikan,” ungkapnya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya produksi dan harga pupuk yang

terjangkau, Pupuk Indonesia akan merevitalisasi sejumlah pabrik pupuk. Total dana yang dibutuhkan senilai Rp54 triliun.

Revitalisasi pabrik pupuk itu diperlukan lantaran delapan pabrik dari 15 pabrik milik Pupuk Indonesia tidak efisien karena telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini membuat rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea mencapai 28 juta MMBTU.

Bahkan, khusus delapan pabrik berusia di atas 30 tahun, rerata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea bisa mencapai 32,2 MMBTU. Melalui revitalisasi itu, konsumsi gas diproyeksikan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga telah memulai pembangunan pabrik pupuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri IIB) yang ditargetkan kelar pada 2027.



• INFO EKONOMI

Pabrik pengganti pabrik lama itu akan mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton urea menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

Selain menurunkan HET pupuk bersubsidi, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Distributor dan pengecer

Sementara itu, dalam rangka menopang musim tanam (MT) I padi pada Oktober 2025 hingga Maret 2026, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1.200.679 ton. Total volume stok tersebut hampir tiga kali lipat atau 259 persen dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah.

Stok tersebut terdiri dari pupuk urea sebanyak 510.262 ton, NPK 610.649 ton, dan NPK formula khusus atau untuk

"Kami juga berharap para petani dapat mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi yang pada tahun ini dialokasikan pemerintah sebesar 9,55 juta ton," tuturnya.

Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi untuk periode Oktober 2025 hingga Maret 2026 sebanyak 480.363 ton. Rinciannya, urea sebanyak 412.212 ton, NPK 27.411 ton, dan ZA 40.740 ton.

Rahmad mengemukakan, penurunan HET pupuk bersubsidi merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani. Kebijakan itu mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk sekaligus memperkuat daya beli petani.

"Sejalan dengan pemerintah, kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Kami juga memastikan proses bisnis perusahaan tetap berjalan normal sesuai HET pupuk bersubsidi diturunkan," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, menambahkan, setiap titik serah harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET. Titik serah itu mencakup pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani, dan kelompok pembudidaya ikan.

"Apabila ditemukan pelanggaran, Pupuk Indonesia akan memberikan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga penghentian kerja sama," kata Yehezkiel.

la juga meminta setiap titik serah dan petani memahami mekanisme penjualan pupuk bersubsidi sesuai HET. HET merupakan harga yang berlaku di titik serah sehingga petani seharusnya mengambil langsung pupuk bersubsidi di titik serah tersebut.



yang menjual pupuk subsidi di atas HET bakal ditindak tegas.

Amran mengemukakan, Presiden telah memerintahkan agar pupuk bersubsidi harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Dalam pendistribusiannya, tidak boleh ada keterlambatan dan tidak boleh ada kebocoran.

Korporasi besar tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi secara tidak sah. Selain itu, distributor dan pengecer juga harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.

"Jika melanggar, kami akan beri sanksi hukum yang tegas. Yang terbukti melanggar akan dicabut izin usahanya dan diproses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar," tegas Amran.

Pada 13 Oktober 2025, Kementan telah mencabut izin usaha 2.039 kios pengecer pupuk bersubsidi. Mereka sengaja menjual pupuk bersubsidi 18-20 persen di atas HET. Akibat ulah para pengecer nakal itu, kerugian petani diperkirakan Rp600 miliar.

tanaman kakao 14.316 ton. Selain itu, ada juga pupuk ZA dan pupuk organik masing-masing sebanyak 8.759 ton 56.693 ton.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menuturkan, pupuk bersubsidi tersebut sudah tersedia di gudang produsen hingga gudang penyangga di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dengan demikian, petani bisa segera menebusnya sewaktu-waktu.



Namun, apabila terdapat kebutuhan untuk mengantarkan pupuk ke lahan atau rumah petani, ongkos kirim dapat dinegosiasikan di antara kedua belah pihak. Prinsipnya, proses pengantaran pupuk bersubsidi dapat dilakukan melalui negosiasi antara titik serah dan petani.

"Namun, biaya pengantaran harus dipisahkan dari transaksi pupuk agar tidak dianggap menjual di atas HET. Dan yang terpenting, ongkos kirim tidak boleh memberatkan petani," katanya.

Tekan Harga Gabah dan Gula

Petani padi dan tebu menyambut baik kebijakan pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Namun, mereka berharap penurunan tersebut tidak menekan harga gabah dan gula di tingkat petani.

Pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat, Masroni, mengatakan, selama ini, yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah petani yang mengelola lahan di bawah atau maksimal 2 hektare. Artinya, kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi bakal dinikmati para petani kecil.

"Dengan diturunkannya HET pupuk bersubsidi, para petani kecil dapat mengurangi biaya produksi meskipun hanya sedikit. Ini mengingat biaya pupuk hanya 3,34 persen dari total biaya produksi GKP (gabah kering panen)," ujarnya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Masroni menjelaskan, berdasarkan penghitungan AB2TI, biaya produksi GKP di lahan seluas 1.500 meter persegi sebesar Rp6,3 juta. Dari total biaya produksi tersebut, biaya pembelian pupuk hanya 3,34 persen atau sekitar Rp210.000.

Dengan diturunkannya HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, biaya pembelian pupuk tinggal 2,64 persen. Justru komponen terbesar dari biaya produksi GKP adalah ongkos tenaga kerja dan sewa lahan yang masing-masing sebesar 40,2 persen dan 27,9 persen dari total biaya produksi.

"Kami justru khawatir penurunan HET pupuk bersubsidi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai alasan untuk menekan harga GKP petani. Jika hal itu terjadi, kerugian petani akan jauh lebih besar dibandingkan turunnya harga pu-

puk," kata Masroni.

Ia juga mengungkapkan, selama ini, banyak kelompok tani yang menebus pupuk bersubsidi secara kolektif. Praktik ini biasa dilakukan lantaran jatah pupuk bersubsidi per petani sedikit. Selain itu, banyak kelompok tani yang tidak me-

105-108 kg pupuk bersubsidi.

Padahal, untuk memupuk tanaman tebu di lahan seluas 1 hektar, pupuk yang dibutuhkan sebanyak 800 kg. Artinya, mereka masih harus menambah kekurangan pupuk dengan cara membeli pupuk subsidi dan membuat pupuk



miliki modal untuk membayar langsung semua jatah pupuk anggotanya.

"Pada akhirnya, kios pupuk yang menebusnya kemudian baru diambil petani. Ketika pupuk sampai ke petani, otomatis ada selisih harga," ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, juga berpendapat senada. Hanya petani tebu berlahan kurang dari 2 hektar yang merasakan dampak penurunan HET pupuk bersubsidi.

"Ini tetap perlu disyukuri karena akan sedikit meringankan beban para petani tebu berskala kecil," katanya.

Menurut Soemitro, selama ini, pupuk bersubsidi yang diterima petani tebu berskala kecil masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan yang masuk ke APTRI, petani tebu berskala kecil di Malang dan Kediri (Jawa Timur) hanya menerima

organik sendiri.

Soemitro juga mengungkapkan, selama ini, sewa lahan, biaya jasa tebang dan angkut tebu, serta biaya pembelian pupuk dan pemupukan merupakan tiga komponen terbesar biaya produksi tebu. Pada 2024, biaya produksi tebu di lahan tegakan ratun lama seluas 1 hektar mencapai Rp49,05 juta.

"Dari total biaya tersebut, biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta, biaya jasa tebang dan angkut tebu Rp11,05 juta, serta biaya pembelian pupuk dan pemupukan Rp7,5 juta," ungkapnya.

Oleh karena itu, Soemitro berharap penurunan HET pupuk bersubsidi tidak dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan harga gula petani. Ini mengingat banyak petani tebu, termasuk yang berskala kecil, masih membeli pupuk nonsubsidi untuk menambal kekurangan pupuk yang dibutuhkan. ●





PEMERINTAH JANJHI LINDUNGI TEKSTIL DALAM NEGERI

Pemerintah berkomitmen melindungi industri tekstil nasional dari praktik perdagangan tidak adil, seperti impor murah dan dumping tekstil ilegal yang mengancam kelangsungan sektor tersebut.

Berbagai asosiasi tekstil di Tanah Air telah melaporkan dan meminta perlindungan atas maraknya produk tekstil impor murah yang diduga berasal dari praktik dumping.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan kebijakan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia apabila ditemukan indikasi penyelundupan barang yang merugikan produsen tekstil dalam negeri.

"Itu yang saya cari, karena saya belum terima suratnya. Justru saya minta ke mereka, kalau ada produk-produk selundupan atau dumping, kasih tahu ke saya," ujar Purbaya, Selasa, 21 Oktober 2025.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak ingin industri tekstil dalam negeri menjadi korban praktik perdagangan yang tidak fair. Pasalnya, industri tekstil dikenal sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga harus dijaga keberlangsungannya di tengah tekanan pasar global.

"Saya enggak mau ada korban di industri kita karena permainan yang enggak fair dari segala lain. Yang penting, tujuannya adalah, industri di sini hidup, ada penciptaan lapangan kerja," tutupnya.

Pemerintah akan menerapkan sanksi denda bagi importir pakaian dan tas bekas ilegal atau balpres. Kebijakan ini diambil untuk memastikan penegakan hukum di sektor perdagangan memberikan manfaat ekonomi bagi negara sekaligus menggairahkan kembali industri tekstil dalam negeri yang tengah lesu.

Purbaya mengatakan, selama ini, penindakan terhadap pelaku impor ilegal belum memberikan dampak ekonomi positif. Barang hasil sitaan biasanya dimusnahkan, sementara pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa kewajiban membayar denda.

"Saya (Menkeu) enggak dapat duit, (importir) enggak didenda, jadi saya rugi. Cuma mengeluarkan ongkos untuk memusnahkan barang itu, ditambah ngasih makan orang-orang yang dipenjara itu," ujar Purbaya.

la menjelaskan, langkah penerapan



sanksi denda ini merupakan bagian dari reformasi penegakan hukum di sektor perdagangan yang selama ini dinilai kurang menimbulkan efek jera.

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan telah mengantongi daftar importir besar yang terlibat dalam praktik impor balpres ilegal. Para pelaku tersebut akan segera diblokir dari sistem kepabeanaan agar tidak lagi dapat mengakses kegiatan impor.

Kebijakan sanksi denda juga dirancang untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) legal yang selama ini terdesak akibat maraknya peredaran produk bekas impor.

"Kami ingin menghidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri," tegasnya.

Purbaya menilai, jika rantai impor ilegal berhasil diputus, permintaan di pasar domestik akan bergeser ke produk-produk lokal yang lebih berkualitas dan sesuai standar hukum.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menepis kekhawatiran pelarangan impor balpres akan mematikan aktivitas perdagangan di pasar-pasar pakaian bekas, seperti Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mendukung penuh

upaya memberantas praktik penyelundupan dan mafia impor, khususnya di sektor tekstil dan baja.

"Kebijakan Pak Purbaya bagus. Artinya, dampaknya positif bagi industri," kata Agus usai menghadiri Konferensi Tekstil Internasional ITMF & IAF Annual Meeting 2025 di Hotel Marriot, Yogyakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Agus menilai kebijakan Kementerian Keuangan yang memperketat bea masuk kapas dan memperkuat pengawasan impor akan membantu melindungi industri tekstil nasional dari tekanan barang impor murah.

Menurut Agus, masalah utama sektor

manufaktur nasional selama ini adalah dasarnya arus impor, baik legal maupun ilegal, yang sama-sama berpotensi menekan harga produk dalam negeri.

"Impor ada dua. Impor ilegal jelas problem besar, tetapi impor legal pun bisa menjadi masalah karena persoalan harga," jelasnya.

Masuk Daftar Hitam

Anggota Komisi VI DPR, Imas Aan Ubudiyah, juga mendukung langkah Purbaya menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam. Menurutnya, langkah ini menjadi angin segar



• INFO EKONOMI

bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri.

Dia menilai, rencana itu menjadi langkah strategis memutus mata rantai peredaran pakaian bekas.

"Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata

sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat," tegasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, ada 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas yang berhasil ditindak sejak 2024 hingga Agustus 2025. Adapun total barang bukti sebanyak



rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia," ujar Imas dikutip dalam keterangannya, Minggu, 26 Oktober 2025.

Dia menekankan, penghentian impor harus dilakukan sejak hulu, bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri. Pembatasan penjualan tanpa menghentikan arus barang dari luar negeri, menurutnya, tidak akan efektif.

"Kalau pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap

12.808 koli dan nilai mencapai sekitar Rp49,44 miliar.

Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional yang tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik.

"Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi

terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah," ujarnya.

Dia juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop) yang menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.

"Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online. Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri," terangnya.

Kementerian Keuangan telah menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTMP) atas impor produk benang kapas sebagai langkah proteksi bagi industri tekstil dalam negeri. Pemerintah juga berencana lebih tegas menindak importir pakaian bekas. Arah kebijakan itu disambut baik pelaku industri.

Kebijakan BMTMP atas impor produk benang kapas itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 8 Oktober 2025 dan mulai berlaku 10 hari setelah tanggal diundangkan. BMTMP dikenakan untuk menyikapi lonjakan impor produk benang kapas beberapa waktu terakhir ini.

Pemerintah akan mengenakan BMTMP atas produk-produk benang kapas tersebut selama tiga tahun. Pada periode tahun pertama, tarif BMTMP dikenakan Rp7.500 per kilogram. Pada tahun kedua, sebesar Rp7.388 per kilogram, dan pada tahun ketiga sebesar Rp7.277 per kilogram. BMTMP berlaku untuk semua negara, kecuali 120 negara yang dikecualikan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan, penetapan BMTMP atas impor benang kapas dalam penandatanganan PMK Nomor 67 Tahun 2025 tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons kondisi darurat industri tekstil akibat lonjakan impor.

"Penetapan kebijakan oleh Pak Purbaya sangat cepat. Biasanya proses ini memakan waktu lama, tetapi beliau langsung menandatangani karena memahami betul kondisi industri," ujar Redma di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.



Menurut Redma, lonjakan impor yang terjadi setidaknya dua tahun terakhir telah menekan industri dalam negeri. Banyak pabrik berhenti beroperasi akibat masuknya produk impor dengan praktik dumping, yakni menjual barang di bawah harga pasar, serta maraknya barang impor ilegal.

Dalam dua tahun terakhir itu pula, banyak industri, termasuk tekstil nasional, yang menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya produk impor murah. Banyak perusahaan yang bahkan telah menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Redma, kebijakan BMTF itu merupakan bentuk upaya menciptakan kompetisi yang adil (fair competition) sesuai prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kebijakan BMTF itu memang baru mencakup produk benang kapas, yang hanya mewakili sekitar 30 persen konsumsi industri pemintalan. Namun, langkah itu dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah mulai memahami pentingnya menyehatkan industri tekstil dari hulu ke hilir.

"Kalau ini sudah dimulai dari benang kapas, ke depan saya kira sektor lain seperti benang polyester, rayon, kain rajut, dan kain tenun juga harus mendapat perhatian. Sebab, dumping terjadi ham-

pir di semua lini. Kapas ini 30 persen dari konsumsi industri pemintalan, sisanya 45 persen polyester dan sekitar 25 persen rayon," ujar Redma.

Pendekatan yang dilakukan Purbaya dinilai berbeda dari rezim sebelumnya yang hanya berfokus pada penerimaan pajak, tetapi kurang memperhatikan kondisi industri.

"Pak Purbaya justru menyehatkan dulu industrinya. Kalau industri kuat, otomatis bisa menghasilkan 'telur' lebih banyak," kata Redma.

Selain kebijakan PMK Nomor 67 Ta-

hun 2025, kebijakan dari Kemenkeu yang direspons positif yaitu rencana untuk memasukkan para importir pakaian bekas ke daftar hitam.

Redma menilai, kebijakan Kemenkeu itu sudah tepat dan tentu bertujuan untuk melindungi industri manufaktur nasional. Langkah itu perlu diikuti dengan koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional di tengah gempuran produk impor. ●



B50 BIKIN HARGA CPO MELONJAK

Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan mengalami kenaikan signifikan ketika kebijakan biodiesel B50 mulai diterapkan pada semester II tahun 2026.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menjelaskan bahwa peningkatan harga tersebut akan terjadi seiring meningkatnya kebutuhan CPO sebagai bahan baku utama campuran biodiesel.

"Kalau melihat jadwal penerapan B50 di paruh kedua 2026, memang wajar bila harga CPO nanti cenderung naik," ujar Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

Eddy belum dapat memastikan seberapa besar lonjakan harga yang akan terjadi, karena proyeksi lebih rinci akan dibahas dalam ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 yang akan digelar di Bali, 12-14 November 2025.

Saat ini, harga CPO berada di kisaran 4.350 ringgit Malaysia per ton atau sekitar Rp17,19 juta per ton (dengan asumsi kurs Rp3.952 per ringgit). Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan akibat program B50, Gapki menyiapkan langkah strategis dengan mendorong peningkatan produksi pada tahun depan.

Eddy menargetkan produksi CPO 2026 dapat mencapai 54-55 juta ton per tahun, naik dari capaian 52,7 juta ton pada 2024. Namun, ia menilai kenaikan produksi itu belum akan signifikan karena kebijakan B50 baru akan berjalan efektif di semester kedua 2026.

"Kenaikan produksi tidak langsung melonjak tajam. Dampak paling nyata baru akan terasa pada 2027, setelah kebijakan B50 berjalan penuh," jelas Eddy.

Peneliti dari Universitas Indonesia (UI),

Surjadi turut memperkirakan adanya peningkatan harga CPO akibat penerapan B50. Berdasarkan hasil risetnya yang bertajuk "Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia", kenaikan bauran biodiesel dari B40 menjadi B50 berpotensi menaikkan harga CPO domestik hingga Rp3.666,65 per kilogram.

"Kenaikan 10 persen dalam campuran biodiesel dapat mendorong harga CPO domestik naik sekitar Rp3.666,65 per kilogram," ujar Surjadi dalam kegiatan "Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025.

Menurutnya, peningkatan harga terjadi karena kebutuhan bahan baku CPO meningkat tajam. Berdasarkan data yang dipaparkannya, kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 mencapai 54 juta ton, sementara produksi nasional diperkirakan hanya 49,5 juta ton.

Selain berpengaruh pada pasar domestik, kebijakan ini juga berpotensi mengguncang harga CPO global. Sur-



jadi memperkirakan harga internasional dapat naik hingga US\$159,32 per metrik ton.

“Peralihan dari B40 ke B50 akan menciptakan market shock di pasar global. Peningkatan blending sebesar 10 persen saja bisa memicu kenaikan harga internasional sekitar US\$159 per ton,” jelasnya.

Kebijakan B50 diharapkan tidak hanya mendukung program energi berkelanjutan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Namun, pelaku industri diingatkan untuk mengantisipasi potensi fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan bahan baku, agar tidak mengganggu rantai pasok domestik maupun ekspor.

Gapki optimistis bahwa dengan perencanaan matang, peningkatan kapasitas produksi, dan kolaborasi pemerintah serta pelaku usaha, industri sawit nasional akan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika pasar yang dipicu oleh kebijakan energi hijau tersebut.

Pemerintah Pastikan Program Biodiesel B50 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng

Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penerapan kebijakan biodiesel B50 atau pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dari minyak sawit (CPO) ke dalam solar, yang akan dimulai pada tahun 2026, tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng di pasar domestik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi agar kebutuhan CPO untuk energi dan pangan tetap terpenuhi secara seimbang.

“Tidak ada masalah dengan pasokan minyak goreng. Kalau B50 diterapkan, tinggal kita kurangi ekspor CPO untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tercukupi, termasuk untuk program DMO (Domestic Market Obligation),” jelas Bahlil kepada wartawan, Selasa 28 Oktober 2025.

Pemerintah tengah menyiapkan skema DMO CPO sebagai langkah menjaga ketersediaan bahan baku untuk biodiesel dan minyak goreng. Dengan kebijakan ini, sebagian produksi CPO akan diwajibkan untuk dipasok ke pasar domestik terlebih dahulu sebelum ekspor dilakukan.

Bahlil menambahkan, pemerintah

juga mendorong peningkatan produktivitas sawit nasional melalui intensifikasi lahan dan perluasan area perkebunan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.

Program B50 merupakan lanjutan dari implementasi B40 yang saat ini berjalan. Pemerintah telah memutuskan untuk mulai menerapkannya secara bertahap pada semester II tahun 2026, setelah melalui serangkaian uji coba dan kajian teknis.

“Keputusan konversi dari B40 ke B50 sudah disetujui dalam rapat terbatas kemarin. Saat ini Ibu Prof. Eniya (Dirjen EBTKE) sedang melakukan pengujian mesin. Targetnya, semester kedua 2026 sudah mulai implementasi penuh,” ungkap Bahlil.

Tarik Ekspor untuk Kemandirian Energi

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung penuh kebijakan ini. Menurutnya, sebagian ekspor CPO akan dialihkan untuk memperkuat produksi biofuel domestik, guna mengurangi ketergantungan terhadap



• INFO EKONOMI

impur solar dan memperkuat kemandirian energi nasional.

"Produksi CPO nasional saat ini mencapai 46 juta ton per tahun, di mana sekitar 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor. Untuk kebutuhan B50, kita butuh sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini akan kita ambil dari porsi ekspor untuk diubah menjadi bahan bakar nabati," jelas Amran.

Amran menegaskan bahwa konversi sebagian ekspor CPO menjadi biofuel tidak hanya berdampak positif bagi sektor energi, tetapi juga ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan berkurangnya impor solar, negara akan menghemat devisa dalam jumlah besar.

Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat pengaruh Indonesia terhadap harga CPO global, karena menekan pasokan ekspor dan menjaga stabilitas harga di pasar dunia.

"Dengan langkah ini, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam tata niaga CPO dunia," kata Amran.

Petani Sawit Tolak Kenaikan B50: Khawatir Ganggu Pasokan Pangan dan Rugikan Petani Rakyat

Kelompok petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) men-

yatakan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 mulai tahun depan.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap ketersediaan bahan baku pangan, keseimbangan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga menekan kesejahteraan petani sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Dar-to, mengingatkan bahwa peningkatan campuran biodiesel menjadi B50 akan memperbesar penyerapan crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan energi.

Akibatnya, pasokan minyak sawit untuk industri pangan seperti minyak



goreng dan produk turunannya bisa semakin terbatas.

“Jika konsumsi CPO untuk biodiesel terus dinaikkan, otomatis suplai untuk industri pangan akan menurun. Dampaknya, harga minyak goreng bisa kembali melonjak dan masyarakat yang paling terdampak. Pemerintah sebaiknya berhati-hati dan menimbang keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan,” tegas Mansuetus Darto dalam keterangan resmi, Senin (27 Oktober 2025).

Subsidi Biodiesel Dinilai Tidak Adil bagi Petani

POPSI menilai bahwa kenaikan campuran biodiesel menjadi B50 juga ber-

isiko membebani keuangan BPDPKS, yang saat ini sebagian besar dananya digunakan untuk menutup subsidi biodiesel.

Dari total dana yang dikelola BPDPKS, hampir 90 persen dialokasikan untuk subsidi industri energi, sementara program peningkatan kesejahteraan petani hanya memperoleh porsi sekitar 8 persen.

“Kalau porsi subsidi untuk biodiesel terus dinaikkan, ruang bagi program petani seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan sarana produksi, dan pelatihan SDM akan makin menyempit. Petani makin tersisih dari hasil industri sawit nasional,” ujar Darto.

Risiko Penurunan Ekspor dan Pungutan Naik

Senada dengan Darto, Alpihan Arahman, Ketua Umum Apkasindo Perjuangan yang juga anggota POPSI, menyoroti potensi penurunan ekspor sawit akibat meningkatnya serapan CPO di dalam negeri.

Ia menjelaskan, selama ini sumber utama dana BPDPKS berasal dari pungu-

Menurut hitungan POPSI, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar US\$50 per ton CPO dapat menurunkan harga tandan buah segar (TBS) petani sekitar Rp45 per kilogram.

Penurunan harga ini, katanya, akan langsung memukul pendapatan petani kecil yang selama ini sudah menghadapi biaya produksi tinggi dan harga pupuk yang terus naik.

Menanggapi kondisi tersebut, POPSI mendesak pemerintah agar meninjau kembali kebijakan peningkatan mandatori biodiesel B50 dan memperbaiki tata kelola Dana BPDPKS. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan energi nasional dan kesejahteraan petani sawit sebagai ujung tombak industri ini.

“Selama ini, mayoritas dana BPDPKS diarahkan untuk kepentingan industri energi besar, sementara kebutuhan dasar petani seperti bibit unggul, pupuk, infrastruktur, dan peremajaan kebun belum terpenuhi. Kami mendorong pemerintah menempatkan petani sebagai subjek utama dalam kebijakan sawit



tan ekspor CPO. Jika ekspor berkurang, maka pemasukan BPDPKS otomatis menurun sementara kebutuhan subsidi justru meningkat.

“Ini kontradiktif. Ketika konsumsi domestik naik, ekspor turun. Tapi kebutuhan subsidi biodiesel justru makin besar. Kalau pemerintah menutupinya dengan menaikkan pungutan ekspor, dampaknya paling berat justru dirasakan oleh petani,” jelas Alpihan.

nasional,” tutur Mansuetus Darto.

POPSI berharap kebijakan transisi menuju B50 tidak terburu-buru dilakukan sebelum kesiapan pasokan bahan baku, mekanisme subsidi, dan perlindungan harga petani benar-benar diperhitungkan secara matang.

“Biodiesel seharusnya menjadi peluang bagi petani sawit rakyat, bukan malah menjadi beban baru,” pungkasnya. ●



PRABOWO SATUKAN ASEAN HADAPI KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan ASEAN dalam menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian global. Fondasi ASEAN yang kuat akan membuat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan negara-negara anggotanya itu mampu memainkan peran signifikan di kancah dunia.

Seruan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu, 26 Oktober 2025.

Menurut Prabowo, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital untuk menghadapi guncangan eksternal serta ketidakpastian masa depan.

"Persatuan ASEAN juga harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal serta ketidakpastian di masa depan," ungkap Presiden Prabowo yang pada sesi pleno duduk di antara Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet itu.

Sesi pleno tidak hanya dihadiri para pemimpin negara ASEAN, tetapi juga Direktur IMF Kristalina Georgieva, Presiden European Council Antonio Costa, dan PM Kanada Mark Carney.

Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah menunjukkan solidaritas dan kerja sama erat dalam menghadapi tantangan geoekonomi saat ini.

Prabowo menekankan pentingnya inisiatif baru di bidang perdagangan barang, pembaruan ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA), serta kerangka ekonomi digital kawasan.

"Kita akan terus menegaskan peran ASEAN sebagai penggerak pertumbuhan dan pusat inovasi dan peluang," kata Presiden.

Kekuatan ASEAN di kancah global, lanjut Prabowo, harus berakar pada fondasi yang kuat di dalam negeri. Dengan

fondasi tersebut, ASEAN dapat memainkan peran yang kredibel dan konstruktif dalam membentuk tatanan dunia yang adil dan inklusif.

"Fondasi yang kuat di rumahlah yang memungkinkan kita membangun jembatan ke dunia. Fondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita," tuturnya.

Perjalanan ASEAN dari masa konflik menuju kerja sama, lanjutnya, merupakan bukti nyata kekuatan solidaritas kawasan.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjadikan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) ASEAN dan 15 tahun East Asia Summit Bali Principles pada 2026 bukan sekadar seremonial. ASEAN harus menjadikan peringatan itu sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan.

Lebih jauh, Prabowo pun mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk tetap berani, adaptif, dan visioner dalam menghadapi masa depan.

"Menghadapi ketidakpastian global, mari kita memimpin dengan tujuan. Bukan hanya untuk kawasan kita, tetapi untuk dunia yang lebih stabil, adil, dan inklusif," tambahnya.

Sementara itu, PM Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan, pembaruan kesepakatan perdagangan barang (ATIGA) sebagai momentum untuk menghadapi tantangan kawasan, ketidakpastian geopolitik dan fragmentasi geoekonomi yang terus berkembang.

Selain itu, negara-negara ASEAN akan menandatangani ASEAN-China Area 3.0. Ini disebutnya sebagai babak baru kemitraan ASEAN-China.

Apresiasi

Pada awal pidatonya, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah atas penyelenggaraan KTT Ke-47 ASEAN yang dinilainya sangat baik. Kepala Negara juga menyambut hangat Timor Leste yang baru saja diresmikan sebagai negara anggota ke-11 ASEAN.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvira-

kul, serta menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn.

Prabowo juga sempat memuji kepemimpinan tegas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan sengketa yang baru-baru ini terjadi. Kepala Negara juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung langkah-langkah lanjutan dari perjanjian

ini, hadir pula PM Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pujian Trump

Tepat sebelum sesi pleno, setelah penandatanganan deklarasi gencatan senjata antara PM Kamboja Hun Manet dan PM Thailand Anutin Charnvirakul, diselenggarakan pula KTT Ke-13 ASEAN-AS. Presiden AS Donald Trump men-



gencatan senjata yang dicapai.

"Saya mengapresiasi kepemimpinan tegas Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan perselisihan baru-baru ini. Indonesia siap mendukung langkah-langkah selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata. Bagi ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional," tegasnya.

Sebelum sesi pleno, PM Kamboja Hun Manet dan PM Thailand Anutin Charnvirakul menandatangani deklarasi gencatan senjata. Dalam penandatanganan

gapresiasi perjanjian gencatan senjata tersebut.

"Penandatanganan hari ini menjadi satu dari delapan konflik yang bisa diakhiri dalam masa jabatan saya selama delapan bulan. Saya merasa terhormat kita bisa menyelamatkan jutaan nyawa, termasuk yang di Gaza, saat 59 negara terlibat," tutur Trump.

Trump juga mengapresiasi Presiden Prabowo dalam upaya perdamaian itu.

"Indonesia teman baru saya, terima kasih telah membantu, terima kasih Presiden Prabowo untuk dukungan yang luar biasa dalam memastikan hari-hari

baru di Gaza," tuturnya dalam bahasa Inggris.

Trump pun berterima kasih kepada para pemimpin Malaysia dan Brunei yang mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Apalagi, Trump mengklaim, ini akan menjadi perdamaian pertama di Timur Tengah setelah tiga ribu tahun.

Trump pun mengatakan hadir di KTT ASEAN-AS dengan niat baik dan bersahabat. Dia berharap bisa memperdalam kerja sama perdagangan dan memperkuat stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian.

"Kita berbagi nilai perdamaian dan kemakmuran," ujarnya.

Selain menyanjung para pemimpin ASEAN sebagai orang-orang luar biasa, Trump juga mengklaim AS sedang di

masa keemasan. Karena itu, ada kesempatan luar biasa bersama AS.

"Terima kasih kepada semua yang ada di ruangan ini, Anda adalah pemimpin yang luar biasa. Energi Anda, kegeniusan Anda, semua yang Anda lakukan, saya sampaikan semua yang Anda sentuh berubah menjadi emas dan Anda boleh bangga. Bagian dunia lain tak seperti ini," tuturnya.

Persaingan Sehat

Penguatan kerja sama sekaligus persaingan yang sehat di kawasan menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto pada hari kedua rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 27 Oktober 2025. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Presiden mengajak negara-

negara di kawasan berkolaborasi agar kerja sama ekonomi tidak hanya terjalin tetapi juga bersifat inklusif.

Saat mengikuti KTT ke-28 ASEAN Plus Three, Prabowo mengatakan, kerja sama di antara negara-negara ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan tengah menapaki babak baru. Babak baru kerja sama itu berlangsung di tengah tantangan global yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, gangguan perdagangan internasional, serta peningkatan ketegangan geopolitik.

Menurut Prabowo, dinamika itu juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di kawasan. Di Indonesia, sejumlah tantangan global itu mengakibatkan tekanan pada petani, generasi muda, serta peran Indonesia dalam rantai pasok global.

Jika merujuk laporan ASEAN Plus Three Regional Economic Outlook, kata Prabowo, kawasan ASEAN Plus Three disebut memiliki ketangguhan ekonomi. Akan tetapi, laporan tersebut juga mengingatkan bahwa tidak ada kepastian akan stabilitas.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah untuk menghadapi situasi tersebut. Beberapa langkah dimaksud dimulai dengan penguatan integrasi regional, diversifikasi perdagangan, serta penguatan jaring pengaman keuangan.

"Indonesia mengakui kontribusi kerja sama trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea bagi seluruh kawasan. Untuk terus menjaga pertumbuhan dan melindungi diri dari guncangan eksternal, pendalaman kerja sama trilateral ini melalui pertemuan puncak dan pertemuan tingkat menteri secara rutin akan sangat penting," ujar Prabowo.

Presiden juga mendorong peningkatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) untuk menjamin stabilitas pasokan pangan dan memperkuat respons darurat antarnegara melalui pertukaran informasi yang lebih baik.

Diaa pun menekankan pentingnya pelaksanaan penuh APT Cooperation Work Plan (2023-2027), penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralisation sebagai langkah nyata memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional, serta mendukung pengesahan ASEAN Plus Three Leaders' Statement



on Strengthening Regional Economic and Financial Cooperation.

Di tengah dinamika global yang kian intens, persaingan antarnegara juga tidak terelakkan. Bahkan, persaingan juga disebut sebagai mesin kemajuan.

“Namun, agar benar-benar menjadi pendorong kemajuan, persaingan harus bersifat konstruktif,” ujar Prabowo.

Saat mengikuti KTT Ke-26 ASEAN-Republik Korea pada hari yang sama, Prabowo menegaskan, di tengah persaingan itu dibutuhkan kolaborasi untuk menjaga kerja sama ekonomi tetap terbuka, terhubung, dan inklusif. Dengan demikian, negara-negara di kawasan bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan peluang nyata bagi kesejahteraan bersama.

Perdamaian di kawasan

Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi perlu ditopang perdamaian dan stabilitas kawasan. Untuk itu, ia mendukung upaya Korea Selatan menjadi mitra dalam pembangunan perdamaian, meredakan ketegangan, mendorong dialog, di tengah sejumlah konflik yang terjadi di kawasan.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung langkah nyata ASEAN dalam menyelesaikan berbagai krisis di kawasan, salah satunya di Myanmar. Indonesia pun mencermati berbagai perkembangan di Myanmar, termasuk rencana penyelenggaraan pemilu pada Desember 2025.

Terkait dengan hal itu, Indonesia mendorong ASEAN untuk memastikan prinsip demokrasi dan transparansi diterapkan. Jika diperlukan, ia juga menyarankan agar ASEAN mengirimi tim pengamat untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Myanmar.

Hal itu krusial, karena sejak lima tahun lalu konsensus lima poin yang semestinya menjadi acuan dalam upaya perdamaian dan stabilitas di Myanmar belum diimplementasikan secara maksimal.

Adapun yang dimaksud konsensus lima poin ASEAN adalah terdiri dari pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, mengadakan dialog inklusif, mengajukan ASEAN sebagai fasilitator mediasi, serta kunjungan

utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

“Kita harus terus menyerukan gencatan senjata untuk menciptakan ruang yang diperlukan bagi dialog yang bermakna. Indonesia siap mendukung Ketua ASEAN dalam melibatkan semua pihak menuju proses yang benar-benar inklusif,” kata Presiden.

Upaya mendorong perdamaian dunia juga disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla saat mengikuti pertemuan internasional untuk perdamaian “Daring for Peace” yang diselenggarakan Komunitas Sant’Egidio di Roma, Italia, Senin waktu setempat.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin dunia, aktivis kemanusiaan, dan tokoh lintas agama, termasuk Paus Leo XIV itu, Kalla menekankan bahwa hanya perdamaian yang bisa menjamin masa depan umat manusia, bukan perang.

“Perang selalu merendahkan nilai kehidupan manusia. Hanya perdamaian yang dapat membangun peradaban

dan menjaga martabat umat manusia,” kata Kalla.

Menurut dia, berbagai konflik yang terjadi di dunia memiliki akar yang sama dan terus berulang. Akar masalah itu bermula dari semangat 3G atau god (agama), glory (kemuliaan), dan gold (kepentingan ekonomi), yang jika disalahgunakan bakal melahirkan keserakahan, fanatisme, dan supremasi yang berujung pada penderitaan kemanusiaan. Akar tersebut juga yang menurut Kalla terkait dengan perang yang terjadi di Ukraina dan Gaza.

Belum tuntas dengan hal itu, kini kembali muncul sejumlah tantangan dalam perang modern. Salah satunya keterlibatan aktor nonnegara dan penyalahgunaan teknologi informasi.

Saat ini, menurut Kalla, penyebaran kebencian dan hoaks di dunia digital pun dapat menjadi bahan bakar bagi konflik global. Padahal, teknologi semestinya bisa mempersatukan manusia. ●





DIREKTORAT JENDERAL PESANTREN KADO SPESIAL HARI SANTRI 2025

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan perbaikan tata kelola pondok pesantren di Hari Santri 2025 yang jatuh pada Rabu, 22 Oktober 2025. Langkah konkret ditunjukkan dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama.

Keberadaan unit kerja baru itu diharapkan mampu meningkatkan pengawasan pengelolaan pesantren agar memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas serta menjamin keamanan para santri.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan, insiden runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, September lalu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Dalam insiden itu tercatat 63 santri meninggal.

Pemerintah pun terdorong untuk melakukan perbaikan dan memberikan perhatian lebih pada institusi pendidikan berbasis agama tersebut.

"Dari peristiwa itu, kita mendapatkan fakta bahwa tampaknya pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih bagi pondok-pondok pesantren, yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Prasetyo.

Salah satu hal utama yang menjadi perhatian Presiden Prabowo adalah keamanan bangunan. Saat ini, masih banyak bangunan pesantren yang belum memenuhi standar keamanan. Sebagai langkah awal, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan persoalan teknis bangunan agar setidaknya memenuhi standarisasi keamanan.

Menurut Prasetyo, faktor keamanan



bangunan cukup krusial karena terjadi insiden yang menewaskan puluhan santri. Kondisi itu mendorong pemerintah membuat program pelatihan atau pembekalan terkait ilmu bangunan bagi para santri. Disebutkan, saat ini program itu sedang dijalankan Kementerian PU.

"Harapannya, ketika ada proses pembangunan di setiap pondok pesantren masing-masing, ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal mendirikan bangunan," katanya.

Aspek pendidikan juga tak luput dari perhatian Prabowo. Ada dorongan agar para santri nantinya dibekali pula ilmu pengetahuan terkait teknologi hingga ekonomi. Ini berkaitan dengan peran santri sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, sehingga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi, jumlah santri secara keseluruhan bisa mencapai 16 juta orang.

"Itu beberapa hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden, yang diperintahkan kepada kami, jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pesantren," tuturnya.

Prasetyo tak menampik keberadaan direktorat jenderal baru menuntut tambahan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hanya,

pemerintah perlu menginventarisasi kebutuhan anggarannya. Lebih-lebih, terkait anggaran untuk pembangunan atau pemugaran fisik pondok pesantren, pemerintah harus melihat dulu kemampuan keuangan negara.

Semula, urusan pengawasan pondok pesantren hanya berada di tingkat direktorat. Secara struktural, unit kerja itu hanya berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jika kelak tingkatannya dinaikkan, berarti pengawasan masalah pesantren akan diurus unit kerja setingkat eselon I.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mensyukuri wacana pembentukan ditjen baru pada kementeriannya tersebut. Kepastian pembentukan unit kerja itu juga semakin nyata seiring dikeluarkannya surat bernomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 pada 21 Oktober 2025. Dengan surat itu, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren.

Usulan pembentukan Ditjen Pesantren sendiri telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 2019. Kala itu, jabatan Menteri Agama masih disandang Lukman Hakim Saifuddin.

Pengusulan kembali dilakukan pada era kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas pada 2021 dan 2023. Nasaruddin

melanjutkan pengusulan itu setelah dilantik sebagai menteri pada 2024.

Menurut Nasaruddin, keberadaan ditjen itu akan mengkonsolidasikan pondok pesantren secara nasional. Selama ini, kemungkinan ada sejumlah pondok pesantren yang belum terdata ataupun terjangkau bantuan pemerintah. Hendaknya kelak masalah-masalah semacam itu tak lagi muncul mengingat koordinasi sudah terjalin lebih baik.

"Dengan ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal," kata Nasaruddin dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, dia meyakini, ditjen baru itu bakal berperan untuk membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Sistem pendataan pesantren juga kelak bisa semakin diintensifkan. Dengan demikian, pendataan soal pesantren bisa lebih valid dan program-programnya dilaksanakan secara tertib.

"Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tetapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran," tambahnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren sebagai langkah menciptakan generasi penerus yang unggul. Upaya itu menjadi bagian selaras untuk mewujudkan terciptanya Indonesia Emas pada 2045. Apalagi, jumlah santri menyentuh angka belasan juta.

Bentuk komitmen itu diwujudkan dengan sederet program, antara lain perbaikan tata kelola pondok pesantren, penguatan ekonomi mandiri di lingkungan pesantren, serta pelatihan akal imitasi (AI) dan adaptasi teknologi. Ada juga aliran program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar dan Makan Bergizi Gratis yang menysasar santri.

"Semoga santri Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitasnya menjadi generasi penerus berdaya saing yang menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Wapres.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman

Imanul Haq, menyebut, langkah Presiden Prabowo membentuk Ditjen Pesantren merupakan bukti nyata keberpihakannya terhadap dunia pesantren dan perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

"Pembentukan Ditjen Pesantren adalah kado terindah untuk Hari Santri 2025. Ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo benar-benar memahami peran strategis pesantren dalam membentuk karakter, moralitas, dan kemandirian bangsa," kata Maman.

Maman menjelaskan, selama ini, pesantren menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya Ditjen Pesantren, koordinasi dan pembinaan terhadap pesantren diharapkan bisa dilakukan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

"Pesantren bukan hanya lembaga

santri dan pesantren. Kita semua patut bersyukur dan mendukung langkah ini demi kemajuan pesantren Indonesia," katanya.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, juga menilai keputusan pembentukan Ditjen Pesantren jadi wujud komitmen untuk membangun SDM unggul Indonesia.

Menurut Ali, pembentukan Ditjen Pesantren tersebut penting karena dua hal. Pertama, pesantren sejak dulu telah menjadi salah satu basis lahirnya para tokoh-tokoh besar bangsa.

Pesantren merupakan salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Dari pesantren lahir generasi yang berilmu, berakhlak, dan berjiwa nasionalis.

"Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, pesantren telah menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan, keisla-



pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Presiden Prabowo dengan langkah ini telah memberikan ruang yang lebih besar bagi pesantren untuk berkembang," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka, itu.

Maman menilai keputusan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing.

"Hari Santri tahun ini menjadi sangat istimewa. Presiden Prabowo memberikan bukti nyata keberpihakannya kepada

man, dan kemanusiaan," ujar Ali.

Kedua, data Kemenag per 4 Oktober 2025 menunjukkan jumlah pondok pesantren sebanyak 43.391 unit di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Ali, angka tersebut bukan sekadar data statistik, tetapi cerminan dari kokohnya akar pendidikan berbasis nilai, moral, dan spiritual di tengah masyarakat.

"Banyaknya pesantren di Indonesia adalah potensi besar bagi bangsa. Dari pesantren lahir para pemimpin, pendidik, ulama, dan tokoh bangsa yang menjadi penjaga moral masyarakat," katanya. ●

CETAK 625 RIBU SAWAH BARU KEJAR SWASEMBADA PANGAN

Pemerintah terus memperkuat agenda reformasi dan hilirisasi sektor pangan nasional sebagai langkah strategis untuk mencapai swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan, pemerintah berencana melakukan cetak sawah seluas 625 ribu hektare. Jumlah itu gabungan dari rencana tahun ini sebesar 225 ribu hektare dan tahun depan 400 ribu hektare. Karena itu, dibutuhkan, anggaran untuk pembangunan cetak sawah baru ini sebesar Rp10 triliun. Amran menyebutkan, pembangunan

ini termasuk lumbung pangan yang akan dibangun di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Insyaallah cetak sawah tahun depan, kita upayakan 400 ribu hektare, tahun ini 225 ribu hektare, dan tahun berikutnya kita akan lanjutkan. Termasuk (food estate) di Papua, dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan," kata Amran di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, selain cetak sawah, untuk meningkatkan produksi juga dibutuhkan bibit unggul. Zulhas menyebut, selama ini Indonesia telah tertinggal jauh dari sisi produksi akibat bibit yang digunakan.

"Karena varietas kita itu 20 tahun lalu belum ada yang baru. Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam bisa 10 ton (produktivitas

beras), kita hanya 5 ton, tentu bibit varietas, itu perlu penelitian. Jadi ini PR kami masih banyak sebetulnya," jelas Zulhas.

Sederhanakan Sistem

Amran mengatakan, berbagai kemajuan di sektor pertanian saat ini merupakan hasil nyata berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu terobosan besar yang telah diwujudkan adalah penyederhanaan sistem distribusi pupuk.

"Dulu distribusi pupuk diatur melalui regulasi yang sangat panjang, melibatkan 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Setelah sistemnya disederhanakan, proses penyaluran pupuk menjadi jauh lebih cepat," ujar Amran usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Berkat penyederhanaan sistem tersebut, kini tidak ada lagi keluhan dari



petani. Berdasarkan hasil kunjungan ke beberapa provinsi, petani menyampaikan apresiasi karena distribusi pupuk telah berjalan lancar.

"Alhamdulillah, luar biasa dukungan beliau (Presiden Prabowo). Ada 17 regulasi di sektor pangan yang kita bongkar. Dulu keluhan petani hanya satu, pupuk langka dan mahal. Sekarang pupuk sudah diterima dengan baik," ucap Amran.

Saat ini, pemerintah juga tengah menjalankan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Perbaikan irigasi seluas dua juta hektare tersebut akan dilaksanakan secara terintegrasi tanpa batas administratif antardaerah. Langkah ini juga dilengkapi dengan program akselerasi alat dan mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan produktif, serta peningkatan kapasitas petani di berbagai wilayah.

"Alat dan mesin pertanian, optimasi lahan, hingga cetak sawah baru terus kita akselerasi. Mimpi terbesar kita adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," kata Amran.

Amran juga memastikan, Indonesia segera mencapai swasembada beras lebih cepat dari target awal. Sebelumnya, Presiden memberikan arahan agar target swasembada pangan, khususnya beras, dipercepat dari empat tahun menjadi satu tahun.

"Target awal Bapak Presiden kepada kami empat tahun. Setelah 21 hari menjadi tiga tahun, 45 hari kemudian menjadi satu tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, dua sampai tiga bulan ke depan Indonesia tidak impor lagi," kata Amran.

Menurut Amran, percepatan tersebut tidak terlepas dari kerja keras petani dan dukungan penuh Presiden Prabowo yang terus mendorong peningkatan produksi pangan.

"Bapak Presiden betul-betul fokus pada ketahanan pangan nasional. Beliau ingin petani sejahtera dan Indonesia berdikari pangan," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional tahun

ini telah mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton hingga akhir tahun. Kenaikan produksi sekitar 4 juta ton dibanding tahun lalu menjadi bukti kebijakan pemerintah di sektor pertanian menunjukkan hasil

tahun terakhir di musim paceklik. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan beras nasional yang cukup dan harga di tingkat konsumen yang terkendali.

"Stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,8 juta ton dan ada



nyata.

Amran memaparkan, pada September 2025, deflasi beras tercatat sebesar 0,13 persen, pertama kalinya dalam lima

tahun terakhir di musim paceklik. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan beras nasional yang cukup dan harga di tingkat konsumen yang terkendali. "Stok cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,8 juta ton dan ada tambahan satu juta ton untuk operasi pasar. Ini menandakan pangan kita aman. Bahkan berlebih. Alhamdulillah," terang Amran.

• INFO NASIONAL

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan, FAO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi pangan terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan juga meningkat signifikan menjadi 124,36 poin, jauh di atas target nasional sebesar 110 poin.

"NTP naik berarti petani makin se-

di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati petani dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Amran pun optimistis Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hal tersebut dapat tercapai berkat kerja sama semua pihak, terutama para petani Indonesia.



jahtera. Ini kabar baik untuk rakyat Indonesia, terutama para petani yang sudah bekerja luar biasa," ujarnya.

Amran juga menegaskan pentingnya hilirisasi pertanian untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Semua harus diolah

Program Percontohan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi penduduk. Jika dibandingkan angka kemiskinan pada periode sama 2024 sebanyak 25,22 juta orang, jumlah penduduk miskin selama setahun terakhir

turun 1,37 juta orang.

Penduduk digolongkan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan pada Maret 2025 senilai Rp609.160 per kapita atau meningkat dibandingkan Maret 2024 senilai Rp562.932 per kapita.

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 2,38 juta orang atau 0,85 persen dari total populasi penduduk. Jumlah ini turun 400.000 orang dibandingkan September 2024 dan turun 1,18 juta orang dibandingkan Maret 2024.

Guna mengurangi tingkat kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem, Kementan dan BP Taskin menginisiasi program Pengentasan Kemiskinan di Sektor Pertanian. Model percontohannya bakal dilaksanakan di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.

Kedua instansi pemerintahan itu telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait program itu di Kantor Kementan, Jakarta, pada 14 Oktober 2025. Penandatanganan MoU itu dilakukan Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Amran mengemukakan, mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional. Mewujudkan swasembada pangan juga berarti mengangkat harkat dengan memberdayakan masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian.

Upaya mengentaskan rakyat dari kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan. Keberhasilan pendekatan program pertanian berbasis nama dan alamat (by name by address) yang pernah diterapkan Kementan di salah satu daerah bisa menjadi contohnya.

Amran menjelaskan, waktu itu, tingkat kemiskinan daerah tersebut mencapai 38 persen. Dalam satu hingga dua tahun, tingkat kemiskinan itu dapat ditekan sehingga turun drastis menjadi 8 persen.

"Caranya sederhana, kami mengidentifikasi satu per satu warga miskin di daerah tersebut. Kalau mereka punya lahan, kami bantu tanam dan beri alat pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu

ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Amran.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo juga meminta kesejahteraan petani di Indonesia ditingkatkan. Salah satu contoh konkretnya adalah pemerintah menaikkan harga pembelian gabah kering panen di tingkat petani dari Rp6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp6.500 per kg.

Hasilnya, kenaikan harga gabah dapat mengerek pendapatan petani padi. Salah satu indikatornya, nilai tukar petani (NTP) meningkat menjadi 124,36 pada September 2025. NTP itu jauh melampaui target NTP 2025 yang ditetapkan pemerintah, yakni 110.

Kementan dan BP Taskin sepakat model percontohan program pengentasan rakyat dari kemiskinan di sektor pertanian itu bakal digulirkan di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi. Syarat lainnya, daerah-daerah itu harus memiliki kepala daerah yang dinilai proaktif dan berkomitmen tinggi terhadap perubahan.

Pendekatan yang diusung tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat. Hal itu mulai dari peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil.

Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya. Tujuannya adalah agar intervensi tersebut tidak hanya berdampak lokal, melainkan juga membentuk resonansi ekonomi kawasan.

“Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif di wilayah lain di Indonesia,” kata Amran.

Budiman menuturkan, MoU tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara kedepuyan BP Taskin dan tiga direktorat jenderal Kementan. Koordinasi itu penting guna menentukan 10 daerah yang bakal menjadi model percontohan, sekaligus untuk memastikan akurasi data kemiskinan dan langkah-langkah intervensi agar berjalan selaras dan tepat sasaran.

Rata-rata kabupaten yang akan menjadi lokasi model percontohan memiliki

tingkat kemiskinan 11-15 persen atau di atas rata-rata nasional. Dengan intervensi yang tepat, minimal tingkat kemiskinan di 10 kabupaten itu bisa turun di bawah rata-rata, menjadi 4,4-6 persen.

“Kami akan mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini. Kemu-

ode 2013-2023, jumlahnya bertambah.

Merujuk hasil Sensus Pertanian 2023 yang dilakukan BPS, jumlah petani gurem di Indonesia pada 2023 sebanyak 16,89 juta rumah tangga. Proporsi rumah tangga petani gurem itu terhadap total rumah tangga petani mencapai 60,84 persen.



dian akan kami kaitkan dengan program Kementan di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura,” tuturnya.

Sementara, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengingatkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Oleh karena itu, program pengentasan rakyat dari kemiskinan juga perlu menjangkau mereka.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, jumlah petani gurem di Indonesia masih banyak. Bahkan, selama peri-

Jumlah petani gurem itu melonjak 18,49 persen dari hasil sensus pada 2013. Waktu itu, jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau 55,33 persen dari total rumah tangga petani.

“Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka adalah menyertifikasi lahan, bahkan memberikan tambahan lahan yang dapat diolah mereka. Selain itu, mereka juga perlu mendapatkan bantuan program usaha tani atau peternakan kecil,” katanya. •



KOMITMEN MASUK 5 BESAR LUMBUNG PANGAN NASIONAL

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh kabupaten dan kota di Sumsel dapat bersinergi memperkuat kemandirian pangan. Dimana pangan bukan hanya urusan pemerintah daerah, tapi tanggung jawab bersama, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Herman Deru menyoroti potensi besar sektor pertanian Sumsel yang tersebar di berbagai daerah. Ia menyebut Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan utama dengan luas lahan sawah mencapai 189 ribu hektare dan produksi 1,1 juta ton gabah kering giling per tahun.

Selain Banyuasin, Herman Deru menilai Kabupaten Empat Lawang yang dipimpin Joncik memiliki keunggulan di komoditas kopi. Begitu pula Kabupaten OKI di bawah Muchendi yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan luas, meski masih menghadapi kendala infrastruktur.

"Pemprov Sumsel terus memberikan dukungan agar konektivitas dan sarana produksi di OKI serta daerah lainnya bisa semakin baik," jelasnya.

Tak ketinggalan, Herman Deru juga

menyinggung potensi unggulan Kabupaten OKU yang dikenal dengan komoditas sawit, karet, dan kopi liberika, serta Kabupaten PALI yang merupakan bagian dari segitiga emas Sumsel sebagai daerah penghasil minyak.

Gubernur Herman Deru juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Usai meninjau lokasi penanaman padi apung, Herman Deru mengaku bangga dengan capaian hasil uji coba yang dikelola berbagai lembaga.

"Ini hasilnya membanggakan. Artinya kalau diimplementasikan dengan kondisi seadanya saja bisa berhasil, tentu di lapangan juga akan sukses," ujarnya.

Herman Deru menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dan stakeholder terkait untuk mendorong petani memanfaatkan varietas baru yang ter-

sedia. Menurutnya, benih unggul hasil inovasi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh petani.

Selain soal benih, ia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin petani dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Ia mencontohkan kemudahan akses pupuk yang kini diberikan pemerintah pusat. "Kemudahan ini jangan disia-siakan. Disiplin menjadi kunci," tegasnya.

Herman Deru juga menyoroti strategi peningkatan produksi dengan intensifikasi. Setelah keberhasilan program cetak sawah 48 ribu hektar, kini Sumsel diarahkan pada peningkatan indeks pertanaman. Dengan demikian, produktivitas lahan bisa meningkat tanpa perlu memperluas areal.

"Kita bisa bayangkan kalau bisa panen dua kali dalam setahun, maka kita bisa mengejar capaian provinsi di Jawa. Apalagi saat ini indeks pertanaman kita baru 1,1 kali setahun, tapi sudah masuk lima besar nasional," jelasnya.

Selain itu, ia memberi perhatian khusus terhadap masalah "losis", yakni kehilangan hasil pasca panen akibat cara tradisional yang tidak efisien. Menurutnya, efisiensi harus ditingkatkan agar produksi benar-benar maksimal.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan visinya agar lokasi pengembangan inovasi pertanian bisa sekaligus menjadi tujuan agrowisata. Hal ini dinilai dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pujian dari Kementan atas langkah Sumsel dalam inovasi padi apung dan gerakan mandiri benih juga disambut optimis oleh Gubernur. Menurutnya, capaian ini bukan hanya kebanggaan Sumsel, tetapi juga kontribusi nyata bagi Indonesia.

"Dengan kerja sama semua pihak, kita optimis swasembada pangan dapat terwujud sesuai target nasional," tutup Herman Deru.

Janji Perjuangkan Aspirasi Petani

Komitmen untuk menjadi lumbung pangan nasional ini juga mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang juga selaku Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), H. Saan Mustopa, berjanji mem-

perjuangkan berbagai aspirasi petani agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan Mustopa saat melakukan kunjungan kerja bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru ke Desa Seri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda peninjauan Lumbung Padi Nasional dan Sentra Ketahanan Pangan Utama di wilayah Banyuasin, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan.

Dalam sesi dialog, Saan Mustopa mendengarkan langsung sejumlah keluhan dan masukan dari petani, penyuluh pertanian, serta Brigade Swasembada Pangan terkait tantangan yang

mereka hadapi di lapangan.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan petani adalah kesulitan menjual hasil panen jagung ke Bulog karena kadar air yang belum memenuhi standar penyerapan.

Menanggapi hal itu, Saan Mustopa menegaskan komitmennya untuk mencari solusi bersama pihak terkait.

"Untuk masalah kadar air jagung yang belum sesuai standar 14 persen, akan kami bahas bersama Bulog. Pemerintah juga perlu memperbanyak fasilitas dryer agar kadar air hasil panen bisa memenuhi ketentuan penyerapan," ujarnya.

Selain persoalan teknis, Saan Mustopa menilai pentingnya peningkatan fasilitas pertanian serta penguatan kemitraan antara petani dan lembaga penyangga pangan nasional. ●





ONGKOS HAJI 2026 TURUN MASA TUNGGU JADI 26 TAHUN

DPR bersama pemerintah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan rata-rata Rp87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung oleh jemaah ditetapkan Rp54,19 juta, atau turun Rp1,23 juta dibandingkan biaya tahun lalu.

"Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung rata-rata per jemaah Rp54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPIH. Biaya ini dialokasikan untuk penerbangan, sebagian akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, dalam rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.

Marwan menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara DPR, Kementerian Haji dan Umrah, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan awal pemerintah dibahas pada 27 Oktober 2025 dan disepakati dua hari kemudian.

Semula, pemerintah mengusulkan besaran BPIH Rp88,4 juta per anggota jemaah. Dari total biaya itu, biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibayar

langsung oleh jemaah dipatok Rp54,92 juta (62 persen), sedangkan Rp33,48 juta (38 persen) ditanggung melalui dana nilai manfaat hasil pengelolaan BPKH.

Namun, setelah pembahasan mendalam, BPIH 2026 disepakati Rp87,4 juta. Dari jumlah tersebut, 62 persen atau Rp54,19 juta dibayarkan langsung oleh jemaah, sedangkan 38 persen atau Rp33,21 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

"Setelah dibahas panjang di Komisi VIII DPR, akhirnya menjadi Rp87,4 juta dari berbagai hal yang kita telusuri yang dapat lebih dimungkinkan untuk turun," kata Marwan.

Dengan kesepakatan tersebut, BPIH tahun 2026 turun Rp2 juta dibandingkan 2025 yang sebesar Rp89,41 juta per anggota jemaah. Sementara ongkos yang dibayar langsung oleh jemaah juga turun Rp1,23 juta dari Rp55,43 juta pada



2025 menjadi Rp54,19 juta pada 2026.

Penurunan ongkos haji kali ini menjadi yang kedua berturut-turut sejak 2025. Sebelumnya, ongkos yang dibayarkan jemaah haji 2025 juga turun Rp600.000 dibanding tahun sebelumnya. Tren penurunan ongkos berlanjut pada haji 2026 yang turun hingga Rp1,23 juta per anggota jemaah. Padahal, pada haji 2016 hingga 2024, ongkos haji selalu naik tiap tahun.

Adapun total nilai manfaat yang digunakan untuk pembiayaan haji 2026 mencapai Rp6,69 triliun, turun Rp136,06 miliar dibanding tahun sebelumnya. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang riyal Arab Saudi (SAR) dengan kurs acuan 1 dollar AS senilai Rp16.500 dan 1 riyal senilai Rp4.400.

Selain menetapkan biaya, rapat juga menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jemaah, sebagaimana tercantum di Nusuk Mashar Kementerian Haji Arab Saudi. Dari jumlah itu, 203.320 anggota jemaah (92 persen) dialokasikan untuk haji reguler dan 17.680 anggota jemaah (8 persen) untuk haji khusus.

Kuota reguler mencakup 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), 1.050 petugas haji daerah (PHD), serta 201.585 anggota jemaah reguler murni.

"Komposisi ini menjadikan jemaah haji Indonesia daftar tunggunya seluruhnya sama menjadi 26 tahun," ujar Marwan.

Ia melanjutkan, penurunan ongkos haji tidak akan mengorbankan kualitas layanan. Dalam raker disepakati, lama masa tinggal jemaah di Arab Saudi rata-

rata 41 hari. Jemaah mendapat makan 27 kali di Madinah, 84 kali di Mekkah, serta 15 kali di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menu bercita rasa Nusantara dengan bahan baku dan juru masak asal Indonesia.

Akomodasi di Mekkah ditetapkan paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Pesawat yang digunakan wajib berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar kea-



• INFO NASIONAL

manan internasional.

Layanan tenda di Mina ditegaskan harus nyaman dan profesional serta tidak ada jemaah yang ditempatkan di kawasan Mina Jadid. Setiap jemaah juga akan menerima biaya hidup 750 riyal Arab Saudi atau setara Rp3,3 juta.

"Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa pelayanan tetap terbaik bagi jemaah. Baik pemon-

terjangkau bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Kementerian Haji dan Umrah juga mengapresiasi Panja BPIH dan seluruh anggota Komisi VIII DPR yang rela meninggalkan masa reses untuk fokus membahas biaya haji 2026. Tindakan tersebut merupakan bentuk pengorbanan dan dedikasi demi mewujudkan harapan Presiden Prabowo dan umat



dokan, konsumsi, maupun transportasi, semua dikunci dengan kualitas terbaik," ucap Marwan.

Komitmen Prabowo

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menuturkan, kebijakan penurunan ongkos haji merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut akhirnya disambut dengan baik oleh DPR yang sejalan ingin membuat ongkos haji lebih

Muslim di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan ekonomi, menurut Dahnil, seharusnya biaya haji 2026 naik sekitar Rp2,7 juta per jemaah. Hal itu lantaran terjadi kenaikan kurs dolar AS dari sebelumnya Rp16.000 menjadi Rp16.500. Namun pemerintah dan DPR berupaya maksimal untuk mengurangi komponen-komponen yang dianggap tidak efisien.

"Kami mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisien-

sikan. Akhirnya disepakati turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah," ucap Dahnil.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, meminta agar pada tahun-tahun mendatang penurunan biaya haji lebih banyak menyentuh porsi ongkos haji yang dibayarkan jemaah. Dengan demikian, beban calon jemaah haji dapat semakin ringan seiring upaya pemerintah menekan biaya haji secara keseluruhan.

"Mudah-mudahan tahun yang akan datang penurunan pembiayaan itu sebagian besarnya bukan untuk BPIH-nya, tetapi untuk Biph-nya yang ditanggung oleh jemaah. Per hari ini masih lebih banyak yang ditanggung calon jemaah ketimbang yang dibayarkan oleh BPKH. Ke depan kita berharap ini bisa balance," ujarnya.

Menurut Hidayat, penurunan ongkos haji merupakan langkah positif. Namun, ruang efisiensi masih terbuka karena ada sejumlah aspek yang dapat dibahas lebih lanjut agar biaya bisa ditekan lebih besar lagi.

Dalam laporan Kementerian Haji dan Umrah, lanjutnya, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat menurunkan biaya penyelenggaraan haji secara signifikan. Salah satunya melalui penerapan sistem multi-use dalam penyewaan hotel dan transportasi agar harga menjadi lebih kompetitif.

Ia juga menyoroti usulan untuk memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi dari 41 hari menjadi lebih singkat. "Kalau itu bisa dilakukan, maka pengurangan itu juga pasti akan berdampak pada pengurangan pembiayaan," ujarnya.

Hidayat juga mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah memastikan persoalan syarikah atau kemitraan tidak terulang, seperti yang pernah terjadi tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia meminta pengawasan lebih ketat agar pelaksanaan haji lebih tertib dan profesional.

"Kita harap pengalaman tahun yang lalu betul-betul dimaksimalkan di Kementerian Haji dan Umrah, sehingga yang baik akan dilanjutkan dan yang tidak baik dipastikan tidak terulang," katanya. ●

JMSI DAN ACJA DIRIKAN RUMAH WARTAWAN TIONGKOK-INDONESIA

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Asosiasi Wartawan Seluruh Tiongkok (All China Journalists Association/ACJA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan saling pengertian, pertukaran, dan kerja sama di antara para profesional media kedua negara.

MoU tersebut ditandatangani Sekretaris Eksekutif ACJA Wu Xu dan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa di gedung VOI Media Jalan Tanah Abang III, Jakarta, hari Selasa, 28 Oktober 2025.

"ACJA dan JMSI sepakat untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran, dan bersama-sama mempromosikan pembangunan "Rumah Wartawan Tiongkok-Indonesia" melalui kegiatan seperti pertukaran personel, seminar berita, dan pertemuan budaya," ujar Ketua Umum JMSI Teguh Santosa.

Dia mengatakan, hubungan baik kedua organisasi telah berlangsung sejak lama, sejak Belt and Road Journalist Network (BRJN) didirikan pada tahun 2017 di Beijing di mana Teguh Santosa hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan itu.

"Pendirian wadah ini sejalan dengan slogan kerja JMSI bahwa wartawan profesional bekerja di perusahaan pers yang



profesional," sambungnya.

Sementara Sekretaris Eksekutif ACJA Wu Xu menggarisbawahi arti penting kerja sama masyarakat pers kedua negara dalam kerangka yang lebih besar, yakni hubungan baik Tiongkok dan Indonesia di berbagai bidang sejalan dengan Belt and Road Initiative yang dikem-

bangkan Presiden Xi Jinping.

Dia menambahkan, "Rumah Wartawan Tiongkok-Indonesia" akan mengorganisir dan mengirimkan delegasi wartawan untuk kunjungan timbal balik. Selain itu, menyelenggarakan kegiatan pelaporan bersama yang berfokus pada tema Belt and Road Initiative.

"R u m a h Wartawan Tiongkok-Indonesia" juga mendorong pengorganisasian dan partisipasi dalam kegiatan pelatihan wartawan serta mendukung pertukaran dan kerja sama antar sekolah jurnalistik di kedua negara. •



ARA PUTAR OTAK CARI DANA BANGUN 3 JUTA RUMAH

Program pembangunan tiga juta rumah ternyata tak semudah yang dijanjikan. Prabowo Subianto, pada masa kampanye pemilihan presiden, menjanjikan pembangunan 1 juta rumah di perdesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan per tahun. Dalam kenyataannya, target itu masih jauh dari tercapai.

Sejumlah program telah dijalankan untuk mencapai 3 juta rumah yang menysasar masyarakat berpenghasilan rendah, di antaranya program rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan skema subsidi uang muka rumah.

Selain itu, skema bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang menysasar perdesaan. Skema lainnya adalah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Terbaru, pada 21 Oktober 2025, pemerintah juga menggulirkan skema kredit perumahan melalui KUR Perumahan, meliputi pembiayaan Rp113 triliun untuk sisi suplai atau kontraktor serta Rp17 triliun untuk sisi permintaan.

Meski bauran program telah dijalankan, capaian target 3 juta rumah masih jauh dari harapan. Dari data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), penyaluran FLPP per 20 Oktober 2025 tercatat baru 203.439 unit rumah atau 58,12 persen.

Sementara itu, penyaluran BSPS berkisar 23.500 unit atau 52,1 persen dari total kuota tersedia 45.073 unit. Dalam sisa waktu dua bulan hingga akhir tahun ini, sejumlah kalangan menilai program 3 juta rumah akan sulit tercapai.

Ketua Majelis Tinggi Organisasi Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (The HUD Institute), Suharso Monoarfa, mengungkapkan, hingga saat ini, kebijakan dan implementasi program 3 juta rumah masih menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang dicanangkan dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Kontribusi FLPP paling besar hanya



10-15 persen dari target 3 juta rumah karena suplai berbasis sektor swasta dan pengembang. Apabila program 3 juta rumah lewat kredit perumahan dipaksakan untuk dikejar demi target administratif, dikhawatirkan banyak akad kredit perumahan yang tidak tepat sasaran.

Tantangan juga bertambah karena program 3 juta rumah sudah tidak lagi masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN). Sehingga, perlu kejelasan arah baru dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Diperlukan strategi baru yang lebih fokus, baik dalam program rumah susun di Jabodetabekpunjur maupun BSPS.

"Bagaimana dengan peta jalan program 3 juta rumah? Masyarakat perlu penjelasan bagaimana mencapai semua itu," kata mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2019-2024 dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan, Indonesia tengah menghadapi kekurangan (backlog) perumahan, yakni 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah serta 26,9 juta keluarga menetap di kawasan dan permukiman tidak layak huni.

"Ini pekerjaan rumah besar", ujar Agus.

Pihaknya saat ini mengawal FLPP yang terus diperluas Sasarannya dengan target penyaluran kredit rumah bersubsidi ditingkatkan dari 200.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun. Kredit rumah bersubsidi itu memiliki suku bunga tetap (fix rate) 5 persen per tahun dengan tenor 15-20 tahun.

Selain itu, penyaluran BSPS dan KUR perumahan untuk menjawab kebutuhan kredit di sisi suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, KUR perumahan diharapkan menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan di seluruh Indonesia, seperti pengembang lokal, UMKM, dan pengusaha bahan material.

Dari sisi permintaan, KUR itu dinilai akan memberikan akses pembiayaan bagi keluarga muda serta pekerja sektor informal.

Sektor perumahan bisa menggerakkan 185 industri terkait bidang perumahan, mulai dari bahan bangunan hingga peralatan rumah tangga. Oleh karena itu,

sektor perumahan perlu terus dikawal dengan melibatkan investor, perbankan, dan pengembang.

"Memang sama sekali tidak mudah membangun 3 juta rumah. Ini membutuhkan investasi, kebersamaan," ujar Agus.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, beberapa waktu lalu, menyebutkan, UMKM

rendah dari suku bunga perbankan.

"KUR Perumahan melalui kredit program perumahan sangat penting bagi UMKM agar naik kelas dalam ekosistem perumahan rakyat. Adanya KUR merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia karena baru pertama kali diluncurkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan memerlukan dukungan dari Kadin Indonesia dan Danantara In-



akan bisa meningkat usahanya dan makin naik kelas dengan memanfaatkan kredit program perumahan. Pemerintah menyediakan kredit modal kerja dan kredit investasi dari sisi penyediaan dan permintaan, sehingga diharapkan mampu mendorong capaian program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

UMKM bisa memanfaatkan KUR Perumahan karena pemerintah menanggung suku bunga 5 persen dan lebih

donesia, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Tahun ini, kuota FLPP untuk rumah subsidi juga ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Pemerintah optimistis target penyaluran rumah subsidi tahun 2025 sebanyak 350.000 unit dapat tercapai, seiring kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang yang terus memperluas



akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, berpendapat, kebijakan pemerintah memperluas batasan gaji masyarakat berpenghasilan rendah penerima FLPP, yakni dari maksimum Rp8 juta menjadi Rp14 juta per bulan dinilai dapat memicu ketimpangan penyaluran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan Rp4-8 juta.

Dengan kuota FLPP yang dibatasi 350.000 unit per tahun, penyaluran program rumah bersubsidi itu berpotensi lebih banyak terserap oleh masyarakat berpenghasilan bulanan Rp8-14 juta. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah Rp4-8 juta per bulan berpotensi semakin tidak tersentuh program rumah subsidi.



Bagaimana dengan peta jalan program 3 juta rumah? Masyarakat perlu penjelasan bagaimana mencapai semua itu.

Zulfi menilai, sejumlah pembenahan diperlukan agar program 3 juta rumah dapat terlaksana optimal pada 2026. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan sebelum melangkah ke program 3 juta rumah.

Kementerian PKP yang baru berdiri selama setahun dinilai perlu fokus terlebih dulu untuk membenahi regulasi, mulai dari pembentukan nomenklatur baru kementerian hingga pembenahan regulasi teknis dan data sebaran kebutuhan rumah agar tepat sasaran. Peta jalan 3 juta rumah juga perlu ditopang regulasi dan konsolidasi lintas kementerian/lembaga.

Pemerintah dinilai perlu lebih fokus memastikan FLPP tepat sasaran dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan Rp4-8 juta yang kesulitan mengakses rumah terjangkau. Program FLPP yang telah berjalan selama 15 tahun dinilai tidak perlu banyak intervensi regulasi, tetapi dibutuhkan pengawasan agar tepat sasaran dan tepat mutu.

Guna mengejar target 3 juta rumah,

pemerintah juga perlu fokus pada penataan kawasan kumuh perkotaan. Penataan kawasan kumuh merupakan bagian integral dari penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat urban. Pemerintah perlu membangun rumah susun perkotaan dengan ketinggian 4-20 lantai, melalui mekanisme sewa, sewa-beli, atau beli.

"Kalau penanganan kumuh diabaikan, maka pembangunan tiga juta rumah tak akan bermakna secara sosial. Rumah baru boleh berdiri, tapi kawasan lama semakin memburuk sehingga ketimpangan akan semakin dalam," tuturnya.

Sementara itu, kredit program perumahan yang menasar perdesaan dan pesisir dinilai perlu didukung kesiapan regulasi, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mekanisme pengawasan. Penerapan KUR Perumahan juga perlu dibarengi penguatan perumahan berbasis komunitas, yakni melibatkan koperasi, kelompok, dan komunitas untuk membangun rumah.

Hingga saat ini, sebanyak 82 persen penyediaan rumah di Indonesia disediakan oleh swadaya masyarakat dan komunitas. Sementara itu, program perumahan bersubsidi melalui dana APBN hanya memenuhi 18-20 persen dari ketersediaan rumah.

Perumahan komunitas berbasis koperasi syariah, kelompok/organisasi, selama ini kerap terkendala akses perizinan dan akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah perlu sosialisasi, memberikan stimulan kemudahan perizinan dan pemberian sertifikat serta akses pembiayaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Junaidi Abdillah, mengemukakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan program kerjanya belum berjalan maksimal. Penambahan kuota FLPP berlangsung di pertengahan tahun sehingga sulit mengejar.

Di sisi lain, banyak perubahan tata ru-

ang yang menyebabkan status lahan dari awalnya perumahan menjadi lahan produktif menghambat pembangunan perumahan.

Sementara itu, kondisi ekonomi yang melemah membuat penyerapan rumah bersubsidi ikut turun. Pada 2026, program 3 juta rumah diharapkan bisa berjalan dengan target FLPP yang dipastikan sejak awal tahun.

Pekerjaan rumah besar pemenuhan perumahan rakyat masih menanti dituntaskan. Sejumlah tantangan menjadi pembelajaran. Pembinaan diperlukan agar program ambisius 3 juta rumah bisa melaju di tahun

2026 dan tidak hanya berujung pada slogan.

Pengembang Melantai di Bursa

Di tengah peliknya persoalan pendanaan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait muncul dengan gagasan lain. Dia mendorong pengembang rumah bersubsidi mencari dana di pasar modal, dengan menggelar initial public offering (IPO).

Menurut Ara, IPO menjadi alternatif yang menguntungkan agar pengembang tak terlalu bergantung pada perbankan.

"Bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan," kata Ara usai pertemuannya dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurutnya, hal ini juga dilakukan untuk mendukung terserapnya kuota FLPP 2025 sebanyak 350.000 unit rumah subsidi.

"Bank memilih developer (pengembang) siapa yang mau dibiayai, seba-

liknya developer juga bisa memilih ya. Ini adalah sesuatu yang sehat, jadi semua punya pilihan-pilihan, ini ekosistem yang kita mau bangun," ujar Ara.

Direktur Utama PT Bangun Karawang Megah, Deddy Indrasetiawan, mengatakan, rencana tersebut bisa memudahkan pengembang untuk mendapatkan permodalan selain perbankan, sehingga bebas bunga.

"Kalau pasar saham, kita IPO itu terutama nanti kita kalau butuh modal lagi kita right issue. Itu permodalan lain yang paling murah kan, daripada menggunakan kredit dari bank," katanya usai menerima kunjungan Menteri PKP, Maruarar Sirait, ke perumahan Citra Mulia Megah di Karawang, Jawa Barat, Senin, 27 Oktober 2025.

Deddy juga mengatakan telah memiliki perusahaan properti yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Nama anak perusahaannya Serasi Indah dan Alam Elok. Dua perumahan, itu 30 hektar dan 60 hektar," ujarnya.

Presiden Komisaris PT Buana Capital Sekuritas, Pieter Tanuri, mengatakan, telah berkomunikasi dengan pengembang rumah subsidi dan mengaku terkejut karena mereka memperoleh keuntungan yang cukup baik. Karenanya, Pieter berbicara dan memberi usulan kepada Ara untuk melibatkan pasar modal dalam ekosistem rumah subsidi.

"Kenapa enggak dibantu dari pasar modal supaya selain dari hutang bisa juga dari equity, dari capital market, dari saham saya bilang," ucap Pieter.

Pieter mengatakan, keterlibatan pasar modal dalam ekosistem rumah subsidi bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengembang. Apalagi, pembiayaan perbankan yang berjalan saat ini memberikan bunga.

"Capital market kan enggak ada bunga, jadi modal tanpa bunga kemudian juga dengan mempunyai modal yang lebih besar, tentunya bisa meminjam ke perbankan lebih besar lagi, ujung-ujungnya bisa membangun rumah lebih banyak lagi," kata Pieter. ●





Gubernur Herman Deru Siap Realisasikan PROGRAM 3 JUTA RUMAH MENTERI PKP SUMSEL LAYAK JADI PERCONTOHAN NASIONAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung program tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk mendukung penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Provinsi Sumsel menjadi salah satu daerah yang sudah selesai semua merubah regulasi berkaitan dengan percepatan perizinan, dalam mendukung penyediaan perumahan MBR di provinsi Sumsel.

Sesuai peruntukannya, program pembangunan tiga juta rumah bertujuan menyediakan akses rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pekerja sektor informal, warga desa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Kemudian meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah, serta

mendorong kolaborasi multipihak pemerintah, BUMN, swasta, lembaga keuangan, koperasi, dan komunitas lokal dalam membangun perumahan.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dengan pemanfaatan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi lewat penyusunan program bersama untuk mengatasi kemiskinan, terutama terkait pemenuhan hunian layak, sanitasi, dan penataan kawasan.

"Bapak Presiden menekankan sekali agar kita semua bekerja dengan data yang sama. Pak Gubernur yang hadir di sini mohon duduk bersama BPS duduk,

bikin forum satu data daerah supaya kita punya data," katanya.

Khusus untuk perumahan dalam kota lanjut Fahri, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian PKP untuk menggunakan tanah-tanah dalam kota untuk menjadi hunian vertikal seperti rumah susun.

"Pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota, kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun, kita hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi elemen subsidi bagi negara, setelah tanahnya bersih, izinnnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti di biaya itu ditambah dengan keuntungannya. Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa," tuturnya.

Dikatakannya saat ini, potensi lahan rumah dari aset Badan Bank Tanah di seluruh Indonesia mencapai 36.116 hektar (ha) dengan 485 ha di antaranya adalah potensi lahan di desa.

"Sementara potensi lahan dari tanah terindikasi terlantar mencapai 79.925 hektar dengan 683 hektar diantaranya berada di desa. Selain itu terdapat potensi dari tanah kas desa yang memiliki luas 17.496.424 hektar," tambahnya.

Usulkan Perbaikan Rusun

Salah satu bukti nyata untuk mendukung Program 3 Juta Rumah ini, Gubernur Sumsel H Herman Deru launching Program Gerakan Benerin Rumah Agar Layak (Gebrak) Tahun 2025 inisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Program Gebrak Rumah ini dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah, Anggota Komisi V DPR, H. Ishak Mekki serta Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Sri Haryati.

Menurut Gubernur Herman Deru program Gebrak juga selaras dengan Gerakan Bedah Rumah Serentak Se Sumatera Selatan yang telah berjalan selama ini.

"Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal hunian yang layak dan sehat," ucap Herman Deru.

Dikatakan Herman Deru, dalam mendukung dan mewujudkan program 3 juta rumah pemerintah pusat di Sumsel, pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD bisa juga dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan BUMN/BUMD dan badan Amil zakat di Sumatera Selatan.

"Kita dapat mewujudkan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan dengan pembiayaan melalui kolaborasi bersama BUMN/ BUMD, Amil Zakat di Sumatera Selatan. Saya berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka," tambahnya.

Herman Deru mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka

masyarakat.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam program ini. Saya berharap Gebrak dapat menjadi contoh bagi program-program lainnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.

Herman Deru juga meminta kepada Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Sri Haryati untuk mendorong

sebanyak 3 juta rumah dimana 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

la mengatakan dalam mewujudkan pekerjaan tersebut harus dilakukan secara gotong royong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Untuk memabangun 3 juta rumah ini harus dilakukan dengan gotong royong dalam mewujudkannya. Alhamdulillah hari ini kita launching 70 rumah yang akan direnovasi di Palembang. ini meru-



Perumnas agar segera mungkin bergerak terkait dengan perbaikan rumah susun yang ada di Kota Palembang agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan ruang terbuka hijau.

Dalam kesempatan itu Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Sri Haryati menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar segera melakukan perbaikan rumah tidak layak huni di Indonesia

pakan wujud nyata dalam mendukung terwujudnya program 3 juta rumah tersebut," tuturnya

Selanjutnya dia mengatakan pikanya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sangat terbuka untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menuntaskan permasalahan pemukiman yang kurang layak di Sumatera Selatan. •ADV



TIMNAS INDONESIA DIPASTIKAN TANPA PELATIH

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan belum akan merekrut pelatih baru usai memecat Patrick Kluivert dan timnya meski telah memasuki jadwal FIFA Matchday pada November ini. Sementara berbagai usulan nama mulai bermunculan, termasuk kembali merekrut Shin Tae Yong.

Atas keputusan PSSI ini, FIFA Matchday November 2025 resmi off untuk Timnas Indonesia karena belum punya pelatih baru. Ketua Umum, Erick Thohir dan Direktur Teknik Alexander Zwiers masih menjangir nama-nama kandidat yang akan diputuskan lewat rapat Exco.

PSSI memilih waktu tenang untuk menentukan arsitek baru, bukan di tengah euforia, bukan juga di masa frustrasi. Bahkan rencana besarnya, pelatih baru siap tempur untuk FIFA Matchday Maret 2026.

Artinya, pecinta sepakbola tanah air harus menunggu lebih lama untuk mengetahui sosok pelatih baru Timnas Indonesia. PSSI tidak mau buru-buru menentukan pengganti Patrick Kluivert.

Keputusan itu tentu membuat banyak spekulasi. Beberapa pengamat, mantan pemain serta pelatih mulai menyodorkan nama untuk diusulkan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Bahkan nama Shin Tae Yong kembali masuk daftar usulan.

Mantan pemain Timnas Indonesia Greg Nwokolo berharap PSSI menunjuk mantan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sebagai juru taktik skuad Garuda selanjutnya. Jika bukan Thomas Doll, Greg berharap Timnas Indonesia ditangani

pelatih berkarakter kuat seperti juru taktik asal Jerman tersebut.

"Saya akan pilih Thomas Doll. Saya melihat ketika dia melatih, dia merupakan pelatih besar dan bukan pelatih biasa. Kita bicara tim nasional, kita di sini

mang bagus. Lalu secara karakter cara melatihnya mungkin juga cocok dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh tim nasional. Di mana Bojan Hodak menerapkan defense counter cara bermain bolanya," kata Atep.



untuk Indonesia bukan karena kita banyak pemain keturunan dari Belanda, kita ambil pelatih dari Belanda," kata Greg.

"Sebenarnya pelatih Timnas Indonesia tidak harus Thomas Doll. Tapi, kalau harus mencari nama lain, saya harap pelatihnya yang seperti dia," lanjut Greg.

Sementara mantan pemain Timnas Indonesia Atep Rizal menyebut pelatih Maung Bandung Bojan Hodak cocok sebagai pengganti Patrick Kluivert. Ia tak meragukan kemampuan Bojan Hodak jika melihat prestasinya menangani Persib dengan mempersembahkan dua trofi Liga Indonesia secara beruntun.

"Secara prestasi Bojan Hodak dia me-

Di sisi lain Atep juga mengatakan wajar Shin Tae-yong masih didambakan suporter sebab pelatih Korea Selatan itu sudah memberikan prestasi yang cukup baik di dunia sepakbola Indonesia.

"Sah-sah saja, karena secara prestasi Shin Tae-yong memberikan banyak pencapaian. Kita beberapa kali lolos ke Piala Asia dan juga sampai ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia," ucap Atep.

"Artinya, netizen masih merindukan kehadirannya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan pelatih yang lebih bagus, kenapa tidak? Masih banyak pelatih bagus di Eropa," tambahnya.

Usulan lain disampaikan Cristian Gon-

zales yang mendorong pelatih lokal menjadi juru taktik skuad Garuda. Melihat materi mewah di skuad Timnas Indonesia saat ini, ia menilai tak ada salahnya memercayakan kursi pelatih skuad Garuda kepada juru taktik lokal.

"Dengan materi pemain sekarang, kenapa tidak coba pelatih lokal? Bisa siapa pun, bisa Firman Utina," kata Cristian Gonzales,

"Masalah bahasa saya pikir tidak masalah. Banyak pelatih asing di Liga

Indonesia.

Ia mengatakan pecinta sepakbola Tanah Air harus *move on* alias melupakan juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

"Kita kan mesti *move on*. Kita juga *move on* dengan Shin Tae-yong," kata Erick Thohir.

"Untuk tim nasional, kalau enggak perform ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara pribadi saya kurang gitu suka, karena membangun strata kepelatihan

Sementara sekretaris Timnas Indonesia, Ricky Riskandi, mengungkap kepribadian unik Shin Tae-yong selama menangani skuad Garuda.

Ia menyebut Shin sosok yang menyenangkan dan humoris, namun tak semua bisa bekerja dengannya karena gaya komunikasinya yang tegas.

Menurut Ricky, hanya mereka yang tidak baperan yang bisa bertahan lama bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan itu.



Indonesia tetap memakai bahasa Inggris (dan tidak bisa bahasa Indonesia)," lanjut Cristian Gonzales.

"Mungkin jika pelatih asing, PSSI bisa memberi kesempatan lagi ke Luis Milla," ucap Cristian Gonzales.

Tidak Ada Lagi Nama Shin Tae Yong

Meski nama Shin Tae Yong banyak diusulkan para pecinta sepakbola tanah air namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan tidak akan merekrut Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas

itu perlu waktu," tegas Erick Thohir.

"Waktu saya masuk PSSI itu kan jelas, antara Shin Tae-yong dan Indra Sjafri tidak bisa komunikasi. Masing-masing senior, masing-masing punya, ya kan tidak mudah. Baru terakhir zamannya Patrick (Kluivert) kita bisa bikin strata. Tapi, itu pun karena gagal ya, gimana ya kan?" kata pria 55 tahun ini.

"Sekarang kalau ditanya pusing enggak? Pusing. Kenapa? Ini kan hilang pelatih senior, U-20 dan U-23," ujar eks presiden Inter Milan ini.

"Sejujurnya, coach Shin Tae-yong orangnya asyik banget. Tetapi, kalau orang yang baperan, mungkin sangat sulit," ujar coach Ricky.

"Karena, bercandanya STY selayaknya seperti ayah dengan anak, terkadang, misalnya ada stik, dia bukannya memukul dengan kencang. Kayak memukul seperti menyentuh itu, tetapi sembari tersenyum. Saya juga merasakan seperti itu. Memang orangnya sangat humble sekali menurut saya," lanjutnya. ●

HARAPAN

Rusdiyono

Sebuah surat yang ditulis tangan menyentuh hati Presiden Prabowo Subianto dari seorang anak bernama Muhammad Daffa Raasyid. Dia adalah siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama II Bandung Barat.

Dalam suratnya yang dibagikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Muhammad Daffa Raasyid mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Presiden Prabowo atas kehadiran Sekolah Rakyat yang telah memberinya kesempatan untuk kembali belajar bersama teman-temannya.

Daffa meyakini sekolah tersebut akan menjadi wadah yang membentuk generasi muda Indonesia menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, dan berjiwa kepemimpinan seperti Presiden Prabowo.

Sekolah Rakyat akan menjadi pijakan penting bagi masa depan Daffa dan teman-teman sebayanya. Dengan penuh semangat, ia menuliskan harapan bahwa sepuluh tahun mendatang mereka akan menjadi generasi sukses yang mampu membangun negeri, seraya menutup pesannya dengan kalimat menyentuh.

"Tunggu kami ya, Pak," tulisnya penuh semangat.

Surat kecil dari Daffa menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan pendidikan, ada asa besar generasi muda Indonesia yang terus tumbuh, menyambut masa depan dengan ilmu, semangat, dan cinta Tanah Air.

Memang, bagi sebagian anak muda dari keluarga miskin, tiket untuk meraih pendidikan tinggi mungkin hanya menjadi impian yang tidak mudah untuk mereka akses.

Impian yang sulit untuk diwujudkan itu, hanya ada di masa lalu. Kini, dengan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, mimpi untuk kuliah di perguruan tinggi itu sangat terbuka bagi siapapun, asalkan memiliki kemauan.

Pemerintah membuka program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).

Meskipun baru berjalan, dan di beberapa daerah belum dibuka, Sekolah Rakyat telah memberi kabar gembira dan harapan mengenai masa depan yang lebih baik bagi para siswanya.

Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sejumlah siswa di Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan

dan beasiswa untuk kuliah. Jaminan pekerjaan itu akan diberikan oleh pemerintah setelah para siswa itu lulus.

Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk memfasilitasi anak-anak potensial dari keluarga tidak mampu agar bisa sekolah hingga setidaknya lulus SMA atau SMK.

Sekolah Rakyat yang semua muridnya mendapatkan fasilitas gratis itu tujuan utamanya untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Saat ini, sekitar 165 unit Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan akan menyusul sekolah yang sama di masa mendatang.

Dengan menghabiskan waktu lebih lama di sekolah, misalnya sampai perguruan tinggi, anak-anak itu memiliki peluang lebih besar tidak akan mewarisi kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya. Anak-anak itu, nantinya diharapkan bisa menjamin kehidupan bapak ibunya menikmati masa tua, dengan bahagia dan sejahtera.

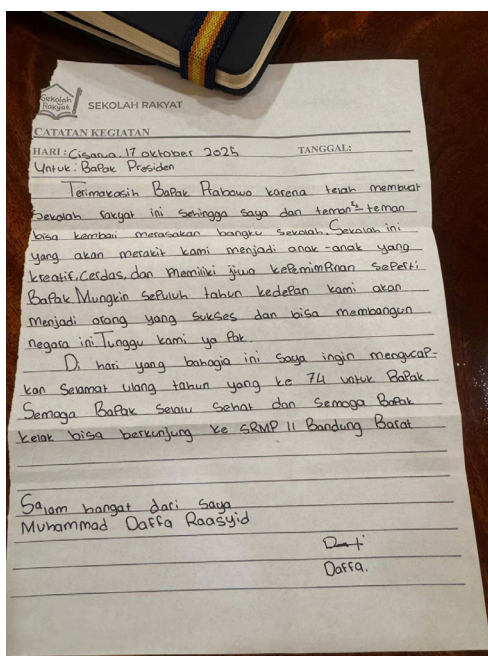
Anak-anak potensial dari keluarga tidak mampu dididik secara menyeluruh lewat pengasuhan selama 24 jam di asrama. Karena berada di asrama, anak-anak itu bukan hanya dibimbing secara intensif mengenai pelajaran formal di sekolah, tapi juga mengenai penguatan mental dan sosial untuk bekal mereka menyongsong hidup yang lebih baik di masa depan.

Bukan hanya fasilitas yang disediakan kepada para murid di sekolah itu, melainkan juga para guru kompeten yang diseleksi ketat oleh pemerintah. Dengan gabungan fasilitas dan guru pengampu yang memiliki kualitas serta dedikasi tinggi, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan memiliki kualitas di atas rata-rata.

Anak-anak di Sekolah Rakyat juga difasilitasi untuk mengembangkan talenta yang dimiliki, sehingga betul-betul menjadi pribadi unggul dan percaya diri menghadapi masa depan, dengan segala tantangannya.

Meskipun bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, fasilitas pendidikan tinggi untuk anak-anak lulusan Sekolah Rakyat itu, tentu bukan hanya untuk keperluan mendapat pekerjaan. Secara kualitas, mereka yang lulus dari perguruan tinggi itu akan berbeda dengan lulusan sekolah di bawahnya.

Pendidikan tinggi bukan sekadar untuk mendapatkan ijazah dan gelar akademik, lalu memiliki pekerjaan mapan, melainkan juga sebagai modal sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya, kelak. ●



DOSA-DOSA EKONOMI REZIM JOKOWI

Kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh menjadi proyek andalan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dinarasikan sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia.

SKANDAL WHOOSH BERMULA DARI PURBAYA TAK MAU BAYAR UTANG

Pada Oktober 2023, Jokowi dengan bangga meresmikannya dan mengatakan bahwa Whoosh hadir sebagai bukti Indonesia mampu bersaing dalam teknologi transportasi modern.

Namun, di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, masalah Whoosh mulai bermunculan, terutama terkait pembayaran utang ke Cina yang mencapai USD7,27 miliar atau Rp110-113 triliun.

Problematika ini mencerminkan realita bahwa kecepatan yang ditawarkan Whoosh telah menyebabkan ketergantungan baru dalam sistem ekonomi global, alih-alih mencerminkan kemajuan teknologi nasional.

Proyek Whoosh memang mengesankan. Dengan kecepatan mencapai 350 kilometer per jam, ia menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, hasil kerja

la menyebut, biaya per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai USD52 juta, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan di negeri asal teknologinya. Dengan total nilai proyek sekitar USD7,3 miliar, di mana 75 persen pendanaannya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), publik pun mempertanyakan transparansi, efisiensi, serta arah pembiayaan proyek yang kini menumpuk utang hingga puluhan triliun rupiah.

Mahfud menyebut, dirinya bukan pihak pertama yang mengangkat isu tersebut. Menurutnya, sumber awal pembahasan mengenai dugaan mark up proyek Whoosh berasal dari program salah satu TV yang menghadirkan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan pada edisi 13 Oktober 2025.

"Semua yang saya sampaikan sumbu-bernya adalah Nusantara TV, Antony

akukan penyelidikan.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," kata Mahfud melalui cuitan di platform X/Twitter pribadinya, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Mahfud lantas mencontohkan kasus penemuan mayat yang berasal dari sistem laporan, di mana kejadian semacam itu tak diketahui aparat.

"Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan," ujarnya.

Mahfud menilai janggal jika lembaga



sama perusahaan Indonesia dan Cina.

Namun, secara ekonomi, proyek ini menghadirkan paradoks yang sulit diabaikan. Biaya yang semula diperkirakan sekitar USD6 miliar (Rp99,4 triliun) kini melonjak hingga lebih dari USD7,3 miliar (Rp120,9 triliun)

Isu dugaan penggelembungan biaya mencuat setelah Mahfud MD, lewat kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan Whoosh dan proyek serupa di Tiongkok.

Budiawan dan Agus Pambagyo yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast 'Terus Terang,'" tuturnya.

Mantan Menkopolkam era Presiden Jokowi itu mengaku merasa aneh dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya melaporkan dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh. Padahal, dalam hukum pidana, aparat penegak hukum (APH) bisa langsung turun tangan mel-

sebesar KPK tidak mengetahui bahwa perbincangan mengenai dugaan mark up proyek tersebut yang sudah lebih dulu disiarkan secara terbuka oleh stasiun TV sebelum dirinya membahasnya.

Selain itu, Mahfud menyarankan agar KPK memanggil dirinya apabila membutuhkan keterangan lebih lanjut seputar informasi tersebut. Termasuk, orang-orang yang mengangkat isu tersebut pertama kalinya.

"Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut.

Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," katanya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh sudah dilakukan sejak awal 2025. Namun, KPK belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai perkembangannya pada tahap penyelidikan.

"Jadi memang ini masih terus berproses dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 27 Oktober 2025.

Budi juga masih enggan membahas soal calon tersangka dalam perkara ini. Dia menegaskan, penyidik masih fokus untuk menemukan unsur-unsur dugaan korupsi yang terjadi di Whoosh.

"Ini masih di tahap penyelidikan ya, jadi masih fokus untuk mencari keterangan-keterangan terkait unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi, unsur-unsur peristiwanya, peristiwa adanya dugaan tindak pidana korupsinya," tuturnya.

Budi juga enggan menjelaskan sudah sejauh mana tahap penyelidikan ini. Termasuk belum mengungkapkan pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Dia memastikan tidak ada kendala pada proses penyelidikan ini.

Budi juga merespons tuduhan KPK takut mengusut kasus dugaan korupsi Whoosh. Sebab, setiap proses hukum yang ditangani pasti membutuhkan waktu.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan, pembangunan transportasi massal, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukanlah proyek yang dinilai dari keuntungan finansial, melainkan dari manfaat sosial yang dihasilkan. Sebab, pembangunan moda transportasi umum merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan, kemacetan di kawasan Jakarta dan sekitarnya telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Perhitungan pemerintah menun-

unjukkan, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, sedangkan jika digabung dengan wilayah Jabodetabek dan Bandung nilainya melebihi Rp100 triliun.

"Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial. Contoh seperti kereta cepat, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu," tutur Jokowi.

Dia menambahkan, subsidi yang diberikan pemerintah terhadap proyek transportasi publik tidak bisa dipandang sebagai kerugian, melainkan sebagai bentuk investasi sosial. Subsidi tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat

tetap diteruskan.

"Dia seharusnya yakinkan Jokowi untuk tidak meneruskan Whoosh karena barang busuk. Kenapa diteruskan?" tanya Muslim.

Muslim melanjutkan, Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan saat itu bahkan tidak setuju terhadap proyek Whoosh ini, hingga akhirnya dia terdepak dari kursinya.

"Padahal Jonan berprestasi, termasuk saat membenahi KAI hingga saat ini," kata Muslim.

Harus Transparan

Komisi III DPR meminta KPK mengusut dugaan korupsi Whoosh secara transparan dan tanpa pandang bulu. Langkah ini dinilai penting untuk men-



berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum agar efisiensi ekonomi dapat tercapai.

Jokowi optimistis, proyek Whoosh akan semakin efisien seiring meningkatnya jumlah penumpang. Terlebih, data menunjukkan, kereta cepat saat ini telah mengangkut lebih dari 12 juta penumpang, sementara rata-rata pengguna harian mencapai sekitar 19.000 orang.

"Kalau setiap tahun naik terus, orang berpindah, maka kerugiannya akan semakin mengecil," ucapnya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyebut, KPK seharusnya segera menetapkan Jokowi dan mantan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Whoosh.

Karena, Luhut sudah menyatakan bahwa Whoosh merupakan barang busuk sejak awal. Artinya, Luhut sudah tahu bahwa Whoosh barang busuk, tapi

jawab keresahan publik atas dugaan pembengkakan anggaran dalam proyek strategis nasional tersebut.

"KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan," ujar Anggota Komisi III DPR, Abdullah, Selasa, 28 Oktober 2025.

Abdullah berharap, penyelidikan dapat berjalan profesional dan independen agar hasilnya mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat korupsi, baik dari kalangan pemerintah, BUMN, maupun swasta, harus diproses hukum.

"KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian," katanya. ●

CORETAX PRODUK GAGAL DIKELOLA AMATIRAN

Proyek raksasa digitalisasi perpajakan nasional, Coretax System, kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kualitas sistem tersebut yang dinilai belum layak digunakan secara penuh.

Menurut Purbaya, mutu Coretax bahkan seperti buatan anak SMA dan perlu segera diuji ketahanan serta keamanannya oleh ethical hacker atau peretas putih independen. Coretax merupakan inti dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diluncurkan sejak 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem pajak terpadu berbasis digital intelligence untuk menutup tax gap, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat penerimaan negara. Proyek dengan nilai total Rp1,228 triliun ini dikerjakan melalui tender internasional oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan pada tahun 2021.

Pemenang tender ditetapkan kepada konsorsium LG CNS (Korea Selatan)–Qualysoft (Indonesia), sebagaimana diumumkan melalui LPSE Kemenkeu dan dikonfirmasi lewat Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.03/2020.

Namun, seiring pelaksanaannya, berbagai pihak menyoroti lemahnya tata kelola dan kesiapan teknis sistem tersebut. Peringatan dari Indonesian Audit Watch

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai pernyataan Menkeu Purbaya merupakan peringatan keras atas risiko kegagalan proyek digitalisasi pajak tersebut.

“Pernyataan itu bukan sekadar sindiran, tapi alarm serius. Jika tidak segera diperbaiki, Coretax bisa menjadi beban negara,” ujar Iskandar, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurut data IAW, proyek Coretax dibangun dalam empat fase, mulai dari perancangan (2021–2022), pengem-

bangun dan integrasi (2022–2023), pengujian dan migrasi (2024), hingga tahap Go-Live yang dijadwalkan pada 2025. Namun, dalam perjalanannya, DJP sempat mengalami gangguan sistem hingga harus mengaktifkan kembali layanan e-Faktur lama sebagai langkah mitigasi, padahal pada

27001.

Atas temuan itu, IAW merekomendasikan agar DJP melibatkan CSIRT Nasional dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit gabungan sebelum setiap tahap go-live.

“Selama 20 tahun terakhir, BPK berulang kali menemukan kelemahan



masa Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, e-Faktur sempat diklaim sebagai bagian dari “Coretax success story”.

“Faktanya, sistem lama dan baru masih berjalan paralel. Klaim itu lebih bersifat visioner, bukan realisasi penuh,” jelas Iskandar.

Pasca insiden ransomware Brain Cipher (varian LockBit 3.0) yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN) pada 2024, proyek Coretax menjadi prioritas penguatan siber nasional. Namun, audit sementara dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menemukan masih banyak kelemahan, antara lain segmentasi jaringan yang belum optimal, autentikasi dan otorisasi yang lemah, serta sistem pencadangan yang belum memenuhi standar ISO

pengendalian sistem TI DJP, data wajib pajak yang tidak lengkap, serta rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi audit,” papar Iskandar.

IAW menegaskan, Coretax bukan sekadar proyek teknologi, melainkan ujian nyata reformasi pajak Indonesia.

“Nilai proyek Rp 1,23 triliun bukan masalah, yang penting adalah tata kelola, akuntabilitas, dan keamanan data pajak rakyat. Jika Coretax berhasil, ini akan menjadi tonggak kedaulatan digital fiskal Indonesia. Tapi jika gagal, bukan hanya uang negara yang hilang, kepercayaan publik juga ikut lenyap,” tegasnya.

Pakar hukum perpajakan, Alessandro Rey Nearson, menilai, dari perspektif hukum, aplikasi yang dirancang di era Jokowi itu diduga cacat hukum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang menjadi landasan dalam pembangunan aplikasi Coretax memiliki kelemahan fundamental.

Perpres yang diteken Jokowi itu hanya mencantumkan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Tanpa didukung peraturan lain yang lebih rinci, misalnya undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP).

"Konstitusi yakni UUD 1945 tidak dapat dilakukan langsung lewat Perpres. Karena bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di mana, perpres adalah aturan pelaksana yang spesifik dan harus didasarkan pada amanat yang jelas dari UU atau PP," kata Rey.

Dia mengingatkan UU 12/2011 ten-



Pernyataan itu bukan sekadar sindiran, tapi alarm serius. Jika tidak segera diperbaiki, Coretax bisa menjadi beban negara.

tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU 13/2022, menekankan pentingnya hierarki hukum, di mana, perpres berada di bawah UU dan PP. Sebagai aturan pelaksana, perpres tidak dapat berdiri sendiri tanpa rujukan yang jelas dari peraturan yang lebih tinggi.

"Konstitusi hanya memberikan landasan dasar bagi negara. Namun, untuk pelaksanaan teknis dan kewenangan eksekutif, diperlukan penjabaran lebih rinci melalui UU atau PP. Tanpa itu, perpres berisiko dianggap cacat hukum dan dapat memunculkan persoalan serius dalam pelaksanaan kebijakan," tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam ne-

gara hukum. Regulasi yang tidak didasarkan pada aturan yang jelas dan spesifik, memicu tumpang-tindih kewenangan, membuka peluang penyalahgunaan, dan melanggar hak-hak masyarakat.

Dia menyoroti sejumlah laporan dari wajib pajak terkait kendala teknis yang signifikan. Kurangnya pendampingan teknis bagi pengguna menjadi salah satu penyebab lambatnya adopsi sistem ini.

"Proyek yang sudah menelan biaya sebesar ini seharusnya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Coretax menghadapi masalah teknis dan hukum yang mengurangi kepercayaan publik terhadap proyek

orang Indonesia yang jago-jago. Orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam program dan kode aplikasi Coretax. Dari hasil pemeriksaan, para hacker rekrutan Kemenkeu itu menemukan sejumlah celah dan kesalahan dalam sistem Coretax yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

Purbaya melanjutkan, masalah utama Coretax muncul karena lemahnya proses quality control dan quality as-



ini," kata Rey.

Rey mengingatkan, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan prosedur pengadaan teknologi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas. Mengingat nilai proyek yang sangat besar, pemerintah wajib memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Coretax.

"Kita tidak bisa membiarkan proyek besar seperti ini dikelola tanpa pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan proyek, dari dasar hukum hingga implementasi teknis, memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku," kata Rey.

Sementara itu, Menkeu Purbaya merekrut sejumlah hacker untuk memperkuat sistem Coretax.

"Kami sudah panggil para hacker,

surance saat sistem dikembangkan. Dia menduga proses tender dan kerja sama dengan penyedia teknologi sebelumnya tidak diikuti pengujian menyeluruh sebelum peluncuran.

"Seharusnya sistem diuji dulu di skala kecil sebelum digunakan secara penuh. Tapi tampaknya itu tidak dilakukan," ujarnya.

Meski berlatar belakang ekonomi, Purbaya mengaku memahami prinsip dasar pengembangan sistem karena dirinya juga seorang insinyur. Ia menegaskan pendekatan teknis harus diperkuat agar Coretax benar-benar andal dan tidak lagi membebani wajib pajak.

"Sekarang kami rapikan semua dalam waktu sebulan, padahal anggarannya disusun untuk empat tahun," kata dia. ●

IKN JADI BEBAN PRABOWO

Ambisi besar Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur kini terancam menjadi proyek mangkrak. Banyak pihak khawatir, tanpa kejelasan pendanaan, pembangunan IKN hanya akan menghasilkan gedung-gedung kosong tanpa penghuni, menjadikannya kota hantu modern.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa proyek ini terus dipaksakan jika akhirnya terbentur masalah keuangan. Apakah ini tanda bahwa proyek IKN sejak awal hanya sekadar mimpi besar yang tidak realistis?

Kementerian Keuangan mencatat, pembangunan infrastruktur dan gedung IKN pada 2022-2024 memakan biaya Rp75,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya adalah realisasi 2022 Rp5,5 triliun, 2023 terealisasi Rp27 triliun, dan tertinggi pada 2024 Rp43,3 triliun.

2025, terdapat 79 tender dan nontender pada tahun ini dengan kata kunci IKN. Beberapa tender merupakan proyek tahun jamak, yakni 2025, 2026, dan 2027.

Sebagian besar tender dilakukan Otorita IKN, lima di antaranya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari 79 tender tersebut, baru lima paket pengadaan yang muncul nilai kontraknya dengan total Rp1,8 triliun.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim merupakan proyek yang gagal.



Dalam lampiran RKP Tahun 2025, alokasi anggaran untuk Otorita IKN dalam perencanaan hingga pembangunan IKN secara keseluruhan Rp36,25 triliun. Itu terbagi menjadi tiga program besar, yakni Pembangunan IKN (Rp18,12 triliun), Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pindahan ke IKN (Rp17,82 triliun), dan Pembangunan Sosial, Superhub Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan IKN (Rp306 miliar).

Dari data Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE), sampai 27 Oktober

Bahkan, menurut Amien, gagalnya proyek IKN lebih parah dari Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang sempat dikeluhkan Jokowi.

"Pada 18 Maret 2016, Jokowi bilang merasa sedih ketika melakukan sidak melihat proyek Hambalang mangkrak," kata Amien.

Saat sidak proyek Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersebut, Jokowi terlihat ditemani oleh Menteri PUPR saat itu, Basuki Hadimuljono. Bersama Basuki, Jokowi dengan san-

gat ambisius berupaya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.

Padahal, membangun ibu kota negara, kata Amien, tidak semudah membangun perumahan rakyat seperti yang sudah dilakukan oleh Basuki.

"Mereka begitu optimis dan mungkin tidak pernah menyangka bahwa membangun sebuah ibu kota di kawasan hutan dan perbukitan jauh lebih sulit dibandingkan membangun perumahan rakyat yang dia kerjakan selama ini," kata Amien.

Amien juga menyebut, sampai saat ini, dirinya tidak yakin dengan para investor yang sengaja menanam saham di IKN.

"Kita tidak pernah tahu yang dikontrak IKN itu kontrak sungguhan atau kontrak-kontrakan," kata Amien.

Amien menegaskan, kegagalan atas proyek IKN ini adalah tanggung jawab besar Jokowi.

"Uang negara yang dikuras Jokowi untuk membiayai IKN ini diperkirakan oleh ICW sekitar Rp466 triliun. Nah kegagalan IKN ini adalah tanggung jawab Jokowi," kata Amien.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyarankan pemerintah fokus untuk mencari investor untuk membiayai proyek pembangunan IKN ketimbang menambah beban APBN.

"Kita harus memahami bahwa ekonomi sedang melambat dan fiskal kita sedang sangat sulit. Prioritas APBN harus diberikan bagi program yang mendatangkan manfaat langsung bagi penciptaan lapangan kerja dan daya beli rakyat," ujar Wijayanto.

Dia mengatakan, jika pembangunan IKN terus menggunakan dana APBN, maka dikhawatirkan masyarakat akan ramai-ramai memprotes IKN dan ini bisa merugikan keberlanjutan proyek IKN sendiri.

"Jika IKN gagal mendatangkan in-

vestor, maka progres proyek harus disesuaikan dengan kondisi fiskal," kata dia.

Lebih lanjut, terkait dengan penundaan proyek IKN yang disarankan oleh beberapa kalangan menurutnya layak untuk dipertimbangkan.

"Ide sebagian kalangan agar Pemerintah secara sengaja menunda IKN sangat layak untuk dipertimbangkan, karena ini akan menghindari risiko mangkrak yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum," tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran pembangunan IKN fase ke II tahun 2026.

Dia mengatakan, dalam pembangunan periode 2025-2029 telah dialokasikan anggaran dari APBN

han anggaran tahun 2026, OIKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun. Usulan tersebut telah diajukan tanggal 4 Juli 2025 kepada Menteri Keuangan, dengan nomor B.123/Kepala/OtoritaIKN/VII/2025.

"Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun. Maka total anggaran OIKN pada 2026 menjadi Rp21,18 triliun," jelasnya.

Ibu Kota Politik

Presiden Prabowo Subianto sendiri resmi menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai 2028. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran

Ginting menegaskan, proyek IKN tidak bisa dilepaskan dari warisan Jokowi. IKN digagas sejak 2019 dan menjadi program prioritas pada periode kedua Jokowi. Namun hingga Jokowi lengser pada 2024, sebagian infrastruktur inti masih belum rampung.

"Jika proyek IKN gagal tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka Jokowi yang pertama kali akan disorot. Tapi Prabowo juga ikut menanggung risiko politik karena meneruskan proyek itu," jelas dia.

la menyebut IKN telah menjadi simbol rapuhnya warisan politik Jokowi. Bagaimana nasib proyek senilai ratusan triliun rupiah tersebut akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik nasional.



Pada 18 Maret 2016, Jokowi bilang merasa sedih ketika melakukan sidak melihat proyek Hambalang mangkrak.

sebesar Rp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

"Pada tahun 2025 dibutuhkan anggaran Rp14,4 triliun, pada awalnya OIKN tahun 2025 sebesar Rp6,3 triliun sehingga dibutuhkan tambahan anggaran Rp8,1 triliun dengan surat kepala otorita IKN," ujar Basuki saat rapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Kemudian, mengingat keterbatasan waktu, otorita IKN menyampaikan usulan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp4 triliun yang disampaikan melalui surat kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutu-

Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai keputusan itu sarat dilema politik. Menurutnya, Prabowo menghadapi situasi simalakama karena di satu sisi kebijakan ini menunjukkan kontinuitas pemerintahan.

Tetapi, di sisi lain bisa menjadi beban politik berat jika pembangunan IKN tersendat atau menggerus anggaran negara.

"Penetapan IKN sebagai ibu kota politik berdekatan dengan Pemilu 2029. Artinya, Prabowo sedang mengatur panggung kekuasaan menjelang akhir periode pertamanya," kata Ginting.



Selain soal pembangunan, Ginting menyoroti potensi gesekan politik antara Prabowo dan keluarga Jokowi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, disebut-sebut memiliki peluang maju pada Pilpres 2029.

"Kalau proyek IKN terbukti jadi beban, bukan tidak mungkin Prabowo mulai mengambil jarak dari Jokowi dan membangun narasi politiknya sendiri," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah belum merilis detail tahapan pemindahan kelembagaan negara ke IKN. Meski demikian, sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan persiapan administratif maupun teknis menuju pemindahan ke Kalimantan Timur. ●

5 BANDARA GAGAL INVESTASI TRILIUNAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan transportasi udara untuk menunjang mobilitas, perdagangan, pariwisata, hingga pertahanan negara. Tapi sayangnya, beberapa bandara di Indonesia yang dibangun secara megah dan fasilitas mewah, malah sepi pengunjung dan penerbangan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, bandara yang sepi itu disebabkan karena bandara tersebut dibangun di wilayah dengan konektivitas yang tidak mendukung.

Itulah sebabnya, masyarakat lebih memilih transportasi lain yang lebih memadai. Justru inilah yang menjadi

(Persero) dan dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dengan nilai investasi mencapai Rp350 miliar.

Di awal pembukaannya, bandara ini dibuka untuk penerbangan komersial yang beroperasi pada 3 Juni 2021. Namun, seiring berjalannya waktu, bandara ini sepi penumpang karena tidak banyak maskapai penerbangan yang menawarkan penerbangan ke bandara ini.

sekitar dengan mempermudah akses wisatawan dan mobilitas masyarakat.

Namun, sejak Februari 2019, bandara ini mulai sepi penumpang karena tidak banyak maskapai yang membuka rute ke bandara ini. Seiring berjalannya waktu, bandara ini akhirnya terbengkalai karena tidak melayani penerbangan.

3. Bandara Ngloram, Blora

Bandara Ngloram didirikan pada 1980 untuk keperluan minyak dan gas. Bandara ini sempat tidak beroperasi selama beberapa tahun. Tetapi kembali dibangun dan diresmikan kembali oleh Presiden Jokowi pada Desember 2021.

Alasan pembangunan ulang ini diharapkan Bandara Ngloram mampu meningkatkan aktivitas industri perminyakan dan bisnis lainnya di sekitar Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya. Bandara yang menghabiskan anggaran APBN mencapai Rp132 miliar itu kini sepi pengunjung dan tidak melayani satu pun penerbangan.

4. Bandara Kertajati, Majalengka

Bandara Kertajati pertama kali dibangun pada 2014 dan resmi beroperasi pada 24 Mei 2018. Bandara yang dulu begitu dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi ini memiliki nilai investasi sebesar Rp2,6 triliun dari APBN dan biaya pembebasan lahan dari APBD Jawa Barat.

Tidak nanggung-nanggung, kala itu Jokowi mengungkapkan bahwa banyak investor dari berbagai negara, tertarik untuk menanamkan modalnya di bandara ini.

Namun kenyataannya, kini Bandara Kertajati tampak sepi. Sejumlah maska-



masalah. Sebab tidak sedikit bandara di Indonesia yang dibangun dengan dana yang besar.

Bila masalah ini tidak diselesaikan, bandara-bandara itu tidak hanya sepi pengunjung, juga terancam terbengkalai. Hingga saat ini, ada beberapa bandara yang dibangun di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang terbengkalai dan sepi penumpang.

1. Bandara JB Soedirman, Purbalingga

Bandara JB Soedirman dibangun pada 2019 oleh PT Hutama Karya

Akhirnya, sejak akhir 2024, Bandara JB Soedirman mulai ditinggalkan karena sudah tidak melayani penerbangan komersial sama sekali.

2. Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya

Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya pertama kali beroperasi menjadi bandara komersial pada awal Juli 2017 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Bandara dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp30 miliar itu diharapkan bisa membantu perekonomian

pai menghentikan operasi penerbangan karena tingkat keterisian penumpang (okupansi) yang rendah.

5. Bandara Ahmad Yani, Semarang

Bandara Ahmad Yani merupakan salah satu bandara tertua yang dibangun pada 1955 sebagai pangkalan udara TNI AD. Sejak 1966, bandara ini dibuka untuk penerbangan komersial dan menjadi bandara internasional pada 2004.

Bandara dengan nilai investasi Rp2,2 triliun, di mana terminalnya bisa menelan biaya Rp930 miliar ini mulai sepi penumpang. Meski ada beberapa maskapai yang masih membuka rute perjalanan menuju bandara ini, tingkat keterisian penumpangnya yang terus menurun membuat bandara ini turun status dari bandara internasional menjadi domestik.

Nasib Kertajati

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional. Salah satu langkah strategisnya dimulai dari kerja sama antara BIJB Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility (GMF).

"Kami tidak hanya berhenti di masalah. Setiap saat kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara. Diawali dari kerja sama antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati, dengan GMF," kata AHY di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Menurut dia, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan kerja sama pemeliharaan, perbaikan dan perombakan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang akan mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional.

"Di awal mungkin dimulai dengan helikopter, mudah-mudahan setelah itu pesawat bersayap tetap (fixed wings)," ungkap AHY.

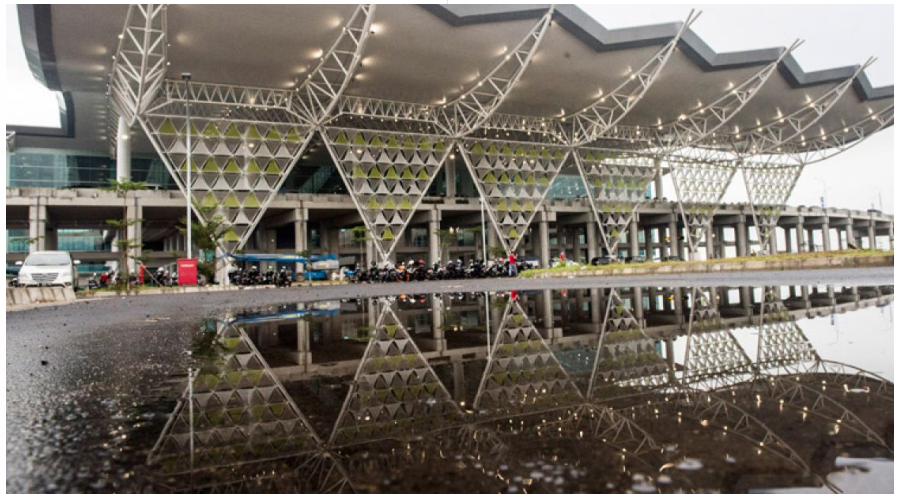
AHY menambahkan, pengemban-

gan Kertajati tidak dapat dilepaskan dari peran Kawasan Rebanda Metropolitan yang mencakup Majalengka, Cirebon, dan Subang. Ia menjelaskan kegiatan strategis seperti pengembangan industri di Kertajati dapat menjadi pemicu tumbuhnya wilayah di sekitarnya.

Dia menilai, kawasan Rebanda berpotensi besar berkembang jika selu-

pernyataannya soal Bandara Kertajati berlokasi di antah berantah. Ia mengatakan pernyataan ini bukanlah bentuk kritikan, melainkan pendorong untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia benar-benar terintegrasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Agus, infrastruktur yang terintegrasi dapat menghubungkan antar



ruh infrastruktur di dalamnya saling terhubung. Menurut AHY, kawasan tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau terisolasi, melainkan harus diintegrasikan dengan wilayah lain agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.

"Kertajati dan Rebanda adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur dapat membuka isolasi, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing wilayah. Ini bukan soal lokasi yang jauh, melainkan bagaimana kita menghadirkan konektivitas dan kegiatan ekonomi yang hidup di sekitarnya," ujar AHY.

Sebelumnya, AHY mengklarifikasi

fasilitas satu dengan lainnya. Baik itu jalan masuk maupun jalan keluar dari lokasi tersebut.

"Semangatnya adalah bagaimana menghadirkan integrasi wilayah. Sehingga benar-benar hidup," kata Agus, Rabu, 29 Oktober 2025.

Adapun pernyataan Agus soal Bandara Kertajati berlokasi di antah berantah disampaikan dalam istilah bahasa Inggris "in the middle of nowhere," pada Selasa, 21 Oktober 2025. Agus mengakui bahwa bandara itu besar, bagus, dan megah. Tapi pembangunannya kurang terintegrasi yang membuat konektivitasnya terhambat..



KORUPSI SISTEMIK JOKOWI MULAI DIBONGKAR

Dugaan korupsi dan moral hazard yang terjadi dalam masa 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo satu demi satu terungkap. Semua itu tidak bisa didiamkan.

Demi masa depan bangsa dan contoh bernegara yang baik dan tertib, semua kasus itu harus ditindaklanjuti dan dibawa ke ranah hukum dalam pengadilan yang jujur, berimbang, dan tidak memihak.

Guru Besar Senior IPB Bogor yang sudah bisa disebut Begawan Ekonomi terkemuka, Didin S Damanhuri, menyatakan, awalnya ada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mangkrak yang sebelumnya sudah menelan dana puluhan triliun rupiah.

Lalu, dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang merupakan singkatan Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem

Hebat. Semboyan yang tidak sesuai dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa proyek itu sudah busuk sejak awal.

Yang terbaru adalah data dari Staf Pengajar UNJ Jakarta, Ubaidillah Badrun, di mana di masa pemerintahan Jokowi terjadi korupsi di berbagai lini. Pada 2024, akhir masa pemerintahannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada dana terindikasi korupsi sebesar Rp984 Triliun. Sebuah jumlah yang sangat besar.

Dalam podcastnya bersama Indra J Piliang di channel Youtube Madilog Forum Keadilan, Ubed menyatakan, PPATK juga sudah mengetahui ada

transaksi antara Jokowi dengan Bank Pembangunan China yang diduga erat hubungannya dengan proyek Whoosh yang dana dan pelaksanaannya dilakukan oleh China.

Didin berpendapat, dana Rp984 triliun itu adalah catatan PPATK yang terindikasi korupsi pada 2024 dari keseluruhan sekitar Rp1.459 triliun. Yang lainnya terindikasi soal penggelapan pajak, narkoba, dan perjudian.

"Itu semestinya ditindaklanjuti. Indikasi korupsi menurut PPATK 2024 sekitar Rp984 triliun itu kan luar biasa besarnya. Mestinya ini diurai oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Ini indikasi korupsi apa saja," kata peneliti senior Indef itu.

Menurut catatan, nilai proyek Whoosh membengkak menjadi Rp112 Triliun dengan jarak Jakarta-Bandung cuma 142,3 kilometer dari Halim, Jakarta Timur, ke Tegalluar, Kabupaten Bandung. Jarak itu sangat pendek, bahkan merupakan kereta cepat yang mempunyai jarak terpendek di seluruh dunia.

“Sementara di Arab Saudi hanya menelan biaya Rp113 Triliun dengan jarak sekitar 700 km. Dari perbandingan ini saja terlihat bahwa memang ada indikasi mark-up yang harus diungkapkan tentang kemungkinan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang berakibatkan ketidakadilan. Rp112 Triliun itu adalah hasil mark up yang jelas-jelas tindakan kejahatan. Nilai pertama kan sekitar Rp80-an triliun. Jadi ada pembengkakan biaya sekitar 30-an triliun. Ini tidak diaudit dulu, langsung perjanjian B to B,” kata Didin.

Yang terjadi kemudian Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menetapkan utang itu langsung dialihkan sebagai beban APBN.

“Itu harus diusut juga. Jadi perkara Whoosh yang kemudian oleh Purbaya ditolak untuk menjadi beban APBN dan diusulkan sebagainya ditangani oleh Danantara. Luhut mengusulkan diadakan renegotiasi dengan China berupa cicilan 60 tahun, yang belum mendapat persetujuan Pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah sendiri harus berhati-hati dan sangat bijak dalam membongkar indikasi moral hazard atau korupsi dalam proyek Whoosh ini.

Seharusnya diungkap dan ditegaskan siapa yang bertanggung jawab dan mereka itu harus pula diproses secara hukum. Yang pasti, bahwa perkara indikasi uang korupsi sebesar Rp984 triliun sepanjang 2024 dan Whoosh yang terindikasi moral hazard memang terjadi di era pemerintahan Jokowi.

“Saya kira makin banyak saja yang terungkap bahwa di era Jokowi banyak sekali kasus korupsi yang sangat besar, baik dalam jumlah maupun dalam nilai uangnya. Itu tidak bisa dibiarkan menguap begitu saja. Demi masa depan bangsa dan kejayaan

negara, kasus-kasus itu harus diselesaikan segera dibawa ke ranah hukum lewat pengadilan,” kata Didin.

Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, juga menilai salah satu klaster besar “dosa politik dan hukum” Presiden Jokowi selama menjadi pejabat publik adalah praktik korupsi.

Ia menyebut, selain korupsi kekuasaan, juga terdapat indikasi korupsi kekayaan yang dilakukan sejak masa menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga setelah lengser dari kursi presiden.

“Awal korupsi di Solo, berakhir di Solo juga,” kata Rizal, Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurut Rizal, dua kasus yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan di Solo

ialah pelepasan aset Pemkot Surakarta berupa Hotel Maliyawan Tawangmangu tanpa persetujuan DPRD pada 2011–2012, serta penerimaan rumah hadiah negara di Colomadu pasca Jokowi pensiun 2024–2025.

Rizal menjelaskan, tanah seluas 7.000 meter persegi di Tawangmangu merupakan milik Pemprov Jawa Tengah, sementara bangunan Hotel Maliyawan dibiayai dari APBD Pemkot Surakarta.

Ketika Pemprov berniat membeli bangunan hotel itu, niat tersebut tak pernah disetujui oleh Wali Kota Jokowi kala itu. Namun, tanpa persetujuan DPRD, Jokowi justru memindahtangankan aset tersebut kepada pemilik PT Sritex, Lukminto.



• INFO KHUSUS

"Ini pelanggaran hukum sekaligus indikasi kuat kolusi antara Jokowi dengan Lukminto. Bau korupsi kasus ini sangat menyengat," tegas Rizal.

Rizal juga menyoroti rumah hadiah negara bagi mantan presiden di Colomadu, Karanganyar. Menurutnya, meski diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, pelaksanaannya melalui Permenkeu 120/PMK-6/2022 membuka peluang korupsi.

Ia memaparkan empat indikasi pe-

ter saja: kuburan kematian," ujar Rizal.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai kasus korupsi di era Jokowi terjadi karena buruknya tata kelola.

"Terungkapnya banyak kasus korupsi era pemerintah Jokowi saat ini menunjukkan tata kelola pemerintahan era Jokowi sangat buruk berhasil diungkap oleh Pemerintahan Prabowo Subianto," kata Yusri.



nyimpangan. Pertama, luas tanah yang semula 9.000 meter persegi menjadi 12.000 meter persegi, termasuk 3.000 meter persegi milik seseorang bernama Joko Wiyono yang dibayar dengan dana APBN.

"Siapa Joko Wiyono ini tidak jelas. Diduga kedua Joko itu adalah orang yang sama," katanya.

Kedua, adanya konflik kepentingan antara Jokowi dengan Mensesneg Pratikno dan Menkeu Sri Mulyani dalam pengelolaan proyek. Ketiga, lonjakan nilai dan luas rumah hadiah negara yang melebihi ketentuan pada masa presiden sebelumnya.

Keempat, penunjukan langsung kontraktor PT Tunas Jaya Sanur tanpa lelang untuk proyek bernilai besar yang disebut melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

"Serakah sekali Jokowi hingga tanah negara 12.000 meter persegi dimakannya. Ia lupa bahwa sebenarnya kebutuhan manusia hanya dua me-

Dia berharap, KPK dan Kejagung serius menangani kasus dugaan korupsi, seperti Jiwasraya, Timah, CPO di Kemendag, hingga Pertamina. "Pihak Kejaksaan Agung dan KPK harus mengungkap semua pihak yang terlibat," ujarnya.

Peneliti senior dari Forum

Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, juga merasa heran menyusul sulitnya membongkar kasus korupsi zaman Jokowi.

"Kenapa korupsi era Jokowi, seperti dana CSR BI, ini baru bisa dibongkar di era Prabowo?" ujar Lucius.

Lucius menganalisa kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistemik. Dia mengatakan demikian karena dugaan kasus korupsi melibatkan lebih dari sekadar individu. Namun, juga lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi dan memberantas praktik tersebut.

Bagi dia, korupsi yang sudah 'melembaga' ini jadi salah satu alasan banyak kasus korupsi. Seperti dugaan dana CSR BI yang baru mencuat setelah adanya pergantian kepemimpinan negara.

"Karena sistemik atau melembaga, korupsi era Jokowi pasti susah terbongkar pada waktu itu. Bagaimana bisa terbongkar jika korupsinya menyebar juga ke lembaga yang seharusnya bertugas untuk membongkar adanya penyelewengan," kata dia.

Lucius meniai, dengan seolah 'sistem' yang saling melindungi di antara lembaga-lembaga tersebut malah membuat korupsi jadi rahasia bersama. Kata dia, hal itu bahkan menghalangi upaya pengungkapan oleh instansi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.

Lucius menyoroti jika cara saling melindungi antar lembaga masih terus berlangsung, maka praktik korupsi yang sama mungkin akan terus berulang. Bahkan, hal itu hingga pemerintahan berikutnya.

"Kalau praktik saling melindungi antar lembaga masih terus terjadi, maka praktik korupsi era Jokowi akan terulang di era sekarang. Yang dilakukan sekarang mungkin nggak akan kebongkar juga sampai rezim baru berkuasa nanti," ujarnya. ●



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312

IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
 Memberikan
 info Tersebut*

- ▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- ▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- ▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- ▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**

**1. NEW PALEMBANG
PORT TANJUNG CARAT**

**2. PROGRAM BERKAT
(BEROBAT GRATIS
BER-KTP)**

**3. GERAKAN SUMSEL
MANDIRI
PANGAN (GSMP)**

**4. PENDIDIKAN
BERKEADILAN**

**5. INFRASTRUKTUR
TUNTAS MERATA**

**6. SUMSEL
INTERKONEKSI**

**7. 100.000 SULTAN
MUDA SUMSEL**

**8. SUMSEL RELIGIUS,
TOLERANSI, DAN
BERBUDAYA**

**9. SUMSEL
WONDERFUL 2030**

**10. SUMSEL
BERINTEGRITAS
DAN MELAYANI**

**11. PROGRAM
KESEJAHTERAAN
DAN KESEHATAN
PEREMPUAN
DAN ANAK**

**12. REVITALISASI
PASAR TRADISIONAL**



12 PROGRAM PRIORITAS UNTUK SUMSEL